

TUGAS AKHIR

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PERENCANAAN
DALAM PROGRAM NEIGHBOURHOOD DEVELOPMENT
Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri
Kabupaten Wonogiri**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Jenjang Strata-1
Perencanaan Wilayah dan Kota**

Disusun Oleh:

Kurnia Ibnu Azhari

NIM : 10606030

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2011**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya akhirnya penulis mampu menyelesaikan draft laporan tugas akhir ini dengan mengangkat judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan dalam Program Neighbourhood Development (Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)”.

Draft laporan tugas akhir ini merupakan syarat akhir penulis untuk menyelesaikan perjalanan studi sebagai mahasiswa Program Strata 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

Dalam penyusunan draft laporan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, arahan, masukan, bimbingan dan dorongan yang bersifat membangun serta bermanfaat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Hardiyati, MT selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS.
2. Bapak Ir. Galing Yudana, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah melakukan percepatan akreditasi Prodi.
3. Bapak Ir. FX. Soewandi, MT selaku dosen pembimbing akademis yang telah mendorong pengambilan tugas akhir.
4. Ibu Ir. Winny Astuti, MSc, PhD selaku ketua tim panitia tugas akhir dan pelaksananya yang telah mempersiapkan mekanisme dan administratif penyelenggaraan tugas akhir serta selalu mendorong keaktifan mahasiswa dalam proses penyusunan laporan tugas akhir, dan selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan,

catatan serta bimbingan baik secara substantif maupun penulisan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak Ir. Rizon Pamardhi Utomo, MURP selaku pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, catatan serta bimbingan baik secara substantif maupun penulisan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
6. BAPPEDA Kabupaten Wonogiri serta Kepala Desa Jendi yang telah menyempatkan diri untuk memberi informasi dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
7. Ayah, Ibu dan Kakak tercinta yang tak lelah menyemangati dan mendoakan keberhasilan penyusunan tugas akhir ini.
8. Andina Utaminingtyas terimakasih atas segalanya, baik kesempatan dan keikhlasan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman-teman angkatan 2006 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan draft laporan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik, masukan, dan saran sangat penulis harapkan dalam upaya perbaikan. Selanjutnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatulloh Wabarakatuh.

Surakarta, Januari 2011

Kurnia Ibnu Azhari

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Peta.....	xii
Daftar Singkatan	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Sasaran	2
D. Metode Penelitian.....	3
E. Ruang Lingkup	4
1. Lingkup Wilayah	4
2. Lingkup Materi.....	4
3. Lingkup Waktu	4
F. Manfaat.....	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	5
G. Sistematika.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pendekatan Pembangunan	8
1. Pembangunan Masyarakat (<i>Community Development</i>)	9
2. Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat (<i>Community Based Development</i>)	10
3. <i>Housing-based Community Development and Poverty Alleviation</i>	12
a. Beberapa Kelemahan Kebijakan Perumahan	14
b. Program Pengentasan Kemiskinan berbasis Permukiman dan Perkotaan di Indonesia	15
4. Pengembangan Lingkungan (<i>Neighbourhood Development</i>)	21
B. Program <i>Neighbourhood Development</i>	24
1. Riwayat Terbentuknya Program	24
2. Dasar Pemikiran Program	26
3. Tujuan, Hasil Akhir dan Strategi Program	27
4. Tahapan Program	28
C. Konsep Partisipasi Masyarakat	32
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	32
2. Tujuan dan Strategi Partisipasi Masyarakat	36
a. Pemberdayaan.....	36
b. Pengembangan Kapasitas Pemanfaatan	36

c. Meningkatkan Keefektifan Program	36
d. Memperbaiki Keefisienan Program	37
e. Pembangunan Ongkos Program.....	37
3. Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif	37
4. Bentuk dan Ukuran Partisipasi Masyarakat.....	40
5. Tingkat Partisipasi Masyarakat	42
6. Konsep Evaluasi Partisipasi	45
a. Evaluasi Partisipasi	45
b. Tataran Evaluasi Partisipasi Masyarakat	48
c. Menentukan Indikator Yang Berhubungan dengan Penelitian	52
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	54
B. Metode Pengumpulan Data	55
1. Kebutuhan Data	55
2. Pengumpulan Data Primer	56
a. Penyebaran Kuesioner.....	56
b. Wawancara (<i>interview</i>).....	59
c. Observasi Lapangan	60
3. Pengumpulan Data Sekunder	61
C. Metode Analisis	61
1. Analisis Kualitatif Deskriptif	63
2. Analisis Kuantitatif Deskriptif	64
a. Klasifikasi Skala Partisipasi Masyarakat	64
b. Pembobotan dan Skoring.....	65
c. Uji Validitas dan Realibilitas	66
d. Analisis deskriptif	67
 BAB IV TINJAUAN OBYEK PENELITIAN	
A. Kondisi Wilayah Desa Jendi	69
1. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi	69
2. Demografi Desa Jendi.....	69
a. Jumlah Penduduk Desa Jendi	69
b. Jumlah Penduduk Desa Jendi dalam Kelompok Umur dan Kelamin Tahun 2009	70
c. Mata Pencaharian Penduduk.....	71
3. Tata Guna Lahan Desa Jendi	76
B. Hasil Penelitian	79
1. Pelaksanaan Program <i>Neighbourhood Development</i> (ND) di Desa Jendi	79
a. Sosialisasi ND	79
b. Perencanaan Lingkungan Makro	84
c. Perencanaan Lingkungan Mikro	88
2. Data Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi.....	92
a. Hasil Wawancara Pembobotan Bobot Tataran	92
b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner	93

c. Data Hasil Kuesioner Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	96
---	----

BAB V PEMBAHASAN

A. Pembahasan Proses Partisipasi di Desa Jendi	104
1. Evaluasi Partisipasi Desa Jendi	104
a. Tataran Partisipasi	104
b. Partisipan	105
c. Cara Partisipasi.....	108
d. Lingkup dan Intensitas Partisipasi.....	109
e. Bentuk Partisipasi	109
f. Efektivitas Partisipasi	109
2. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Perencanaan dalam Program <i>Neighbourhood Development</i> Dengan Pedoman ND	111
B. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi.....	115
1. Tataran Ide.....	115
2. Tataran Pengambilan Keputusan.....	120
3. Tataran Implementasi.....	125
4. Tataran Evaluasi	130

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	137
1. Proses Partisipasi di Desa Jendi.....	137
a. Evaluasi Partisipasi Desa Jendi	137
b. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Perencanaan dalam Program ND dengan Pedoman ND ..	138
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi.....	138
a. Tataran Ide.....	138
b. Tataran Pengambilan Keputusan.....	140
c. Tataran Implementasi	140
d. Tataran Evaluasi	142
B. Rekomendasi.....	143
1. Umum.....	143
2. Khusus	144
3. Penelitian Selanjutnya.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Garis Besar Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Permukiman dan Perkotaan di Indonesia	19
Tabel 2.2	Penetapan Indikator dalam Tahapan Perencanaan....	52
Tabel 3.1	Kebutuhan Data.....	56
Tabel 3.2	Daftar Penyebaran Kuesioner Desa Jendi.....	59
Tabel 3.3	Daftar Responden Wawancara Penelitian	60
Tabel 3.4	Klasifikasi Skala Partisipasi Masyarakat.....	64
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk di Desa Jendi	70
Tabel 4.2	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Jendi Tahun 2005-2009	70
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasar Usia dan Jenis Kelamin Desa Jendi Tahun 2009.....	71
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Desa Jendi Menurut Mata Pencaharian Tahun 2009	72
Tabel 4.5	Penggunaan Lahan Desa Jendi Tahun 2008	77
Tabel 4.6	Permasalahan Dan Keinginan Tiap Dusun.....	81
Tabel 4.7	Hasil Analisis Wawancara Nilai Bobot Tiap Tataran ...	92
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Tataran Ide.....	93
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Tataran Pengambilan Keputusan ...	94
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Tataran Implementasi	94
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Tataran Evaluasi	95
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas	96
Tabel 4.13	Hasil Kuesioner Tataran Ide	97
Tabel 4.14	Hasil Kuesioner Tataran Pengambilan Keputusan	99
Tabel 4.15	Hasil Kuesioner Tataran Implementasi	100
Tabel 4.16	Hasil Kuesioner Tataran Evaluasi.....	102
Tabel 5.1	Kegiatan Perencanaan Partisipatif dan Pelaku yang Terlibat di Desa Jendi	106
Tabel 5.2	Kesesuaian Pelaksanaan pada Tahap Perencanaan dengan Pedoman Program.....	111
Tabel 5.3	Tabel Distribusi Skor Rata-Rata dan Kategori Tataran Ide Tiap Dusun	117
Tabel 5.4	Tabel Distribusi Kategori Tataran Ide Tiap Kelompok Masyarakat	118
Tabel 5.5	Tabel Distribusi Skor Rata-Rata dan Kategori Tataran Pengambilan Keputusan Tiap Dusun	122
Tabel 5.6	Tabel Distribusi Kategori Pengambilan Keputusan Tiap Kelompok Masyarakat	123
Tabel 5.7	Tabel Distribusi Skor Rata-Rata dan Kategori Tataran Implementasi Tiap Dusun	126
Tabel 5.8	Tabel Distribusi Kategori Implementasi Tiap Kelompok Masyarakat	128

commit to user

Tabel 5.9	Tabel Distribusi Skor Rata-Rata dan Kategori Tataran Evaluasi Tiap Dusun.....	132
Tabel 5.10	Tabel Distribusi Kategori Evaluasi Tiap Kelompok Masyarakat	133
Tabel 5.11	Nilai Total Partisipasi Masyarakat.....	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Metode penelitian	7
Gambar 2.1	Konsep <i>Housing-based Community Development and Poverty Alleviation</i>	13
Gambar 2.2	Pengembangan Masyarakat yang Terpadu	23
Gambar 2.3	Intervensi PLP-BK (ND) dalam Konsep Transformasi Sosial	31
Gambar 2.4	Tangga Partisipatif oleh Arnstein	44
Gambar 3.1	Skema Sampel Kuesioner Penelitian	58
Gambar 3.2	Kerangka Analisis	62
Gambar 3.3	Kerangka Analisis Kualitatif Deskriptif	63
Gambar 3.4	Kerangka Analisis Kuantitatif Deskriptif	68
Gambar 4.1	Sosialisasi ND di Beberapa Dusun di Desa Jendi	79
Gambar 4.2	Pelaku Kelembagaan ND desa Jendi	80
Gambar 4.3	Proses Pemetaan Swadaya	84
Gambar 4.4	Implementasi Fisik Masyarakat Jendi dalam Menata Lingkungan	85
Gambar 4.5	Proses Penggalan Cita-Cita Melalui Maket	87
Gambar 4.6	Musyawarah Warga Masyarakat dalam Penentuan Kawasan Prioritas	88
Gambar 4.7	Proses Konsultasi Publik RTBL Kawasan Prioritas	90
Gambar 4.8	Penyepakatan Dokumen RTBL Kawasan Prioritas	91
Gambar 4.9	Diagram Distribusi Skoring Tataran Ide	98
Gambar 4.10	Diagram Distribusi Skoring Tataran Pengambilan Keputusan	100
Gambar 4.11	Diagram Distribusi Skoring Tataran Implementasi	101
Gambar 4.12	Diagram Distribusi Skoring Tataran Evaluasi	103
Gambar 5.1	Kerangka Proses Kegiatan Partisipatif Desa Jendi	110
Gambar 5.2	Diagram Pembobotan Tataran Ide	115
Gambar 5.3	Diagram Pembobotan Tataran Pengambilan Keputusan	120
Gambar 5.4	Diagram Pembobotan Tataran Implementasi	125
Gambar 5.5	Diagram Pembobotan Tataran Evaluasi	130
Gambar 5.6	Analisis Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi	136

DAFTAR PETA

Peta 4.1	Peta Kedudukan Kecamatan Selogiri dalam Kabupaten Wonogiri	73
Peta 4.2	Peta Kedudukan Desa Jendi di Kecamatan Selogiri...	74
Peta 4.3	Peta Administrasi Desa Jendi.....	75
Peta 4.4	Peta Tata Guna Lahan Desa Jendi.....	78
Peta 5.1	Peta Tingkat Partisipasi pada Tataran Ide Desa Jendi	119
Peta 5.2	Peta Tingkat Partisipasi pada Tataran Pengambilan Keputusan Desa Jendi.....	124
Peta 5.3	Peta Tingkat Partisipasi pada Tataran Implementasi Desa Jendi.....	129
Peta 5.4	Peta Tingkat Partisipasi pada Tataran Evaluasi Desa Jendi	134



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
CBD	: Community Based Development
CD	: Community Development
CoBILD	: Community-Based Initiatives for Housing and Local Development
HBCDPA	: Housing-based Community Development and Poverty Alleviation
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KBR	: Kelompok Berpenghasilan Rendah
KIP	: Kampung Improvement Program
KK	: Kepala Keluarga
KORKOT	: Koordinator Kota
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	: Millenium Development Goals
ND	: Neighbourhood Development
NUSSP	: Neighbourhood Upgrading and Shelter Sector Project
P2KP	: Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
P2BPK	: Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLP-BK	: Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POKJA	: Kelompok Kerja
PRONANGKIS	: Program Penanggulangan Kemiskinan
PS	: Pemetaan Swadaya
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RPP	: Rencana Pengembangan Permukiman
RT	: Rukun Tetangga
RTBL	: Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RW	: Rukun Warga
SDM	: Sumber Daya Masyarakat
SUF	: Slum Upgrading Facility
TAPP	: Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif
TIPP	: Tim Inti Perencanaan Partisipatif
UP	: Unit Pengelola
WB	: World Bank

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengembangan wilayah dikenal beberapa konsep pengembangan sebagai upaya pendekatan pembangunan melalui kegiatan perencanaan. Konsep yang muncul belakangan umumnya merupakan reaksi atau kritik atas konsep sebelumnya dan merupakan upaya penyempurnaan sesuai perkembangan masalah yang dihadapi. Kegiatan perencanaan perlu dilakukan sebagai jaminan bagi terlaksananya proses *transformasi* melalui kegiatan pengendalian arah pembangunan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam perkembangannya perencanaan di Indonesia dikenal dengan konsep perencanaan *top-down* dan perencanaan *bottom-up*. Konsep perencanaan *top-down* adalah suatu konsep perencanaan langsung dari atas atau dari pemerintah pusat. Sedangkan perencanaan *bottom-up* adalah proses perencanaan langsung dari bawah ke atas yaitu dari masyarakat ke pemerintah. Perencanaan partisipatif berada di tengah antara *top-down planning* dan *bottom-up planning*. Pendekatan yang melibatkan masyarakat ini disadari penting, karena permasalahan pembangunan yang ditangani oleh suatu negara atau permasalahan pembangunan dalam skala kota sekalipun, masih dirasakan terlalu luas untuk ditangani. Salah satu alternatif penanganan masalah pembangunan sudah semestinya diturunkan menjadi penanganan skala unit lingkungan (*neighbourhood*), karena pada skala tersebut masyarakatnya justru sangat akrab dengan rutinitas masalah yang dihadapi langsung (Wahyudi dan Prakosa,2008:15).

Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya menciptakan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas atau *Neighbourhood Development* yang mendukung serta memfasilitasi perencanaan langsung dari masyarakat (*bottom up*). Program ini merupakan program baru (*pilot project*) berskala nasional, dengan desa Jendi merupakan salah satu desa yang menjadi percontohan.

commit to user

Neighbourhood Development di Desa Jendi Kabupaten Wonogiri ini merupakan proyek pemerintah dengan pendekatan yang dilakukan adalah membentuk proyek dengan nuansa program sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih tergal. Karena konotasi masyarakat akan proyek pemerintah yang biasanya diserahkan pihak swasta dan jarang melibatkan masyarakat di dalamnya. Hasil akhir dalam tahap perencanaan pada program *Neighbourhood Development* adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang proses pembuatannya melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subyek dari perencanaan sehingga pembangunan dapat sesuai dengan harapan masyarakat.

Perlunya dilakukan kajian penelitian yang difokuskan pada tingkatan partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan begitu sentralnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pelaksanaan proyek ini. Di mana dalam hal ini tingkatan partisipasi memegang peranan penting dalam keberhasilan program *Neighbourhood Development* itu sendiri. Perencanaan partisipatif akan menghasilkan dokumen perencanaan yang merupakan inti atau pedoman dari keberlanjutan program pada tahapan selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang ada dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses partisipatif pada tahap perencanaan dalam program *Neighbourhood Development* di Desa Jendi ?
2. Berapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pada program *Neighbourhood Development* di Desa Jendi ?

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses partisipatif di desa Jendi berlangsung serta tingkat partisipasi masyarakat Desa Jendi dalam tahap perencanaan.

Sasaran dari penelitian ini adalah :

- Mengetahui pelaksanaan program *Neighbourhood Development* di Desa Jendi pada tahap perencanaan.
- Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan pada tahap perencanaan Program *Neighbourhood Development* di lapangan dengan pedoman pelaksanaan.
- Menghitung besar tingkat partisipasi masyarakat Desa Jendi pada tahap perencanaan dalam program *Neighbourhood Development*.

D. Metode Penelitian

Alur pemikiran penelitian ini diawali dengan terpilihnya Desa Jendi sebagai *pilot-project* dari program *Neighbourhood Development* yang di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dengan penerapan aspek tridaya serta konsep *Housing-Based Community Development* dan menerapkan pendekatan *bottom-up*. *Neighbourhood Development* sendiri mempunyai tujuan umum untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, berjati diri dan lestari. Salah satu tujuan khususnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan, dan pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman mereka. Karena begitu sentralnya partisipasi masyarakat bagi keberlanjutan dan keberhasilan program maka perlu dilakukan penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai proses partisipasi di desa Jendi dan besar tingkat partisipasi masyarakatnya. Tahap persiapan penelitian dimulai dengan studi literatur awal terkait dengan program *Neighbourhood Development*, persiapan administrasi survey, pembuatan kerangka pikir, dsb. Kemudian pengumpulan data-data terkait dengan program *Neighbourhood Development*, baik data-data primer maupun sekunder. Dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan tentang proses perencanaan partisipatif di Desa Jendi. Sedangkan untuk menjawab besar tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan analisis kuantitatif deskriptif

dan metode evaluasi partisipasi masyarakat yang telah dibagi dalam empat tataran tahap perencanaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

E. Ruang Lingkup

1. Lingkup Wilayah

Batasan wilayah kajian penelitian ini adalah Desa Jendi. Desa Jendi merupakan salah satu desa di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Desa Jendi sendiri merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Wonogiri yang memiliki tambang emas, dan merupakan salah satu *pilot-project* dalam pengembangan program *Neighbourhood Development*. Desa Jendi terdiri dari 9 (sembilan) dusun yang terdiri dari Dusun Jetak, Dusun Kadipaten, Dusun Bendungan, Dusun Nglenggong, Dusun Bulu, Dusun Geran, Dusun Ceperan, Dusun Tenongan, Dusun dan Dusun Ngelo memiliki 9 RW dan 32 RT.

2. Lingkup Materi

Materi yang akan di bahas dibatasi hanya pada tingkatan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dalam program *Neighbourhood Development* di Desa Jendi. Dengan pembagian variabel tataran ide, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi pada tahapan perencanaan tersebut.

3. Lingkup Waktu

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun 2010.

F. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota.
- b. Menambah pengetahuan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program *Neighbourhood Development*.

commit to user

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan program *Neighbourhood Development*. Sehingga tujuan dari program tersebut akan menghasilkan manfaat seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

G. Sistematika

Bagian pertama pada penelitian ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah berkaitan dengan permasalahan perencanaan partisipatif di Desa Jendi dalam Program *Neighbourhood Development*, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, ulasan singkat mengenai metode penelitian dan sistematika yang akan digunakan dalam penulisan.

Bagian kedua pada penelitian ini berisi teori atau tinjauan pustaka yang telah ditentukan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Hal tersebut merupakan dasar teori serta acuan untuk melakukan analisis yang akan digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan permasalahan partisipasi masyarakat dalam Program *Neighbourhood Development*.

Bagian ketiga pada penelitian ini setelah tinjauan pustaka adalah menentukan metode penelitian yang digunakan, data dan sumber data penelitian, serta metode analisis kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dalam Program *Neighbourhood Development*.

Bagian ke empat pada penelitian ini, memuat kondisi wilayah Desa Jendi dan data hasil penelitian berupa data proses partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dalam Program *Neighbourhood Development* serta data wawancara dan penyebaran kuesioner pengukuran tingkat partisipasi masyarakat berikut detailnya.

Bagian ke lima pada penelitian ini, memuat analisis atau pembahasan mengenai proses partisipasi masyarakat Desa Jendi dalam Program

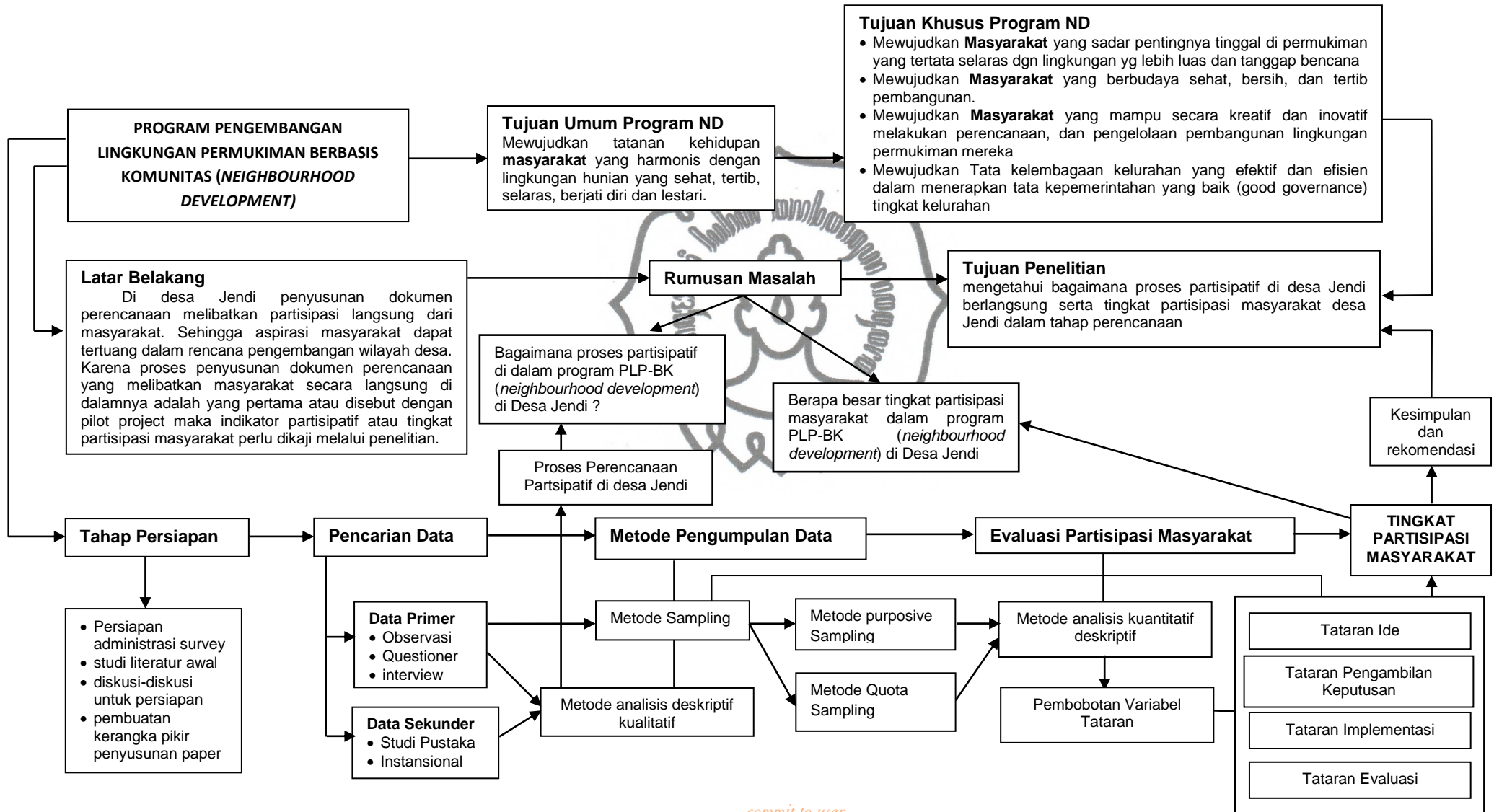
Neighbourhood Development dengan menggunakan metode evaluasi partisipasi pada proses perencanaan partisipatifnya, serta pembahasan tingkat partisipatif masyarakat Desa Jendi melalui tataran ide, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi.

Bagian ke enam atau bagian akhir dari penelitian ini, berisi penarikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan serta hasil penelitian di kawasan studi tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan melalui Program *Neighbourhood Development*.



commit to user

Gambar 1.1 Metode Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pendekatan Pembangunan

Konsep perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sebelum Repelita IV (1983/1984) menerapkan *top-down planning*. Dampak tersebut merupakan mekanisme pembangunan yang instruktif dan bersifat *top-down*. Aplikasi konsep *top-down* ini telah menimbulkan berbagai masalah yang cukup serius, misalnya ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan dan kemalasan. Dampak-dampak negatif tersebut secara tidak langsung mengakibatkan pemarginalisasian masyarakat bawah (*grass root*). Masyarakat bawah menjadi sekedar sebagai obyek, sebagai penonton dan sebagai suplemen pembangunan yang tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan masyarakat di daerahnya. Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (*trickle down effect*) yang dikenalkan oleh Albert Hirschman, merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat *top-down*. Konsep ini dilandasi pula oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi. Penerapan konsep pembangunan *top-down* itu secara empirik telah memperlihatkan terjadinya kecenderungan kurang memberikan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah ini diperlakukan hanya sebagai obyek, atau hanya sebagai penonton pembangunan.

Konsep pembangunan ini tidak aspiratif dan dianggap tidak bijaksana terhadap permasalahan yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai penerima program pembangunan. Terdapat tiga kelemahan, yaitu: pertama, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, kedua, mengabaikan lingkungan sosial budaya, dan ketiga, merusak ekologi fisik. Kelemahan ini telah menimbulkan dampak pada tingginya tingkat kegagalan pada berbagai program yang dilaksanakan pada berbagai daerah.

commit to user

Sadar karena hal ini, maka perlu dipikirkan secara mendesak untuk merumuskan kembali konsep pembangunan yang bersifat populis (*people centered*), yaitu keberpihakan kepada golongan kecil dan mengakar pada masyarakat di bawah (*grass root*). Upaya ini didukung oleh komitmen/kesepakatan moralitas yang tinggi dalam memberdayakan masyarakat bawah, yang kemudian dikuatkan oleh lahirnya paradigma baru pembangunan, yaitu pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) melalui *bottom-up planning* yang aspiratif dan apresiatif dengan melibatkan mereka pada proses pembangunan secara menyeluruh (Adisasmita, 2006:31).

Dalam era reformasi, telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai *provider* (penyedia) tetapi sebagai *enabler* (fasilitator). Peranan sebagai *enabler* berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.

1. **Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)**

Dalam *Community Development* diterapkan prinsip-prinsip:

- Transparansi/ keterbukaan.
- Partisipatif.
- Dapat dinikmati masyarakat
- Dapat dipertanggung jawabkan/ akuntabilitas.
- Berkelanjutan/ *sustainable*.

Pembangunan masyarakat itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi/ wawasan pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang lebih dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Community Development merupakan konsep pembangunan yang sesungguhnya telah dikembangkan dan diterapkan sejak dasawarsa enam puluhan, yaitu dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-

1960 atau yang dikenal dengan nama Rencana Juanda yang disusun oleh Biro Perancang Negara. Titik berat pembangunan adalah pada pembangunan masyarakat dengan pembentukan kaderkader pembangunan masyarakat yang tangguh berswasembada.

Konsep senada dengan *Community Development* adalah *Community Empowering, Community Based Resources Management, dan Community Based Development Management*, sebagai paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 1990-an. Program-program pembangunan yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan hanya memuaskan beberapa pihak saja, tetapi harus diupayakan terdapat hubungan timbal balik bagi pihak yang menyusun program pembangunan dan masyarakat sebagai pihak yang mendapat pelayanan dan manfaat dari pembangunan proyek-proyek tersebut (Adisasmita, 2006:115).

2. Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat (*Community Based Development*)

Hakikat pembangunan masyarakat adalah *Community Based Development/ Pembangunan Yang Bertumpu Pada Masyarakat (CBD)* atau Pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom-up*), yang menempatkan masyarakat sebagai penentu keputusan, adalah merupakan konsep dimana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan pembangunan.

Prinsip CBD adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok sebagai penentu dan pelaku utama, dimana seluruh pengambilan keputusan dan rencana tindak didasarkan atas kehendak dan kesepakatan kelompok, yang menganut prinsip-prinsip:

- Dari aspirasi masyarakat, yaitu mendasarkan pada kebutuhan, gagasan dan keinginan masyarakat, dimusyawarahkan dan mengakomodasikan suara yang paling rasional serta dapat diterima olehnya.

commit to user

- Dari kepentingan masyarakat, yaitu artinya menempatkan pemenuhan kebutuhan bersama di atas kepentingan lainnya, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat.
- Dari kemampuan masyarakat, yaitu yang menempatkan tingkat kemampuan masyarakat sebagai basis dalam merencanakan target sasaran cara maupun besaran pembiayaan pembangunan.
- Dari upaya yang sepenuhnya dilaksanakan secara bersama, yaitu untuk dan atas nama kelompok masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kerjasama yang kuat dan mengakar di masyarakat.

Menurut Parwoto, CBD merupakan proses kegiatan pembangunan partisipasi yang dalam hal ini tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan, permasalahan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara pelaku yang terlibat (Parwoto, 1997 dalam Margiati 2008:22). CBD juga bisa diartikan mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil dari setiap jenis kegiatan pembangunan (Jayadinata, 1991 dalam Margiati 2008:22). Sedangkan menurut Maskun (Maskun, 1995 dalam Margiati 2008:22), CBD adalah proses pembangunan masyarakat yang mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek-aspek humanisme dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat dengan mengandalkan kemampuan masyarakat untuk tujuan menciptakan kondisi tumbuhnya suatu masyarakat yang berkembang secara swadaya.

CBD bertujuan meningkatkan kesadaran tiap pelaku pembangunan tentang maksud dan tujuan kegiatan, meningkatkan proses saling belajar, menumbuhkan kesadaran dan tekad bersama untuk mencapai kesepakatan, menumbuhkan rasa solidaritas, memiliki dan kebersamaan yang kondusif untuk kelanjutan pembangunan. Dalam CBD masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk memutuskan apa yang baik bagi mereka (Parwoto, 1998 dalam Djatmiko Eko Wibowo, 2000). Sedangkan pihak pemerintah dan swasta diharapkan dapat mendukung proses masyarakat. Mereka harus memiliki komitmen untuk menyerap serta

commit to user

memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (Anonim, 1999: II-12 dalam Djatmiko Eko Wibowo, 2000).

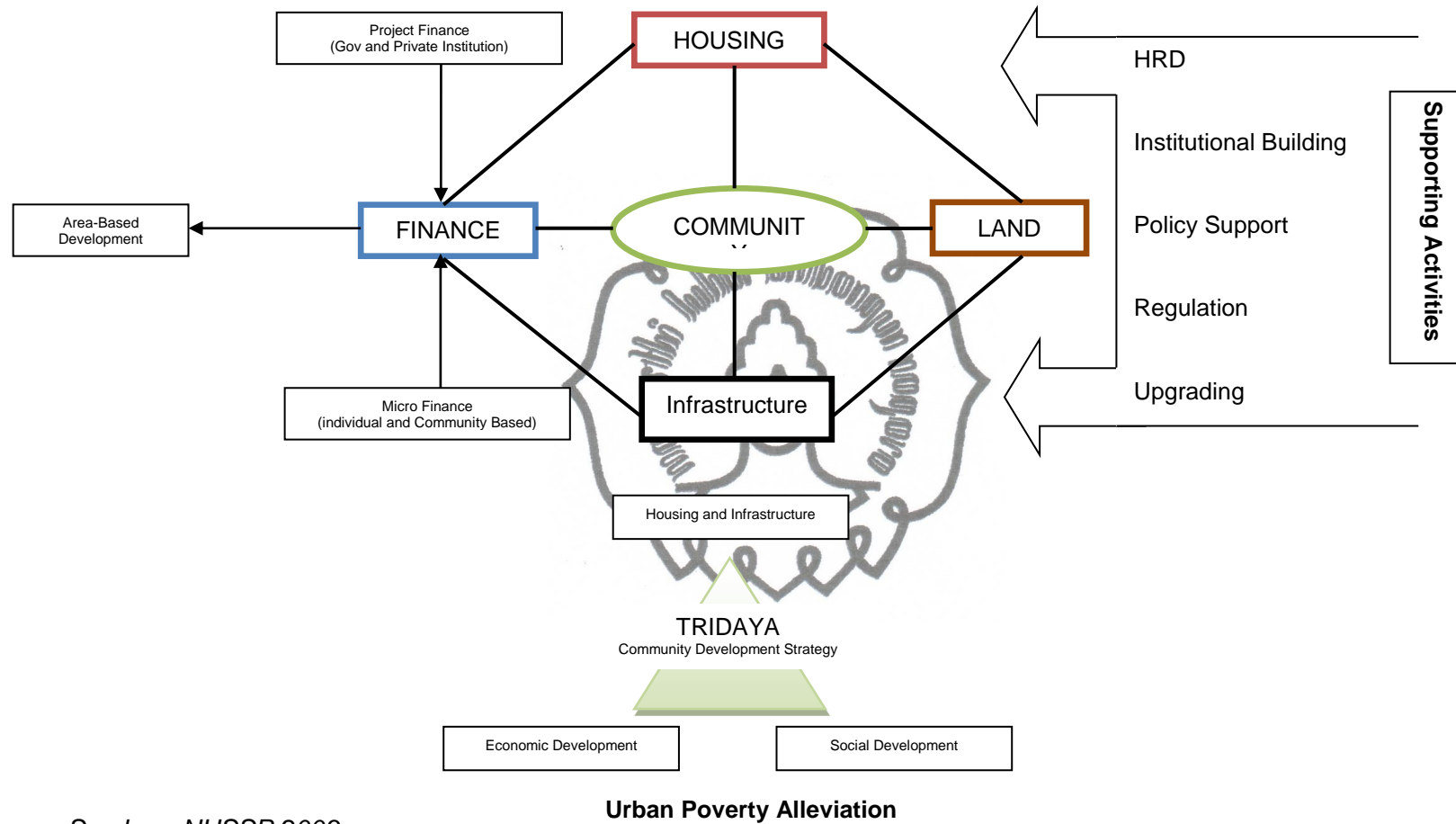
Ciri-ciri dari CBD tidak jauh berbeda, yaitu: sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ide pembangunan *bottom-up*/dari bawah, adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan, dipeliharanya hasil dari pembangunan dan organisasi menjadi lebih baik.

3. Housing-based Community Development and Poverty Alleviation

Housing-based Community Development bisa didefinisikan sebagai "using the process of creating and constructing the houses and associated space, structures and services to provide a habitable environment as the basis for making structural changes to communities that alters the constituent parts and their relationships such that a different desired level of performance becomes possible ". Secara ringkas bisa diartikan "Using the process of neighborhood upgrading to create better, more effective communities (NUSSP, 2003, dalam Astuti, 2009:14). Sehingga pembangunan perumahan dan permukiman dilihat sebagai instrument sosial untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan pengembangan komunitas sehingga bisa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Pengembangan komunitas sendiri (*development of community*) dalam konteks ini menyangkut 3 hal (TRIDAYA) yaitu pengembangan perumahan (*housing asset*); pengembangan sosial (*social assets*) dan pengembangan ekonomi masyarakat (*economic assets*). Gambar 2.1 menggambarkan kerangka HBCDPA (NUSSP, 2003 dalam Astuti, 2009:14).

Untuk menjaga sustainabilitas, pendekatan yang harus dilakukan adalah *partisipatori*, (bersifat melibatkan pihak-pihak yang akan terkena manfaat serta dampak dari kegiatan); *inclusive* (peluang terbesar adalah pihak-pihak yang terkena dampak) dan *transparent* (keterbukaan dan transparansi serta adanya kejelasan terhadap setiap keputusan).

commit to user



Sumber : NUSSP,2003

Gambar 2.1 Konsep Housing-based Community Development and Poverty Alleviation

a. Beberapa Kelemahan Kebijakan Perumahan

Paradigma Otonomi Daerah yang membawa perubahan bagi pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, ternyata juga membawa perubahan paradigma bagi pembangunan Perumahan. Menurut UN HABITAT (2002) dalam "*Cities Without Slums*"

Keterbatasan kebijakan permukiman terkait dengan pengatasan SLUM area adalah diantaranya:

- 1) Tidak efisiennya strategi pembangunan perumahan dibandingkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih realistis, diantaranya karena
 - kebijakan perumahan yang ada seringkali bersifat strategi "*TOP DOWN*" sehingga ada tuntutan untuk merubah strategi menjadi "solusi perumahan permukiman berbasis masyarakat dan pasar (*market-people based solution*) dan pendekatan proses (*process approach*) yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan institusi.
 - Bergesernya paradigma pembangunan perumahan dari *physical planning public housing*, pembangunan perumahan secara fisik menjadi *self help initiative*, pembangunan perumahan swadaya
 - bahwa kebijakan terkait permukiman kumuh dan liar (*slums and informal settlements*) banyak menyangkut kepada Pengenalan akan realitas yang ada di lapangan
- 2) Adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, dikarenakan beberapa hambatan-hambatan: kelemahan pengaturan institusi; lemahnya mekanisme pelibatan masyarakat yang cukup memadai untuk memberdayakan; lemahnya peraturan dan *legal framework*; lemahnya instrument fundamental seperti system legalisasi lahan; lemahnya fokus strategi kebijakan perumahan; lemahnya sumber-sumber pembiayaan; serta lemahnya kemauan politik (*political will*)
- 3) Kebutuhan untuk kemauan politik yang lebih berkelanjutan.
- 4) Kemauan politik dengan rasa memiliki dan kepemimpinan lokal, serta mobilisasi *stakeholder* untuk terlibat merupakan kunci sukses sebuah strategi kebijakan

commit to user

- 5) Kesulitan di dalam percepatan dan replikasi dari pendekatan yang telah sukses diterapkan
- 6) Keterbatasan sumber pembeayaan untuk perumahan. Seringkali pembeayaan perumahan yang konvensional hanya bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi. Sementara institusi pembeayaan perumahan sector publik (*Public sector housing finance institution*) menawarkan pinjaman jangka panjang untuk golongan ekonomi lemah yang seringkali mensyaratkan sertifikat tanah dan surat keterangan pendapatan
- 7) Kebutuhan akan peningkatan fokus pada rumah sewa.
- 8) Lemahnya management lahan kota
- 9) Ternatasnya infratraktur dan services, sementara public-private partnership membutuhkan komitmen politik yang sangat kuat

b. Program Pengentasan Kemiskinan berbasis Permukiman dan Perkotaan di Indonesia

Program-program pengentasan Kemiskinan berbasis permukiman dan perkotaan telah banyak dikenal dan diterapkan di Indonesia melalui lembaga-lembaga baik internasional maupun Nasional. Beberapa program yang dikenal adalah:

- 1) KIP (*Kampung Improvement Program*), 1970 -1980 an
Didanai oleh peemrintah didukung oleh World Bank. Bertujuan untuk Memperbaiki kondisi lingkungan secara menyeluruh melalui 3 programnya, Tri Bina (Bina lingkungan, Bina manusia dan Bina usaha).
- 2) CoBILD (*Community-Based Initiatives for Housing and Local Development*)
Sebuah program dari UNDP/UNCHS, didirikan oleh pemerintah Belanda. Program ini diinisiasi pada tahun 1989. Program CoBILD adalah program yang difokuskan untuk membantu kota yang bertumpu pada lembaga untuk menyediakan pendampingan MBR untuk meningkatkan rumah dan lingkungan masyarakat.

commit to user

3) P2 BPK (Pembangunan Perumahan Bertumpu pada kelompok).

Program ini bertujuan untuk Memberdayakan dan memampukan masyarakat yang berniat menyelenggarakan pengadaan, rumah secara kelompok / kooperatif untuk dihuni sendiri melalui KSM. Sasaran utamanya adalah MBR / tidak tetap, Belum memiliki rumah sendiri; Penghasilan rata-rata < Rp. 200.000,00/KK/ Bln.

4) *NUSSP (Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project)* .

Merupakan project yang dilaksanakan oleh Departemen PU yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat proses fasilitasi oleh NUSSP dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Community Development* (Pengembangan Masyarakat). Secara ringkas 4 (empat) komponen utama dalam pelaksanaan *NUSSP (Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project)* dirumuskan sebagai berikut:

- Penyiapan Rencana, Penataan Lingkungan/ RP4D dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
- Fasilitasi Kredit Mikro Perumahan kepada KBR.
- Pembangunan Infrastruktur Permukiman bagi KBR
- Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui kegiatan Pelatihan dan Pendampingan

5) Perumahan Swadaya

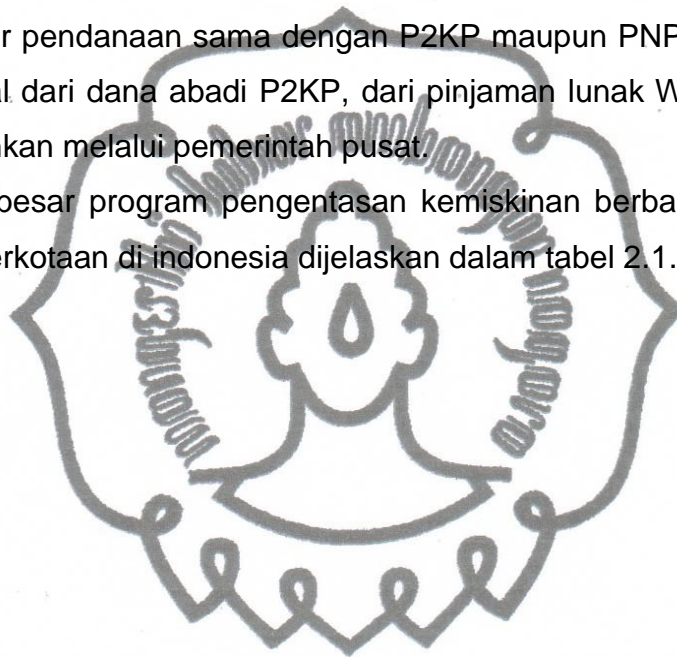
diluncurkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat Deputi bidang Perumahan Swadaya. berdasarkan Pemenpera no 8/ PERMEN/ M/ 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya. Membantu dan merangsang masyarakat untuk membangun perumahan rakyat dengan kebijakan dan peraturan yang memudahkan untuk :

- Pendirian rumah baru
- Peningkatan kualitas / perbaikan rumah
- Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan

commit to user

- 6) P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan), 1999- 2007
Merupakan Penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat perkotaan dengan pendekatan pemberdayaan. Membiayai kegiatan yang dapat memberi manfaat pada target sasaran melalui : Bantuan modal kerja bergulir dan hibah bagi pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Adapun target groupnya adalah Masyarakat miskin perkotaan dengan penghasilan < Rp. 250.000,00/KK/Blh yang tergabung dalam KSM Dana dari pemerintah pusat (dari pinjaman lunak World Bank) yang bisa dimanfaatkan untuk (pilihan terbuka): Kegiatan ekonomi Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti yang biasa dilakukan dalam standar KIP.
- 7) PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), 2007 sd/ sekarang
Merupakan program lanjutan P2KP, dengan maksud pembangunan masyarakat mandiri yang mampu menanggulangi kemiskinan dan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Sasarannya adalah Masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat dan para pihak terkait (stakeholders). Sedangkan dana berasal dari dana abadi P2KP, dari pinjaman lunak World Bank yang diturunkan melalui pemerintah pusat.
- 8) SUF (*Slum Upgrading Facility*) – 2007 sd sekarang
Merupakan Bantuan dari UN-Habitat yang dibiayai Pemerintah UK, Norwegia dan Swedia (untuk pilot project). Tujuannya adalah meningkatkan akses MBR pads lembaga keuangan formal untuk memperbaiki kualitas rumah dan lingkungannya.
- 9) Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ *Neighbourhood Development*, 2008 s/d sekarang
Merupakan program kelanjutan dari P2KP serta PNPM Mandiri dengan maksud kegiatan ini dapat memuat arahan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dan program-program pembangunan lingkungan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip

perencanaan partisipatif dan pendekatan Tridaya yang merupakan aktualisasi dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), adapun target group menurut pedoman adalah pelibatan minimal 40% tingkat kehadiran kaum rentan dan kaum perempuan dalam pertemuan-pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta minimal 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tingkat RT/ komunitas basis (pelibatan tokoh masyarakat). Sedangkan sumber pendanaan sama dengan P2KP maupun PNPM Mandiri yang berasal dari dana abadi P2KP, dari pinjaman lunak World Bank yang diturunkan melalui pemerintah pusat. Garis besar program pengentasan kemiskinan berbasis permukiman dan perkotaan di Indonesia dijelaskan dalam tabel 2.1.



commit to user

Tabel 2.1 Garis Besar Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Permukiman dan Perkotaan di Indonesia

Indikator	KIP	P2BPK	CoBILD	P2KP	PNPM Mandiri	SWADAYA	NUSSP	SUF	Neighbourhood Development
Struktural	Tidak ada data yang spesifik, tetapi pendekatan yang dilakukan lebih secara top-down	Adanya pergeseran pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan rumah dari <i>supply side</i> ke <i>demand side oriented approach</i>	Membuka akses MBR ke lembaga keuangan merupakan titik beratnya	Kebijakan <i>pro poor</i> dan <i>good governance oriented</i> dengan pendekatan pemberdayaan sebagai syarat <i>sustainable development</i>	Penekanan prinsip <i>good governance</i> , meliputi demokrasi, partisipasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas	Membuka akses MBR ke Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) melalui dana stimulant	Pemberdayaan ekonomi warga melalui <i>channeling</i> dengan program bidang pekerjaan umum dan kegiatan lain di daerah	Memberikan akses pada MBR ke lembaga keuangan formal	Penekanan prinsip <i>good governance</i> , meliputi demokrasi, partisipasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas
		Pemerintah lebih berperan sebagai <i>enabler</i>	Dengan system revolving funds, mereka yang bisa mengembalikan pinjaman akan langsung digaransi untuk pinjaman selanjutnya	Membuka akses ke kredit dengan bantuan modal bergulir untuk peningkatan penghasilan berkelanjutan	Peningkatan akses masyarakat miskin ke pelayanan sosial, sarana dan prasarana serta pendanaan	Membuka akses pada fasilitas kredit mikro perumahan	Peningkatan kondisi MBR, dari <i>nonbankable</i> menjadi <i>bankable</i> , sehingga selanjutnya diharapkan bisa mengurangi kemiskinan	Diberikan penekanan khusus untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang sejalan dengan menciptakan lingkungan hunian yang kondusif terhadap berbagai aspek pembangunan manusia	
SDM	Adanya pembinaan terhadap warga (bina manusia)	Adanya pelatihan-pelatihan yang mengarah pada <i>capacity building</i>	Adanya perkuatan kemampuan institusi dan perorangan di masyarakat	Dana bisa digunakan untuk pelatihan keterampilan Tidak secara langsung, yaitu dengan peningkatan penghasilan diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan/ SDM generasi berikutnya	Sama dengan pelaksanaan P2KP	Kegiatan Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dipadukan dengan kegiatan <i>capacity building</i>	<i>Capacity building</i> dalam bentuk pelatihan dan pendampingan Perencanaan secara partisipatif melalui program NUP (Neighbourhood Upgrading Plan)	Tidak terdata	Sama dengan pelaksanaan P2KP

Indikator	KIP	P2BPK	CoBILD	P2KP	PNPM Mandiri	SWADAYA	NUSSP	SUF	Neighbourhood Development
Fisik	Adanya peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai	Membantu MBR memperoleh key assets, dalam hal ini tanah dan bangunan	Membantu MBR memperoleh key assets, dalam hal ini tanah dan bangunan	Sebagian dana yang diturunkan per kelurahan berupa hibah yang digunakan untuk pemberdayaan lingkungan melalui ketersediaan infrastruktur, serta perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan	Sama dengan pelaksanaan P2KP	Penekanan output-nya lebih pada fisik	Peningkatan fasilitas lingkungan permukiman melalui pengadaan prasarana dan sarana dasar	Membantu MBR memperoleh key assets, dalam hal ini tanah dan bangunan	Sama dengan pelaksanaan P2KP
					Disamping itu juga ada program khusus Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	Program ini didukung oleh paket kegiatan Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dengan melibatkan peran aktif masyarakat, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, saluran, juga pengadaan air bersih, MCK, dsb.			
Pemberdayaan Lembaga di masyarakat	Tidak terdata	Pengorganisasian dan penggalangan peserta dilakukan dalam sebuah kelompok swadaya masyarakat seperti koperasi, paguyuban, dsb, dengan didampingi oleh konsultan pendamping	Pembentukan 12 Forum Pembangunan Kota dan 100 Badan Pembangunan Kampung	Pemberdayaan sosial melalui pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)	Terbentuknya lembaga masyarakat (BKM) sebagai wadah untuk mensinergikan masyarakat dan menyelesaikan masalah	Pembentukan kelembagaan masyarakat penerima dana stimulant berupa KSM atau SKM, serta lembaga penyalur dana stimulant tersebut berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berta Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)	Terbangunnya kelembagaan lokal sebagai representasi warga masyarakat (BKM)	Terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat	Penguatan BKM/ LKM dan Unit Pelaksana (UP) sebagai pusat pelayanan masyarakat untuk mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dan mengelola pembangunan lingkungan di wilayahnya

Sumber : Astuti (2009:22)

4. Pengembangan Lingkungan (*Neighbourhood Development*)

Lingkungan merupakan komponen penting dari masyarakat, dan perlu dicakup dalam pendekatan yang terpadu terhadap pengembangan masyarakat. Pendekatan ini berlaku untuk lingkungan alam maupun lingkungan buatan.

Isu-isu lingkungan kadang kala sangat penting dalam menyadarkan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi katalisator untuk aksi masyarakat. Hal ini telah lama diakui dalam wilayah perkotaan yang aksi sosialnya banyak dibahas sebagai reaksi terhadap jalan raya lintas atau pembangunan properti yang diajukan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan dilihat sebagai ancaman terhadap kehidupan masyarakat lokal. Persoalan polusi tertentu seperti pembuangan limbah beracun atau emisi timah dapat menjadi isu lain yang siap dimobilisir oleh masyarakat. Ancaman tersebut dapat menyatukan/menyadarkan sebuah masyarakat, dan organisasi aksi awal dapat memberikan basis untuk pembangunan jangka yang lebih panjang. Akan tetapi, pengembangan lingkungan berjalan melampaui aktivisme lingkungan. Pembangunan ini melibatkan perbaikan lingkungan masyarakat dalam arti yang paling luas, dan menuntut mereka untuk sadar mengenai pentingnya isu-isu lingkungan dan untuk ikut bertanggung jawab dalam memperbaiki dan melindungi lingkungan lokal. Pada level lebih sempit dari kampanye aktivis, kesadaran yang lebih luas terhadap lingkungan dapat digunakan sebagai cara untuk menyatukan orang-orang dengan cara yang relatif aman. Merancang proses yang bagus untuk siklus ulang merupakan aktivitas yang dapat mendatangkan dukungan masyarakat yang luas, dan merupakan cara praktis untuk mendapatkan 'sedikit bantuan untuk lingkungan' dari orang-orang (Ife dan Tesoriero, 2008: 470).

Bioregionalisme adalah suatu gerakan yang melihat lingkungan lokal sebagai basis primer untuk pengembangan masyarakat (Sale, 1991). Gerakan ini menekankan kemandirian dan prinsip-prinsip otonomi dan lokalisasi. Gerakan ini mendukung pemusatan pada ekologi lokal yang dapat menciptakan tidak saja praktik-praktik lingkungan yang sehat tetapi

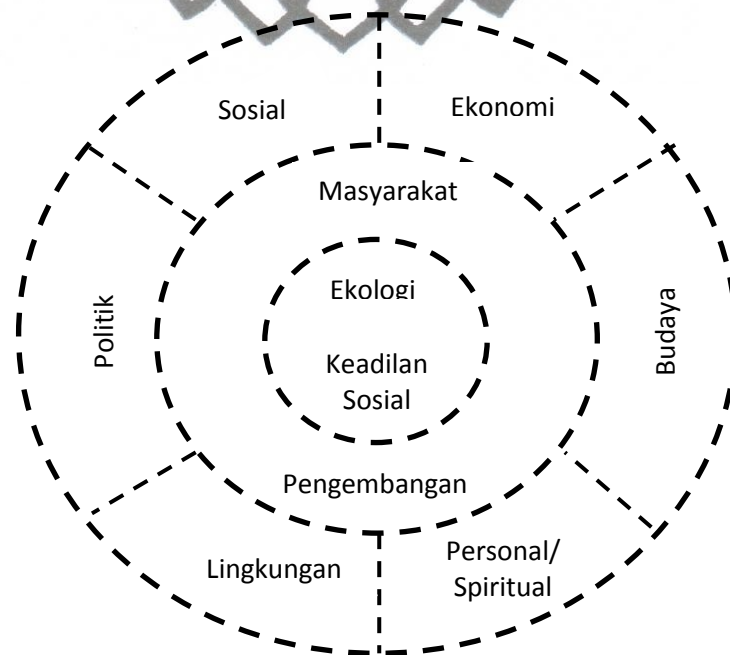
juga pola hidup, interaksi sosial dan aktivitas ekonomi yang sehat yang bercirikan lokal, mandiri dan berkelanjutan. Dari perspektif ini, ketertarikan awal terhadap lingkungan lokal dapat digunakan sebagai titik pangkal untuk pengembangan masyarakat yang lebih fundamental dan berbasis lebih luas. Pengembangan ini menggunakan prinsip-prinsip yang sama dalam peningkatan kesadaran seperti yang telah digunakan dalam gerakan kaum perempuan, dalam '*conscientisation*' Freire (Freire, 1972) dan dalam bekerja dengan orang-orang yang memiliki penghasilan rendah (Liffman, 1978), yang bermula dari perhatian orang-orang terhadap lingkungan. Perhatian ini dapat dikaitkan dengan isu-isu struktural dan politik yang lebih luas, dan dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh perspektif holistik.

Pengembangan lingkungan dapat juga dilihat sebagai gerakan menembus batas-batas masyarakat lokal. Hal ini menekankan bahwa kita hidup di satu dunia yang terbatas, dan bahwa setiap warga negara dan setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi ekosistem global. Hal ini tidak saja memberikan justifikasi, tetapi juga sebagai keharusan untuk bergerak melewati persoalan-persoalan yang murni lokal. Perhatian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca misalnya, memiliki dampak lokal yang kecil secara langsung, tetapi dari perspektif global sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keduanya merupakan perhatian yang tepat dan sangat diperlukan untuk masyarakat lokal. Sekarang terdapat level kesadaran yang memadai tentang pentingnya ekologi global, dan dapat menjadi fokus untuk mengelola tindakan lokal. Oleh karena itu, pengorganisasian untuk menjamin bahwa aktivitas-aktivitas komunitas memiliki dampak minimal terhadap lingkungan yang lebih luas (seperti lapisan ozon, rumah kaca) maupun terhadap lingkungan lokal menjadi bagian dari strategi pengembangan lingkungan masyarakat. (Ife dan Tesoriero, 2008: 473).

Perhatian terhadap lingkungan dalam dunia mayoritas sering terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang lebih mendesak seperti

kelangsungan hidup, air bersih, makanan yang sehat dan udara bersih (Shiva, 1989,1991). Di sinilah pengembangan lingkungan menjadi lebih penting dan strategi pengembangan masyarakat harus mencakup isu-isu lingkungan.

Isu-isu lingkungan ini meliputi peningkatan kesadaran, pendidikan, pengorganisasian masyarakat lokal dan menetapkan tujuan serta prioritas. Hasil yang ingin dicapai mencakup pembuatan cagar alam, penanaman pohon, konservasi tanah, membuat ekonomi lokal lebih mandiri, memperkenalkan pengendali polusi yang lebih ketat terhadap industri lokal, mengubah regulasi bangunan lokal dan membuat daur ulang (seperti industri baru atau pada basis koperasi). Seperti halnya aspek-aspek lain dalam pengembangan masyarakat, pengembangan lingkungan akan berhasil bilamana terdapat keterlibatan masyarakat yang nyata dan berbasis luas/tidak terbatas dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan arah tindakan yang tepat. Hal ini sangat penting berkaitan dengan pengembangan lingkungan, disebabkan oleh sifat teknis dari banyak problem-problem lingkungan, yang dapat menimbulkan sikap 'serahkan kepada para ahli' dan menolak perspektif pengembangan masyarakat.



Gambar 2.2 Pengembangan Masyarakat yang Terpadu

Sumber : Ife dan Tesoriero, 2008

Jika problem-problem lingkungan merupakan akibat dari tatanan sosial, ekonomi dan politik, problem ini bukan problem teknis. Oleh sebab itu, problem lingkungan merupakan persoalan untuk seluruh masyarakat. Tentunya masukan dari para ahli teknis dalam ilmu yang berkaitan dengan lingkungan sangat penting, tetapi solusi yang efektif harus berbasis-masyarakat bukan solusi teknis yang diharuskan oleh paradigma teknologi ilmiah.

Juga seperti halnya dengan bentuk-bentuk lain dalam pengembangan masyarakat, isu-isu kelas, gender dan ras/etnis sangat penting. Perspektif-perspektif yang ada sering tidak memperhatikan faktor-faktor ini, dan akibatnya yaitu aktivisme lingkungan yang hanya memperkuat wacana-wacana penindasan dan kerugian struktural yang ada. Oleh karena itu, feminisasi gerakan lingkungan menempatkan kesalahan yang tidak semestinya dan tanggung jawab kepada kaum perempuan, dan terdapat keluhan yang sering didengar bahwa lingkungan merupakan persoalan 'kelas menengah' disebabkan oleh cara memperlakukan lingkungan di media. Pengembangan lingkungan perlu mengatasi problem-problem dan stereotipe ini; faktanya bahwa isu-isu lingkungan perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat, serta isu-isu kelas, gender dan ras/etnis harus diatasi dalam program pengembangan apa pun. Oleh sebab itu, sangat penting ditekankan bahwa pengembangan lingkungan dan aktivisme lingkungan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari pengembangan masyarakat yang terpadu. (Ife dan Tesoriero, 2008: 474).

B. Program *Neighbourhood Development*

1. Riwayat Terbentuknya Program

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan serta penghidupan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Pelaksanaannya dilakukan secara holistik dan

terpadu pada tingkat kawasan/lingkungan permukiman melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan serta penataan prasarana lingkungan dan kualitas hunian. Ketiga bidang garapan tersebut merupakan kesatuan yang saling terkait dgn erat dan dikenal sebagai pendekatan TRIDAYA (yaitu keterpaduan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yg kita sebut sebagai pembangunan SEL) yang sebenarnya merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan secara nyata kebijakan pembangunan SEL yang mampu peningkatan kualitas lingkungan permukiman adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga kini. Sekarang disebut dengan PNPM Mandiri Perkotaan. Yang diarahkan untuk mendukung upaya: 1) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pencapaian sasaran MDGs; 3) Pengurangan Penduduk Miskin sebesar 50 % di tahun 2015.

Melalui P2KP, pada tahap pertama dilaksanakan pendampingan awal yang berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi dalam hal perubahan Sikap/ Prilaku/ Cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya pendampingan lanjut berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri, yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara Pemerintah, Masyarakat dan Kelompok peduli setempat serta kegiatan membangun kemitraan (*channelling program*) dengan berbagai pihak sebagai upaya untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, transformasi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani dilakukan melalui intervensi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan (*sustainable development*) di wilayahnya.

Untuk mencapai pembangunan permukiman yang berkelanjutan ditempuh tiga jalur sebagai berikut: 1) Orientasi pada perubahan perilaku (*attitude*); 2) Orientasi pada Pengelolaan oleh masyarakat sendiri (*self community management*); 3) Orientasi pada inovasi dan kreativitas masyarakat (*entrepreneurship*).

Dengan demikian, P2KP yang pada awalnya diperkenalkan melalui skema '*proyek*' diharapkan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah akan mampu dikembangkan menjadi skema '*program*' untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari menuju masyarakat yang sejahtera.

2. Dasar Pemikiran Program

Dalam Pedoman Pelaksanaan Neighbourhood Development. 2010 disebutkan bahwa pengembangan komunitas menuju tatanan masyarakat Madani merupakan upaya untuk membantu penghuninya bertanggungjawab membangun hubungan-hubungan dengan komunitas yang lebih luas dan bahkan lingkungan permukiman mereka yang harmonis.

Pengembangan komunitasnya diawali dengan memperkokoh perilaku masyarakat yang berbasis nilai-nilai universal serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial yang memperkuat tatanan komunitas dengan saling mempererat sesama anggota masyarakat, sehingga terwujud budaya warga yang tertib, bersih, sehat dan produktif. Di dalam perilaku masyarakat ini, masyarakat telah mampu menciptakan pengaturan ketertiban dan keamanan lingkungan serta pengaturan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Selanjutnya upaya pengembangan komunitas juga dilakukan dengan terus memperkokoh model kepemimpinan kolektif berbasis nilai (BKM) yang mampu mendorong UP-UP untuk terus mengembangkan kapasitasnya sehingga mampu menjadi pusat pelayanan masyarakat (*community service center*) di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial. Diharapkan dengan menjadi pusat pelayanan masyarakat tersebut dapat mencapai suatu kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mampu

untuk mengelola dan menyelenggarakan pembangunan sosial-ekonomi masyarakatnya serta mampu mengelola pembangunan lingkungan permukiman mereka secara mandiri, termasuk mampu mengakses berbagai sumberdaya yang mungkin didapat sehingga dinamika pembangunan di masyarakat dapat terus berlangsung.

Dalam lingkungan permukiman dengan tatanan masyarakat seperti ini (*community management*), akan membuka peluang tumbuh suburnya daya inovasi dan kreativitas masyarakat untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimilikinya menuju kehidupan yang harmonis, baik kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi maupun lingkungan permukiman yang sehat, produktif, berjatidiri dan berkelanjutan. (*Entrepreneurship*).

Terwujudnya masyarakat yang hidup secara harmonis dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai budaya lokal adalah cita-cita tentang peradaban masyarakat perkotaan kedepan.

Intervensi PLP-BK dalam konsep Transformasi sosial digambarkan dalam gambar 2.4.

3. Tujuan, Hasil Akhir dan Strategi Program

Secara umum dalam Pedoman Pelaksanaan *Neighbourhood Development*. 2010, *Neighbourhood Development* bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, produktif, berjatidiri dan berkelanjutan (lestari). Sedangkan secara khusus, tujuan kegiatan adalah: 1) Masyarakat yang sadar pentingnya tinggal di permukiman yang tertata selaras dgn lingkungan yg lebih luas dan tanggap bencana; 2) Masyarakat yang berbudaya sehat, bersih, dan tertib pembangunan; 3) Masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan, dan pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman mereka; 4) Tata kelembagaan kelurahan yang efektif dan efisien dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tingkat kelurahan.

Sedangkan Hasil akhir dari program ini adalah: 1) Rencana pengembangan permukiman (RPP) Kelurahan dan Rencana tata

bangunan dan lingkungan Kawasan Prioritas yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat bersama pemerintah; 2) Aturan tertulis tentang pembangunan/ pengelolaan permukiman dan tanggap bencana yang disepakati masyarakat bersama pemerintah sebagai komitmen bersama; 3) Lembaga pengelola pembangunan SEL (sosial, ekonomidanlingkungan) yang handal yang mampu berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat (*community services*) dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya; 4) Lingkungan permukiman yang sehat, tertib, selaras, berjati diri dan lestari yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak dgn berbagai sumberdaya.

Strategi pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut : 1) Menggunakan pembangunan lingkungan sebagai pintu masuk untuk pembangunan manusia seutuhnya; masyarakat yang secara sosial efektif dan secara ekonomi produktif yang pada gilirannya akan membangun masyarakat adil, maju dan sejahtera; 2) Penguatan BKM/LKM dan UP-UP sebagai pusat pelayanan masyarakat untuk mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dan mengelola pembangunan lingkungan di wilayahnya (*community management*); 3) Menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat (*entrepreneurship*) untuk berencana membangun tatanan kehidupan dan hunian warganya, berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada maupun mengakses sumber daya lainnya; 4) Reorientasi Peran Pemerintah dan Swasta menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Tahapan Program

Terdapat empat tahapan pelaksanaan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas baik di tingkat nasional maupun lokal atau kelurahan sebagai berikut di bawah ini.

a. Tahap Persiapan,

Inti kegiatan dalam tahap ini adalah penetapan lokasi sasaran dan sosialisasi program melalui berbagai media dengan penekanan

pada lokakarya orientasi program secara berjenjang dari tingkat nasional, propinsi dan daerah.

b. Tahap Perencanaan Partisipatif

Inti kegiatan pada tahap ini adalah membangun kolaborasi perencanaan, dimana antar berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha/swasta) dapat saling terbuka berbagi informasi, melakukan dialog dan konsultasi, dan bersepakat terhadap aturan bangunan setempat dan pokok-pokok perencanaan dan pembangunan. Para pemangku kepentingan tersebut kemudian berupaya menyusun berbagai pengaturan yang diperlukan, dan melembagakannya melalui organisasi masing-masing untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dasar pijakannya tetap konsisten pada pelembagaan nilai-nilai luhur (*value based development*), prinsip-prinsip pemerintahan yg baik (*good governance*), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Tahap ini akan dibagi menjadi empat kelompok kegiatan sebagai berikut : 1) Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; 2) Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif; 3) Perencanaan Lingkungan Makro yg termasuk penyusunan aturan bangunan setempat sebagai dasar perencanaan pengembangan permukiman kelurahan dan penataan bangunan serta lingkungan kawasan prioritas berbasis komunitas; 4) Perencanaan Lingkungan Mikro (RTBL)

c. Tahap Pemasaran Kawasan Prioritas

Inti kegiatan pada tahap ini adalah melakukan proses pemasaran kawasan yang akan ditata kembali dan telah tersedia RTBL-nya (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) kepada berbagai pihak seperti antara lain dinas/ instansi pemerintah (sumber dana APBN/ APBD) maupun lembaga/ instansi non pemerintah seperti lembaga bisnis, sosial baik ditingkat nasional maupun multi nasional

commit to user

sehingga terjadi kerjasama yg saling menguntungkan atau kontribusi sepihak seperti “*chanelling*” dari dinas/ sektor lain.

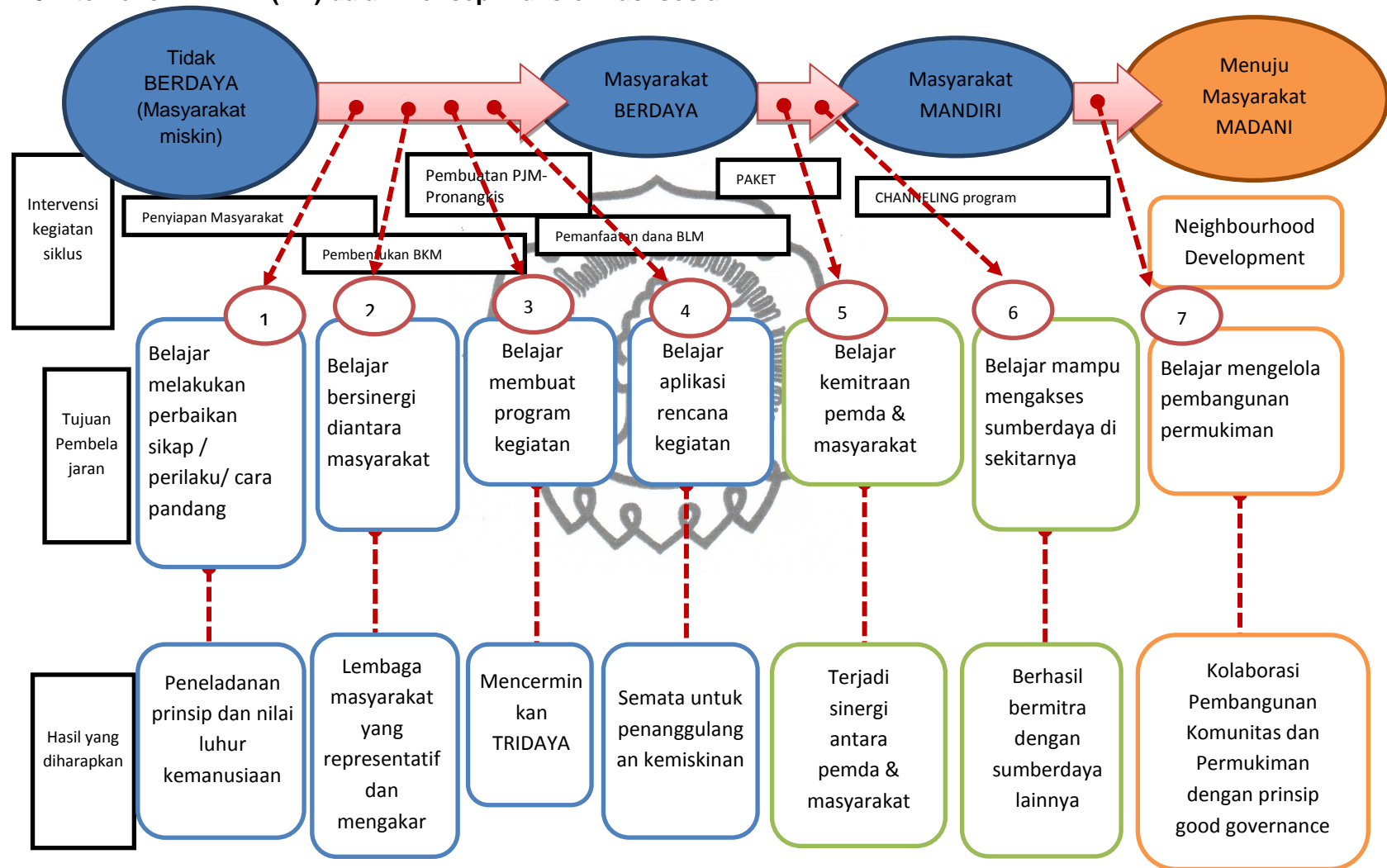
Untuk membantu masyarakat melakukan hal tersebut diatas bila diperlukan dapat merekrut tenaga ahli pemasaran untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemasaran kawasan tersebut termasuk menyiapkan dokumen rencana kerja pemasaran sebagai persyaratan untuk mencairkan BLM ke-2. Pada tahap ini juga akan dilakukan pelaksanaan pembangunan fisik untuk mencoba dan memantapkan manajemen pembangunan oleh komunitas

d. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Inti kegiatan pada tahap ini adalah proses pelaksanaan pembangunan fisik hasil perencanaan mikro (RTBL) sebagai bentuk penyelesaian permasalahan serta penggalan potensi yang dimiliki kelurahan. Proses ini pun dilakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan konstruksi.

Untuk mewujudkan hal itu, tahap pelaksanaan kegiatan fisik di kelurahan akan dilakukan dalam dua tahapan sesuai dgn ketersediaan BLM yaitu BLM-3 dan BLM-4. Kedua tahapan ini akan melalui kegiatan-kegiatan yang serupa namun berbeda dalam waktu pelaksanaan.

Gambar 2.3 Intervensi PLP-BK (ND) dalam konsep Transformasi sosial



Sumber : Pedoman Pelaksanaan ND

C. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Dalam Roesmidi (2006) dijelaskan, bahwa masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau *community* dalam bahasa Inggris, atau juga *komunitas*. Secara etimologis "*community*" berasal dari *communital* yang berakar pada *comunete* atau *common*.

Community mempunyai dua arti (Talizi, 1990 - 49):

- 1) Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama.
- 2) Sebagai satuan pemukiman yang terkecil, di atasnya ada kota kecil (*town*), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (*city*).

Pendapat lain mengatakan bahwa komunitas diidentikkan sebagai permukiman kecil penduduk, bersifat mandiri (*self contained*) dan yang satu berbeda dengan lainnya:

- 1) Komunitas memiliki kesadaran kelompok (*group consciousness*) yang kuat.
- 2) Komunitas tidak terlalu besar sehingga dapat saling mengenal secara pribadi tetapi tidak terlalu kecil sehingga dapat berusaha bersama secara efisien.
- 3) Komunitas bersifat homogen.
- 4) Komunitas hidup mandiri (*self sufficient*).

Dalam Kusumastuti (2004) disebutkan, bahwa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memahami definisi tentang masyarakat atau komunitas perlu diketahui tiga kriteria utama, yakni:

- 1) Konsep komunitas memiliki komponen-komponen fisik yang menggambarkan adanya kelompok manusia yang hidup di suatu daerah tertentu dan saling mengadakan interaksi. Interaksi di antara komunitas disebabkan oleh adanya saling ketergantungan ekonomis hubungan sosial, atau eksistensi beberapa bentuk organisasi politik, serta faktor-faktor tersebut.

commit to user

- 2) Anggota komunitas pada umumnya memiliki beberapa ciri khas yang sama yang menyebabkan timbulnya identifikasi mereka sebagai sebuah kelompok seperti bahasa, kesukuan atau daerah asal, agama, kultur, serta pola dan sikap hidup sebagai faktor-faktor yang sangat bernilai.
- 3) Sebuah komunitas seharusnya memiliki suatu keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi.

Menurut kamus besar Indonesia, istilah “masyarakat” adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.

Dalam Kusumastuti (2004) dijelaskan, bahwa konsep komunitas dalam kaitannya dengan pola perencanaan partisipatif di Indonesia adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan pola interaksi intensif diantara mereka (setingkat RT, RW, dusun/lingkungan desa dan desa kelurahan). Namun pola perencanaan partisipatif, bukan saja mengelompokkan masyarakat dalam pola bidang teritorial atau wilayah tempat tinggal, tetapi juga didasarkan pada bidang usaha atau profesi tertentu seperti kelompok petani, kelompok nelayan, atau kelompok pengrajin yang mendiami suatu wilayah setingkat RT, RW, dusun/lingkungan dan desa kelurahan.

Dalam Program *Neighbourhood Development* sendiri dalam (Pedoman Pelaksanaan *Neighbourhood Development*, 2010). disebutkan bahwa indikator hasil dari program adalah minimal 40% tingkat kehadiran kaum rentan dan kaum perempuan dalam pertemuan-pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta minimal 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM di tingkat RT/ komunitas basis (pelibatan tokoh masyarakat). Dari indikator hasil tersebut dapat diperoleh tiga kelompok masyarakat dalam program *Neighbourhood Development*, kelompok tersebut adalah :

- 1) Kaum rentan
 - Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No.39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah

orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat

- Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian rentan sebagai : (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi

2) Tokoh Masyarakat

Menurut kamus besar Indonesia, tokoh adalah orang yang terkemuka atau kenamaan. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama. Sehingga tokoh masyarakat dapat diartikan sebagai orang yang terkemuka atau kenamaan pada sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama

3) Kaum Perempuan

Menurut kamus besar Indonesia perempuan adalah (1) orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; (2) istri; bini.

b. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai peran aktif dalam mempengaruhi proses pembangunan serta secara bersama-sama mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan (*United Nations*, 1981 dalam Margiati 2008:25). Partisipasi diartikan pula sebagai penyerahan sebagian peran dalam kegiatan-kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari suatu pihak pada pihak lain (Ramos dalam Margiati 2008:25). Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mengandung makna adanya keterlibatan aktif serta pembagian peran dan tanggung jawab diantara pelaku (Yeung and Mc Gee, 1986 dalam Margiati 2008:25).

Partisipasi mengandung arti pula keterlibatan sebagian masyarakat secara aktif dan bermakna pada dua tingkat yang berbeda yaitu proses

pengambilan keputusan dalam penetapan tujuan dan alokasi sumber daya serta proses penetapan program dan proyek (United Nations, dalam Cheema, 1987:80). Dapat dikatakan bahwa penilaian partisipasi ditentukan dua hal penting yakni pelibatan sebagian besar masyarakat serta pemberian kesempatan dalam pengambilan keputusan (Cheema, 1987).

Menurut Paul, dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat berarti “suatu proses yang aktif dimana para pemanfaat mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daripada hanya menerima suatu bagian dari manfaat proyek”. Definisi ini mengemukakan dua hal pokok, yaitu proses yang aktif dan pemanfaat mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Dalam partisipasi masyarakat terdapat proses yang berlangsung secara aktif, dimana masyarakat turut serta mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek, sehingga bukan hanya terbatas pada menyumbang waktu, tenaga dan dana (Paul, 1986 dalam Kusumastuti, 2004).

Pendekatan yang berbasis pada masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada tahap evaluasi. Perspektif pembangunan yang perlu dikembangkan, masyarakat dibangun bukan karena mereka bodoh dan tidak mampu, tetapi kemampuan yang tersedia perlu dioptimalkan agar mereka berkembang sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri.

Dalam mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat ini, maka pemberdayaan terhadap masyarakat baik secara politis, sosial, ekonomi memang menjadi sesuatu hal yang mutlak dilakukan.

Selain itu, persoalan keterbatasan dana, minimnya sumber daya manusia yang paham mengenai apa dan bagaimana pendekatan partisipatif, menjadi beberapa hal yang selama ini menghambat implementasi pendekatan ini. Namun, berbagai kendala ini dapat diatasi ketika para birokrat, perencana dan pelaksana pembangunan memiliki

commit to user

pemahaman yang sama mengenai urgensi pendekatan partisipatif (termasuk di dalamnya pemberdayaan) dalam pembangunan.

Perubahan mental bagi para birokrat diperlukan. Para birokrat bukan lagi orang pandai yang harus dilayani oleh masyarakat, akan tetapi hanya mengatur kepentingan masyarakat dan melakukan fungsi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi kebijakan menuju pembangunan yang berpusat pada manusia sepantasnya menjadi *common platform* bagi para birokrat, perencana dan pelaksana program pembangunan. Pembangunan ini memiliki arti mempersiapkan manusia untuk ikut aktif dalam proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*). Hal ini berarti pembangunan yang diciptakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri (Suparjan dan Suyatno, 2003).

2. Tujuan dan Strategi Partisipasi Masyarakat

Tujuan partisipasi masyarakat (Paul, 1986 dalam Kusumastuti, 2004) adalah:

a. Pemberdayaan

Dengan adanya partisipasi, masyarakat menjadi berdaya dalam arti meningkatnya posisi mereka, yang mulanya hanya sekedar sebagai pihak yang menerima manfaat, menjadi pihak yang berperan serta dalam proses pembangunan.

b. Pengembangan Kapasitas Pemanfaatan

Masyarakat adalah pemanfaat (beneficiary) hasil pembangunan. Bila masyarakat terpisah dari pembangunan, maka keadaan mereka tetap saja tidak berubah. Secara tidak langsung masyarakat dapat belajar mengenai berbagai hal baru yang datang bersamaan dengan pembangunan. Bagi masyarakat hal tersebut merupakan peningkatan kapasitas/ *capacity building*.

c. Meningkatkan Keefektifan Program

Pembangunan dinilai efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dinyatakan sebelumnya. Selama ini banyak pembangunan yang sia-sia karena setelah selesai ternyata tidak

sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini terutama apabila pembangunan tidak disertai dengan partisipasi penuh.

d. Memperbaiki Keefisienan Program

Keikutsertaan masyarakat dalam suatu pembangunan, membuka peluang yang luas bagi mereka untuk ambil bagian dalam pembangunan. Dengan demikian banyak hal yang bisa dilakukan untuk lebih mengefisienkan pembangunan, seperti tenaga, bahan bangunan ataupun sumbangan masyarakat.

e. Pembangunan Ongkos Program

Bila keadaan masyarakat memang memungkinkan, maka selain menyumbangkan tenaga dan bahan, mereka dapat ikut ambil bagian dalam menanggung biaya suatu program pembangunan.

Dalam Kusumastuti (2004) disebutkan, bahwa sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dengan demikian partisipasi adalah alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif, seperti keadilan sosial, persamaan dan demokrasi. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek, sebagai alat dalam melaksanakan kebijakankebijakan.

3. Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan/ implementasi program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita, 2006:38).

Pemahaman partisipasi masyarakat dalam pembangunan, adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat sebagai subyek yang terlibat aktif dalam menentukan kebijakan dan sebagai

commit to user

kelompok sasaran yang menerima manfaat dari pelaksanaan pembangunan.

Telah kita ketahui bahwa dana anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program dalam masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Efektivitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target yang direncanakan. Jika rasio tersebut lebih besar dari satu, berarti efektif dan sebaliknya jika rasio tersebut lebih kecil dari satu, berarti tidak efektif. Sedangkan efisiensi dimaksudkan, yaitu dapat dilakukan penghematan atau penekanan pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan ke bawah. Efisiensi adalah suatu keadaan dimana terdapat penghematan dan sebaliknya jika terdapat pemborosan berarti inefisiensi.

Pembangunan partisipatif dilakukan menyangkut: tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan, analisis-analisis apa yang harus dikerjakan, penyusunan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan implementasi dari program pembangunan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan adalah: sosialisasi, pendampingan, pelatihan, penguatan kelembagaan, dan implementasi program pembangunan.

commit to user

Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumberdana keuangan dan manajemen keuangan yang memadai, tetapi banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan diterima oleh masyarakat (*capable and acceptable local leadership*) yang mampu mensinergikan tradisi sosial budaya dengan proses manajemen modern.

Perencanaan partisipatif masih merupakan paradigma yang relevan. Perencanaan secara partisipatif diperlukan karena memberi manfaat sekurang-kurangnya, yakni:

- Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang/sector-sector yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui arah pembangunan masa depan mereka.
- Anggota masyarakat dapat berperan serta untuk perencanaan masa depan masyarakatnya, tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar.
- Masyarakat dapat menghimpun sumberdaya dan sumberdana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/ program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan/ implementasi program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

commit to user

4. Bentuk dan Ukuran Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi asli dan semu. Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan keterlibatan masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, kebersamaan dalam penetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan implementasi. Bila keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, penetapan keputusan oleh pihak luar, atau kebijakan intern ditentukan oleh pemerintah, maka partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu (ECOSOC, 1992 dalam Margiati 2008:35), selain itu ciri partisipasi asli adalah tumbuh dari bawah (*grass-roots*), berfokus pada pendistribusian kue pembangunan secara merata, berfungsi untuk mempertinggi kesadaran terhadap kemampuan sendiri, dan percaya bahwa partisipan dapat mempengaruhi hasil (United Nation Research Institute of Social Development, 1980 dalam Margiati 2008:35). Sedang berdasarkan motivasinya, partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi paksaan, ajakan, dan partisipasi spontan (PBB, 1981 dalam Djatmiko Eko Wibowo, 2000).

Partisipasi asli dan spontan merupakan model yang paling ideal. Dalam partisipasi asli, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditempuh sebagai bagian dari upaya untuk menyadarkan kemampuan masyarakat serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka. Partisipasi spontan ditandai dengan oleh kerelaan dan keleluasaan bertindak sebagai bagian menghadapi permasalahan tanpa bantuan dari luar. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pada masyarakat yang cenderung pasif dalam pembangunan, sangat sulit diharapkan masyarakat menjadi aktif tanpa didukung atau dirangsang dengan cara-cara tertentu oleh pihak lain. Oleh karena itu, pada tahap awal kegiatan pendampingan, perlu diterapkan motivasi untuk melakukan kegiatan secara spontan.

Partisipasi masyarakat terdiri atas lima bentuk yaitu pikiran, ketrampilan/keahlian, tenaga, harta benda, dan uang (Keith Davis, dalam

Margiati 2008:36). Sejalan dengan itu Surbakti mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang digolongkan sebagai partisipasi adalah ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang dianggap paling baik, melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk memberi iuran dan sumbangan materil, mengawasi pelaksanaan keputusan, mengajukan saran dan kritik untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusan. (Surbakti, 1984 dalam Margiati 2008:36)

Bentuk-bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas dapat dikelompokkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Pada tahap perencanaan, partisipasi diwujudkan dalam bentuk mengikuti rapat, mengajukan usul, menyepakati dan mengambil keputusan kepada warga masyarakat lain. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi diwujudkan dalam bentuk pelibatan sebagai tenaga kerja baik sebagai mandor maupun buruh bangunan, mengawasi pekerjaan termasuk memberikan kritik untuk meluruskan pekerjaan, serta memberikan bantuan lain (uang, makanan/minuman, peralatan dan lahan). Sedangkan pada tahap pengelolaan, partisipasi diwujudkan dalam mengikuti kegiatan serta memberi iuran pemeliharaan prasarana.

Partisipasi masyarakat dapat diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, partisipasi diukur dari perbedaan tingkat intensitas (tipologi) keterlibatan masyarakat (Whyte, dalam Bourne 1984:222). Tipologi-tipologi tersebut adalah sebagian atau seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam konsultasi penetapan proyek, memberikan sumbangan financial, pelaksanaan swadaya masyarakat yang melibatkan semua anggota masyarakat, pelibatan anggota masyarakat yang terlatih dalam tugas pengelolaan prasarana, kerja kolektif (terutama tenaga kerja manual), komitmen bersama dalam pengambilan keputusan, munculnya gagasan dan tindakan perubahan dalam masyarakat, bangkitnya proyek swadaya.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyerahan tanggung jawab, dapat dibedakan menjadi tidak ada sama sekali, tidak langsung, konsultatif, berbagi dan memegang kendali

sepenuhnya (Hamid, 1997 dalam Margiati 2008:37). Tingkat partisipasi dimana masyarakat memegang kendali merupakan tujuan ideal.

Partisipasi masyarakat dapat diukur dengan menggunakan skala dan jumlah kegiatan yang dapat diambil alih dan tipologi yang menunjukkan intensitas dan kualitas keterlibatan (Whyte, dalam Bourne, 1984:222-232). Kualitas keterlibatan ditunjukkan oleh manfaat kegiatan yang diambil alih dalam kerangka kegiatan keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian partisipasi yang mengandung makna pengambilalihan sebagian kegiatan. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak skala dan jumlah kegiatan yang diambil alih, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Semakin tinggi intensitas keterlibatan dan kualitas kegiatan, semakin tinggi pula partisipasi. Dalam lingkup wilayah, semakin banyak individu berpartisipasi, maka semakin tinggi pula partisipasi dalam wilayah tersebut.

5. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah (Arnstein 1969:217 dalam Kusumastuti, 2004), yaitu:

- 1) Kontrol masyarakat (*Citizen Control*),
dalam tingkat ini control masyarakat terjadi dalam segala aspek, misalnya control terhadap sekolah, ataupun terhadap lingkungan.
- 2) Pelimpahan kekuasaan (*Delegated Power*),
negosiasi antara penduduk dan pemerintah diperoleh melalui pembuatan keputusan dominant yang berada di tangan masyarakat dengan mendelegasikan pendapatnya melalui wakil dalam parlemen.
- 3) Kemitraan (*Partnership*),
adanya kesepakatan untuk berbagai perencanaan dan tanggung jawab pembuatan keputusan melalui struktur kerjasama kebijaksanaan, komite perencanaan dan mekanisme yang memecahkan persoalan.

- 4) Penenteraman (*Placation*),
masyarakat mulai memiliki tingkat pengaruh melalui tokenism jelas terlihat, tapi pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut tergantung pelaksanaan dari prioritas yang ditetapkan golongan elit.
- 5) Konsultasi (*Consultation*),
masyarakat diberi kesempatan dalam memberikan opini mereka, tapi tidak dikombinasikan dengan kepastian bahwa perhatian dan ide mereka akan diperhitungkan.
- 6) Informasi (*Information*),
penekanan bentuk partisipasi dalam pemberian informasi satu arah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, tanpa disediakan umpan balik dan kekuatan untuk negosiasi. Seringkali informasi disampaikan terlambat dibanding perencanaannya.
- 7) Terapi (*Therapy*),
bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menggalang masyarakat dalam kegiatan yang intensif, tapi fokusnya bukan untuk mengobati mereka dari penyakit yang dihadapi, tetapi lebih merupakan tindakan yang rasial dan penipuan yang menciptakan penyakit tersebut.
- 8) Manipulasi (*Manipulation*),
partisipasi terjadi dimana kelompok social elit yang minoritas menjadi pelaksana dan penentu pelaksanaan komite/organisasi. Tujuan utama sebenarnya bukan untuk memberikan kesempatan masyarakat yang kurang mampu untuk mempunyai suara, tetapi digunakan untuk kepentingan minoritas tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan teori tangga partisipatori yang ditulis oleh Arnstein sebagai tangga jenjang peran serta/tangga partisipatif (*a ladder of citizen participation*) yang ditunjukkan melalui tingkatan partisipatif sebagai berikut:

commit to user



Sumber : Arnstein

Gambar 2.4 Tangga Partisipatif oleh Arnstein

Kategori :

- *Nonparticipation*
Dua klasifikasi terendah (8 dan 7) dikatakan sebagai bukan peran serta, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan.
- *Tokenism*
Tiga klasifikasi berikutnya (6, 5 dan 4) menurut Arnstein adalah masuk ke dalam derajat 'penghargaan' dan 'mengalah', yaitu saat masyarakat sudah diajak bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
- *Citizen Power*
Tiga klasifikasi teratas (3, 2 dan 1) adalah apa yang sebenarnya ada dalam gagasan Arnstein tentang peran serta masyarakat itu sendiri, yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi peran serta masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai mengambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri.

6. Konsep Evaluasi Partisipasi

Evaluasi dapat diartikan sebagai prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhan, nilai atau kesempatan-kesempatan yang merupakan "masalah" (Dunn, 2000).

a. Evaluasi Partisipasi

Untuk mengukur/ mengevaluasi kinerja partisipasi dalam pembangunan, maka perlu diketahui siapa saja yang terlibat dalam partisipasi, dalam tataran apa dan dengan cara bagaimana. *Cohen* menyebutkannya sebagai pengungkapan dari siapa yang berpartisipasi, dalam kegiatan apa saja, dan bagaimana partisipasi itu dilakukan (*Cohen & Uphoff, 1977* dalam Kusumastuti, 2004).

Pengukuran kinerja partisipasi adalah mengukur seberapa jauh hal-hal yang sudah ditetapkan dalam program tersebut dapat dilaksanakan. Efek dari partisipasi yang dilihat adalah pada skala lokal, tempat dimana program tersebut dilaksanakan.

1) Tataran Partisipasi

Partisipasi dapat dilakukan dalam 4 (empat) tataran, yaitu: (1) ide/gagasan, (2) pengambilan keputusan, (3) implementasi/ pelaksanaan dan (4) evaluasi. Pemeliharaan hasil program/ pasca konstruksi umumnya sudah di luar tugas/ kewajiban dari program yang bersangkutan. Dalam pembangunan partisipatif, kegiatan pasca konstruksi seperti pengoperasian dan pemeliharaan produk dari program dilakukan oleh masyarakat yang menjadi subjek pembangunan.

Dalam program pembangunan pemerintah, perencanaan/ perancangan program berlangsung di lingkungan lembaga pemerintah yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat baru akan berlangsung di tingkat implementasi, dan pasca konstruksi. Partisipasi dalam implementasi memberikan kemungkinan adanya otorisasi, penentuan/ pengalokasian sumberdaya, pengorganisasian dan perancangan aktivitas. Evaluasi biasa dilakukan oleh 'pejabat pemerintah' atau orang yang ditunjuk berkaitan dengan efisiensi program pembangunan. Masyarakat

yang terkena perlu juga ikut menilai kegiatan pembangunan yang mempengaruhi hidupnya, karena dapat menggambarkan manfaat apa yang diperoleh.

2) Partisipan

Partisipan pembangunan secara umum disebutkan sebagai stakeholders pembangunan. Istilah *stakeholders* sendiri diartikan sebagai semua pihak yang terlibat dan atau terkena pengaruh pembangunan, baik penerima manfaat atau penerima resiko atau terkena pengaruh oleh adanya perubahan karena adanya program pembangunan dilakukan. Secara umum dapat dibedakan empat kelompok *stakeholders* menurut latar belakang dari tanggung jawabnya dalam pembangunan, yaitu: (1) penghuni setempat/ *local residents* yang ditetapkan suatu program sebagai 'calon' penerima manfaat/subjek dari pembangunan; (2) pemimpin/ tokoh setempat; (3) personil pemerintah, misalnya staf proyek, yang dibedakan atas pejabat pusat dan daerah; (4) personel luar, misalnya konsultan pendamping. Evaluasi harus dapat mengungkapkan siapa yang berpartisipasi, sehingga fungsi dari program yang dilaksanakan dapat berjalan dan siapa yang terlibat dalam pendistribusian manfaat dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

3) Cara Partisipasi

Untuk menganalisis bagaimana partisipasi berlangsung, variabel yang harus diperhatikan (*Cohen & Uphoff, 1977* dalam Kusumastuti, 2004) adalah: (1) dorongan untuk berpartisipasi; (2) pancingan apa yang dilakukan (kerelaan, paksaan atau diantara kedua hal tersebut); (3) struktur/ pola organisasi; (4) waktu berpartisipasi (sekali untuk semua, berselang-selang/ *intermitten*, atau menerus/ bersinambungan); (5) Lingkup partisipasi; (6) pemberdayaan (*power* efektif yang menyertai partisipasi: seberapa jauh efektivitas peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi, dan lain-lain).

4) Lingkup dan Intensitas Partisipasi

Dalam Kusumastuti (2004) dijelaskan, bahwa seberapa banyak waktu yang dihabiskan oleh seorang partisipan dalam kegiatan pembangunan,

dapat berbedabeda satu dengan lainnya. Demikian pula jumlah dan jenis kegiatan partisipan dapat berbeda-beda. Inipun dapat mempengaruhi sejauh mana partisipasi dimungkinkan terjadi dalam suatu program pembangunan. Intensitas partisipasi dibedakan pula menurut jumlah dan jenis kegiatan yang diikuti.

5) Bentuk Partisipasi

Dalam Kusumastuti (2004) juga dijelaskan, bahwa bentuk partisipasi dibedakan menurut struktur partisipasi atau pola organisasi dan saluran yang digunakan. Pola organisasi dibedakan atas individu atau kolektif melalui organisasi. Organisasi sendiri dapat dibedakan atas organisasi *formal* dan *nonformal*. Sedangkan saluran dibedakan atas langsung atau tidak langsung (melalui perwakilan). Dengan demikian bentuk partisipasi dapat dibedakan atas 5 (lima) bentuk partisipasi, yaitu: (1) langsung, individu; (2) langsung, organisasi formal; (3) langsung, organisasi non formal; (4) tak langsung, organisasi formal, (5) tak langsung, organisasi non formal.

6) Efektivitas Partisipasi

Seorang partisipan mungkin sekali secara sukarela dan dengan intensitas tinggi mengikuti kegiatan program pembangunan, tetapi dia tidak turut mempengaruhi keputusan. Dengan kata lain partisipasinya kurang efektif. Seberapa jauh pendapat/ aspirasi/ kehendak masyarakat diakomodasi atau didengar oleh pemerintah tidak semata-mata kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi, tapi juga seberapa jauh pemerintah mau mendengar dan memutuskan bahwa kehendak masyarakatlah yang diambil sebagai keputusan. Dalam Kusumastuti (2004) dijelaskan, bahwa partisipan mungkin saja tidak meningkatkan kemampuannya secara individu, tetapi 'iklim' pengambilan keputusan yang diciptakan sedemikian rupa sehingga partisipan mempunyai kesempatan cukup untuk didengar dan diikuti kehendaknya.

b. Tataran Evaluasi Partisipasi Masyarakat

1) Tataran Ide

Dalam Kusumastuti (2004) disebutkan, bahwa gagasan tentang keberadaan program pembangunan, tujuan maupun rancangannya, umumnya diberikan atau ditetapkan oleh pengambil keputusan lembaga pemerintah penyelenggara dari program pembangunan yang bersangkutan. Namun demikian rencana dan rancangan program pembangunan tersebut merupakan suatu informasi yang harus disebarluaskan atau dengan istilah umum adalah sosialisasi/ penyuluhan. Dalam program pembangunan itu sendiri mungkin sudah menetapkan rencana sosialisasi/ penyuluhan yang akan dilakukan. Siapa yang seharusnya mengikuti sosialisasi/ penyuluhan, umumnya juga sudah ditetapkan, yaitu penerima manfaat dari kegiatan program pembangunan tersebut. Tujuan penyebaran informasi tentunya adalah agar semua *stakeholders* pembangunan memahami apa dan bagaimana kegiatan program tersebut, termasuk siapa dan bagaimana *stakeholders* dapat berpartisipasi. Sebagai suatu indikasi keberhasilan sosialisasi/ penyuluhan adalah, bahwa masyarakat yang akan menjadi subjek pembangunan memahami rencana dan rancangan program pembangunan tersebut. Indikator keberhasilan ini akan dapat terungkap bilamana ada evaluasi tentang kegiatan sosialisasi/ penyuluhan dan penyuluh mengecek bagaimana mereka memahami informasi yang diberikan dalam sosialisasi/ penyuluhan. Pengukuran pemahaman dilakukan menurut "pengakuan" dari partisipan yang bersangkutan. Jadi tidak bersifat suatu test/ pengujian tentang penguasaan informasi pembangunan. Di tingkat implementasi ada kemungkinan *stakeholders* mempunyai peluang untuk menyampaikan gagasan tentang rencana dan rancangan dari kegiatan program tersebut.

2) Tataran Pengambilan Keputusan

Dalam Kusumastuti (2004) dijelaskan, bahwa proses pengambilan keputusan terjadi dalam setiap tataran dan siklus program pembangunan, mencakup keputusan perencanaan dan perancangan program tersebut. Yang akan dievaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang akan

dilakukan dengan partisipasi *stakeholders* pembangunan. Pengambilan keputusan umumnya merupakan suatu kegiatan yang sifatnya kompleks dan menyangkut berbagai aspek kegiatan program. Data tentang ini khususnya yang diisi oleh staf dari program pembangunan sendiri bersifat kuantitatif yang akan berguna untuk perbandingan. Data kuantitatif pada umumnya akan lebih mudah diperoleh bilamana ada catatan yang lengkap tentang berbagai kegiatan yang menyangkut keputusan, atau bilamana kegiatan evaluasi dilakukan setelah kegiatan berlangsung dan didokumentasikan. Namun demikian masih mungkin terdapat informasi yang sifatnya kualitatif. Bilamana tidak ada catatan kegiatan, kemungkinan besar informasi dapat bersifat kualitatif. Bagaimanapun informasi itu tetap penting untuk evaluasi, karena menjadi bagian yang dilaporkan atau dicatat.

Evaluasi pada tataran pengambilan keputusan meliputi evaluasi yang menyangkut substansi dan pengoperasian pengambilan keputusan. Substansi keputusan umumnya menyangkut penentuan tentang tiga hal, yaitu:

- Tempat/ lokasi, misalnya hidran umum atau jalan lingkungan
- Cara, misalnya aturan menyangkut pembiayaan, pengangkatan staf ataupun standar dan pelaksanaan ketentuan program
- Siapa partisipan pengambilan keputusan dan bagaimana cara menentukan partisipan.

Evaluasi mengenai pengoperasian tataran pengambilan keputusan menyangkut pengungkapan tentang bagaimana dilaksanakannya mengenai:

- Keanggotaan organisasi, yang meliputi siapa yang mewakili, persyaratan dan lamanya keanggotaan, serta ara pemilihan pimpinan.
- Pertemuan, yang meliputi frekuensi, tempat dan partisipan.
- Kendali atas personil, yang meliputi peluang bagi *stakeholders* untuk ikut menentukan penolakan, penerimaan dan penempatan staf.

commit to user

- Kontak dan lobbying, yang meliputi siapa yang mempunyai akses untuk melakukan kontak dengan pejabat yang mempunyai kewenangan atas aktivitas dan alokasi setempat; apakah pihak yang bersangkutan mempunyai legitimasi sebagai wakil sejumlah individu, kelompok/ organisasi atau masyarakat lokal; bagaimana kegiatan program berkaitan dengan kinerja program dan siapa dari kelompok/ organisasi atau kalangan masyarakat yang mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan ini.

3) Tataran Implementasi

Dalam evaluasi pada tataran implementasi, juga menjelaskan siapa dan bagaimana mereka berpartisipasi. Meskipun dalam implementasi terdapat kegiatan penyampaian gagasan dan pengambilan keputusan, akan tetapi kegiatan yang dilihat dalam implementasi adalah berkaitan dengan (Cohen dan Uphoff dalam Kusumastuti, 2004):

a) Kontribusi Sumberdaya

Perlu diungkapkan siapa yang memberikan sumbangan dan dengan cara bagaimana. Yang dimaksud dengan sumberdaya ini, meliputi tenaga kerja, *input* bersifat material (misalnya tanah, bahan bangunan) dan informasi. Data yang perlu diungkap bersifat kuantitatif; siapa yang menjadi penyumbang atau yang menyediakan, berapa banyak dan berapa lama, dalam/ untuk kegiatan apa saja. Upah tenaga kerja juga perlu dicatat bilamana ada, apakah merupakan upah penuh atau menurut ketentuan lain, atau berbentuk pengeluaran lain untuk tenaga kerja (misalnya penggantian uang makan siang dan transport).

b) Administrasi dan Koordinasi

Dalam kegiatan program mungkin mengangkat orang setempat menjadi pegawai atau peran khusus lain untuk menjalankan kegiatan program yang bersifat administratif/ koordinatif atau pengelolaan kegiatan program. Ini tidak perlu berkaitan langsung sebagai bagian organisasi program pembangunan secara struktural, mungkin dalam bentuk semacam "panitia" setempat yang

ikut mengelola aliran informasi, penyaluran bahan dan lain sebagainya.

c) Penyesuaian Dalam (rencana/ rancangan) Program

Stakeholders mungkin memberikan respons terhadap apa yang akan dibangun atau dilakukan dalam program pembangunan. Evaluasi kegiatan penyesuaian dalam tataran implementasi ini tidak merupakan ulangan dari evaluasi dalam tataran pengambilan keputusan. Yang akan diungkapkan dalam evaluasi ini adalah siapa dan bagaimana seseorang merespon kegiatan program, apakah secara langsung mendaftarkan dirinya sendiri atau didaftarkan oleh orang lain. *Stakeholders* ini belum tahu orang atau pihak yang akan mendapat manfaat dari hasil program tersebut. Evaluasi tentang siapa yang akan mendapat manfaat merupakan bagian dari evaluasi terhadap tataran evaluasi.

4) Tataran Evaluasi

Dalam tataran evaluasi perlu diperhatikan bahwa pengertian masyarakat setempat/ *stakeholders* tentang partisipasi mungkin berbeda dengan orang luar atau staf dari program pembangunan. Mereka mungkin mempunyai persepsi, dan harapan sendiri tentang partisipasi dan program, yang berbeda dengan penyandang dana, staf dari program pembangunan atau evaluator dari luar. Meskipun kajian tentang ini penting, namun dalam evaluasi perbedaan itu diasumsikan tidak ada. Untuk mengetahui perbedaan itu, merupakan penelitian tersendiri. Selain itu juga perlu dicatat, bahwa secara spontan orang cenderung mengevaluasi secara negatif, berupa keluhan-keluhan. Hal-hal yang bersifat keberhasilan/positif umumnya kurang diungkapkan. Evaluasi ini mengungkapkan:

- Siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan.
- Melalui kegiatan apa dan bagaimana evaluasi dilakukan.

commit to user

c. Menentukan Indikator Yang Berhubungan Dengan Penelitian

Indikator merupakan karakteristik yang dapat diamati secara langsung untuk menggantikan karakteristik yang tidak dapat diamati secara langsung dan digunakan sebagai definisi operasional dari variabel (Dunn, 2000). Indikator digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu program/kegiatan. Berdasarkan pemikiran tersebut dan berbagai pemahaman mendasar tentang partisipatif, indikator penilaian dalam evaluasi partisipatif digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Penetapan Indikator dalam Tahapan Perencanaan

Kriteria/ Tataran	Indikator	sub-indikator
Ide	Partisipan memahami rencana dan rancangan pembangunan	Partisipan mengikuti kegiatan program PLP-BK (neighbourhood development) sejak awal (penyuluhan/ sosialisasi)
		Partisipan memahami tujuan program PLP-BK (neighbourhood development)
		Pengelola proyek memberikan penjelasan cukup kepada partisipan tentang perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan
	Partisipan memberikan ide/gagasan pada tahap Perencanaan Partisipatif	Partisipan memberi usulan tentang jenis prasarana atau sarana yang perlu dibangun
		Partisipan memberi usulan tentang prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan
		Partisipan memberi usulan bagaimana kegiatan pembangunan akan dilakukan
		Partisipan mendapat tanggapan dari pihak program/penyelenggara kegiatan mengenai usulannya
		Pihak pengelola proyek memberikan kesempatan/waktu yang cukup memadai kepada partisipan untuk memberikan usulan perencanaan dan perancangan komponen yang akan dibangun
Pengambilan Keputusan	Substansi Keputusan	Partisipan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan dan perancangan ini
		Partisipan hadir dalam pertemuan untuk penyampaian usulan perencanaan dan perancangan prasarana yang akan dibangun
		Pengaruh ketua RT/RW untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun
	Substansi Pengoperasian	Pengaruh tokoh masyarakat untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun
		Pengaruh pihak kelurahan/kecamatan untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun
		Pengaruh staf proyek/ tenaga ahli pendamping untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun

commit to user

Kriteria/ Tataran	Indikator	sub-indikator	
Pengambilan Keputusan	Substansi Pengoperasian	Partisipan merasa bermanfaat ikut dalam rapat pengambilan keputusan	
		Partisipan memahami keputusan yang diambil	
Implementasi	Adanya kontribusi sumber daya yang sesuai dalam tahap Perencanaan Partisipatif	Partisipan memberi sumbangan dalam perencanaan	
		Partisipan ikut membantu dengan tenaga (ikut bekerja) menyiapkan kegiatan perencanaan	
		Partisipan menyediakan tempat untuk mengadakan kegiatan perencanaan	
	Adanya Keterlibatan Partisipan dalam Kepanitiaan program	Partisipan mendaftarkan diri sendiri dalam kegiatan program	
		Penyesuaian dalam Perencanaan Program	Darimana partisipan mengetahui lokasi yang akan menjadi prioritas program PLP-BK (neighbourhood development)
			Darimana partisipan mengetahui prasarana/sarana yang akan menjadi prioritas program PLP-BK (neighbourhood development)
Kesesuaian sumbangan partisipan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya			
Evaluasi	Siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan	Partisipan mengikuti pengambilan keputusan perencanaan program PLP-BK (neighbourhood development)	
		Partisipan mengetahui kepada siapa usulan perbaikan disampaikan	
		Partisipan merasa bermanfaat ikut dalam kegiatan penilaian (evaluasi) perencanaan ini	
		Pengaruh ketua RT/RW untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	
		Pengaruh tokoh masyarakat untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	
		Pengaruh pihak kelurahan/kecamatan untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	
	Kegiatan dan bagaimana evaluasi dilakukan	Pengaruh staf pemerintah/proyek untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	
		Partisipan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan berupa koreksi atau saran-saran perbaikan	
		Pihak pengelola proyek memberi kesempatan yang cukup kepada partisipan untuk melakukan penilaian (evaluasi) atas perencanaan dan perancangan komponen yang akan dibangun	
		Partisipan puas dengan kegiatan penilaian (evaluasi) perencanaan ini	

Sumber : Penulis, 2010

commit to user

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode deskriptif, yaitu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang/ sementara berlangsung (Consuelo G, Sevilla, et.al, 1993:71). Tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Adapun desain penelitian yang akan dipakai penulis adalah desain *case study*/ studi kasus, yaitu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya (Nasution, 1996:27). Jadi, tujuan studi kasus ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Menurut Nasution, metode penelitian dengan studi kasus memiliki keuntungan dan kekurangan.

Kelebihan dalam studi kasus dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dengan *case study* dapat diselidiki setiap aspek kehidupan sosial.
- b. *Case study* dapat digunakan untuk meneliti setiap aspek spesifik dari suatu topik atau keadaan sosial secara mendalam.
- c. Dalam *case study* dapat digunakan berbagai cara pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, angket, studi dokumenter, dan alat pengumpulan data lainnya untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya agar masalah itu kita pahami secara mendalam.
- d. *Case study* dapat menguji kebenaran teori.
- e. *Case study* dapat dilakukan dengan biaya yang rendah, namun tergantung dari metode pengumpulan data yang digunakan.

Disamping keuntungan yang disebutkan di atas, ada pula kekurangannya, yaitu:

commit to user

- a. Karena *case study* mempelajari aspek-aspek yang spesifik, maka kemungkinan untuk mencapai generalisasi sangat terbatas.
- b. *Case study* memakan waktu yang lebih banyak bila dibandingkan dengan survey.

Laporan penelitian ini dilakukan dengan mengetahui proses pada tahapan perencanaan lingkungan makro serta mikro dalam program PLP-BK (*Neighbourhood Development*) di Desa Jendi. Hal ini mengandung makna pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai dari program PLP-BK (*Neighbourhood Development*) yang dilaksanakan secara sistematis sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada data yang membantu menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai apa yang menjadi tujuan penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pengambilan obyek amatan. Data yang diperoleh di lapangan kemudian dikelompokkan antara lain sebagai berikut.

1. Kebutuhan Data

Kebutuhan data merupakan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Kebutuhan data tersebut diperinci sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kebutuhan Data

No.	Data	Sub-Data	Sifat Data	Jenis Data	Sumber
1	RTRW Wonogiri, RDTRK selogiri	Kebijakan, peraturan	Kuantitatif	Sekunder	BAPPEDA
2	Penggunaan lahan	Luas lahan terbangun, tata guna lahan desa Jendi	Kuantitatif dan Kualitatif	Sekunder primer	BAPPEDA, TAPP
3	Peta Batas Adminitrasi Wilayah	Gambaran batas-batas wilayah administrasi desa	Kuantitatif dan Kualitatif	Sekunder	BAPPEDA, TAPP

commit to user

No.	Data	Sub-Data	Sifat Data	Jenis Data	Sumber
5	Data Penduduk tiap dusun	Gambaran jumlah penduduk, data sex rasio, mata pencaharian, kelompok umur	Kuantitatif	Sekunder Primer	Monografi Desa Kepala Desa
6	Data Kegiatan perencanaan partisipatif di desa Jendi	Daftar absensi kehadiran dan keterlibatan pelaku	Kuantitatif dan Kualitatif	Sekunder Primer	BKM
7	data proses perencanaan partisipatif di desa Jendi	Data persiapan proses perencanaan partisipatif (sosialisasi) Data proses perencanaan Lingkungan Makro dan mikro Data pada saat tataran pengambilan keputusan, implementasi perencanaan Data pada tataran evaluasi tahap rencana.	Kualitatif	Primer	observasi, Foto.

Sumber : Identifikasi Peneliti

2. Pengumpulan Data Primer

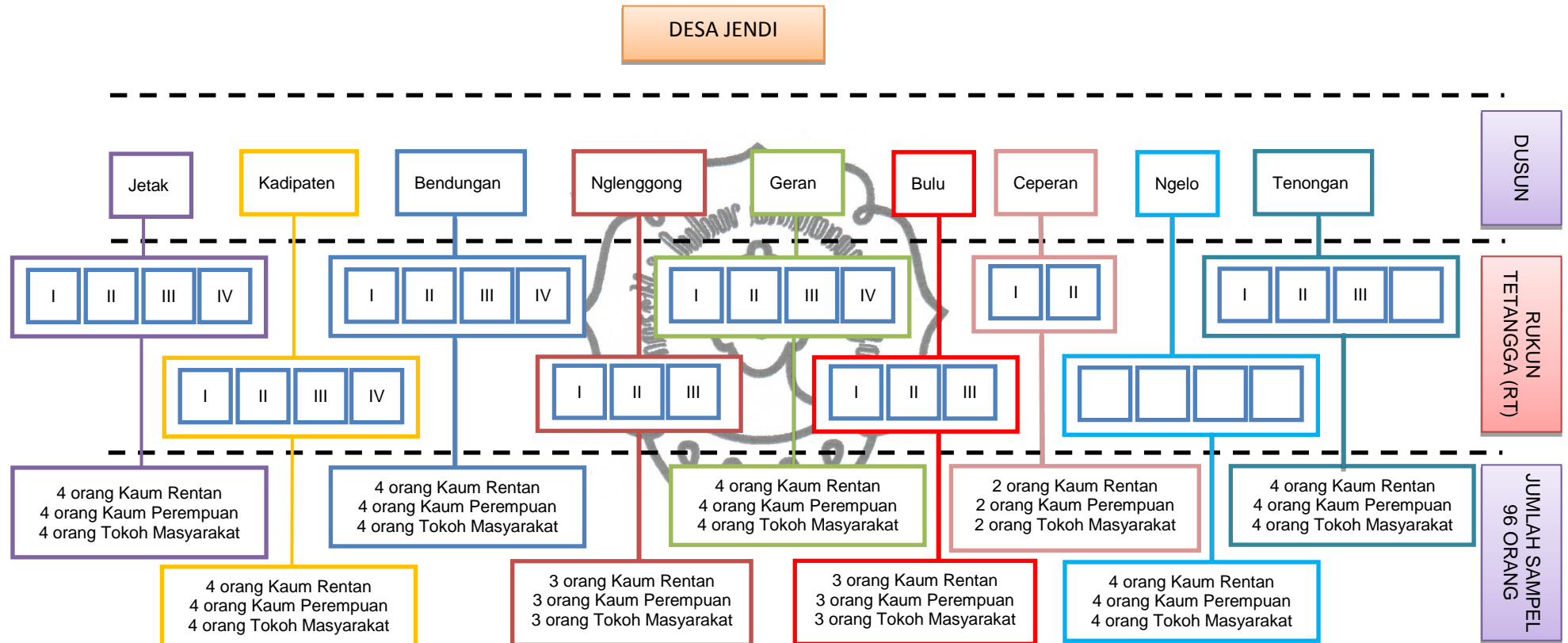
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan tinjauan dan pengumpulan data secara langsung di Desa Jendi yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer ini diperoleh dari hasil pengamatan lapangan pada waktu studi dilakukan, angket (kuesioner) dan wawancara dengan informan yang terkait. Instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara, angket (kuesioner) bagi sejumlah responden, observasi lapangan serta dokumentasi foto.

a. Penyebaran Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk dijawab oleh responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik sampel tidak proporsional berdasarkan jumlah yang telah ditentukan (*disproportional quota sampling*), maksud dari pengambilan secara tidak proporsional adalah strata yang menjadi

kategori dalam kerangka sampling cukup banyak selain itu alasan menggunakan teknik tersebut adalah karena wilayah penelitian yang cukup luas dengan banyaknya kendala prasarana sehingga untuk menghemat waktu dan tenaga tetapi tidak mengurangi tingkat keterwakilan masing-masing kluster teknik ini dianggap paling efisien. Sebelum menentukan jumlah sampel langkah yang dilakukan adalah menentukan dahulu kerangka sampel. Kerangka sampel yang dipilih adalah dengan pembagian strata. Dalam Program *Neighbourhood Development* sendiri pada pedoman pelaksanaan disebutkan bahwa indikator hasil dari program adalah minimal 40% tingkat kehadiran kaum miskin dan rentan dalam pertemuan-pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan, minimal 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan-pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan serta minimal 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM di tingkat RT/ komunitas basis (pelibatan tokoh masyarakat). Dari indikator hasil tersebut dapat diperoleh tiga kelompok masyarakat dalam program *Neighbourhood Development*, golongan itu adalah kaum rentan, kaum perempuan, serta tokoh masyarakat. Dalam penelitian ini nantinya pembagian sample dilakukan pada lingkup RT. Sehingga pembagian strata tersebut mulai dari tiap RT dan masing-masing RT ditentukan sampelnya dengan jumlah yang sama besarnya. Berikut jumlah sampel yang diambil di Desa Jendi.

Dari indikator hasil tersebut dapat diperoleh tiga kelompok masyarakat dalam program *Neighbourhood Development*, kelompok tersebut adalah :



Sumber : Penulis, 2010

Gambar 3.1 Skema Sampel Kuesioner Penelitian

Tabel 3.2 Daftar Penyebaran Kuesioner Desa Jendi

No	Nara Sumber	Detail	Jumlah Sample
1	Masyarakat Dusun Jetak	1(orang kaum rentan) x 4 RT	12 orang
		1(orang kaum perempuan) x 4 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 4 RT	
2	Masyarakat Dusun Kadipaten	1(orang kaum rentan) x 4 RT	12 orang
		1(orang kaum perempuan) x 4 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 4 RT	
3	Masyarakat Dusun Bendungan	1(orang kaum rentan) x 4 RT	12 orang
		1(orang kaum perempuan) x 4 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 4 RT	
4	Masyarakat Dusun Nglenggong	1(orang kaum rentan) x 3 RT	9 orang
		1(orang kaum perempuan) x 3 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 3 RT	
5	Masyarakat Dusun Geran	1(orang kaum rentan) x 4 RT	12 orang
		1(orang kaum perempuan) x 4 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 4 RT	
6	Masyarakat Dusun Bulu	1(orang kaum rentan) x 3 RT	9 orang
		1(orang kaum perempuan) x 3 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 3 RT	
7	Masyarakat Dusun Ceperan	1(orang kaum rentan) x 2 RT	6 orang
		1(orang kaum perempuan) x 2 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 2 RT	
8	Masyarakat Dusun Ngelo	1(orang kaum rentan) x 4 RT	12 orang
		1(orang kaum perempuan) x 4 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 4 RT	
9	Masyarakat Dusun Tenongan	1(orang kaum rentan) x 4 RT	12 orang
		1(orang kaum perempuan) x 4 RT	
		1(orang tokoh masyarakat) x 4 RT	
jumlah			96 orang

Sumber : Data Survey Awal

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik mendekati sumber informasi dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh pewawancara dan informan (Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 2001 : 135).

Pengumpulan data primer dengan wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang terkait dengan program PLP-BK (*neighbourhood development*) di Desa Jendi. Penentuan responden wawancara dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Riduwan, 2004). Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Di Desa Jendi pengambilan teknik *purposive sampling* ditujukan pada masyarakat yang terlibat dalam kelembagaan pada saat perencanaan partisipatif. Rincian tentang responden untuk *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Responden Wawancara Penelitian

No	Nara Sumber	Jumlah	Keterangan
1	TIPP	1 orang	
2	Pemerintah Desa	1 orang	
3	BKM	1 orang	
4	TAPP	1 orang	
5	ass. Urban planner	1 orang	
6	Fasilitator Kelurahan	1 orang	
7	Relawan	6 orang	Pokja Lingkungan Hidup / Tata Ruang
			Pokja Perumahan dan Bangunan
			Pokja Sarana/ Prasarana
			Pokja Kelembagaan
			Pokja Pengembangan Ekonomi
			Pokja Peningkatan Layanan Publik
Total		11 orang	

Sumber : Data Survey Awal

c. Observasi Lapangan

Menurut Sutrisno Hadi (1984:136), observasi adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan kemudian melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Observasi yang dilakukan berupa catatan lapangan dan foto-foto kondisi lingkungan dan masyarakat yang mendapatkan program *neighbourhood development*. Observasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa lokasi pelaksanaan program

3. Pengumpulan Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung, metode pengumpulan data dengan survey sekunder ini dilakukan melalui studi dokumen yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian ini.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan dokumen/ arsip/ literatur dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, serta dinas/ instansi, lembaga lain yang memiliki informasi berkaitan dengan partisipasi masyarakat desa Jendi dalam program *Neighbourhood development*.

Dalam pencarian data sekunder ini juga dilakukan studi dokumen, yakni menelaah tentang data-data peraturan kota dan peraturan daerah, data demografi serta peta wilayah yang berhubungan dengan Desa Jendi.

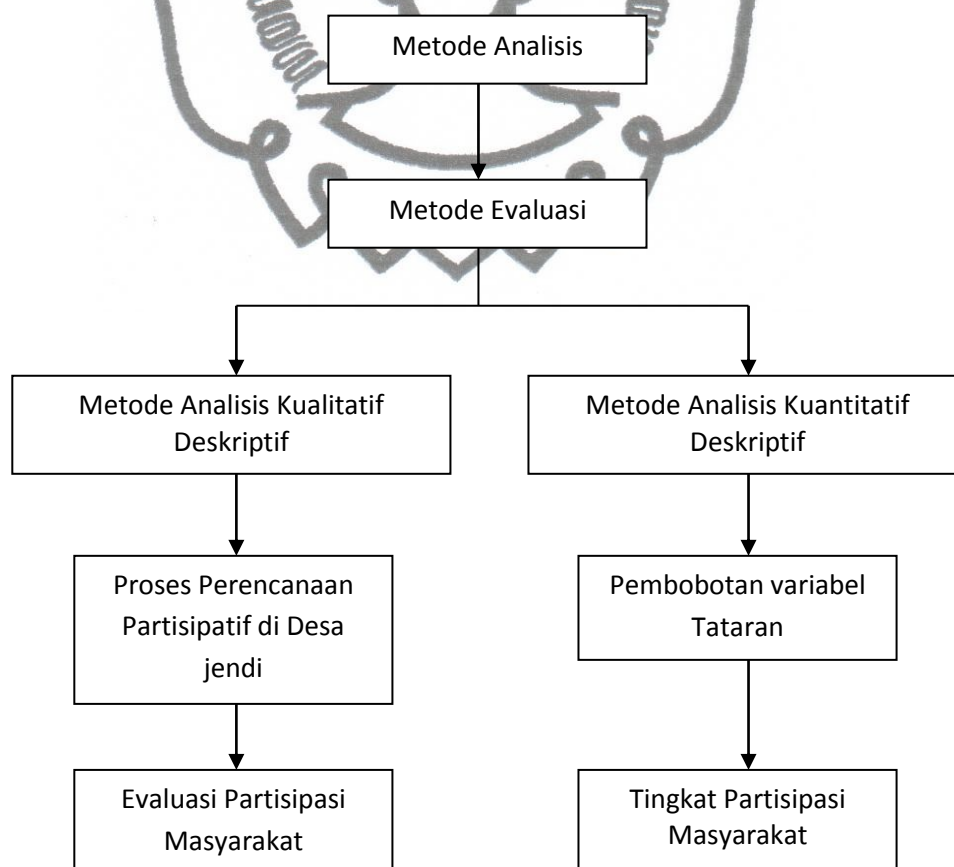
Selain itu, juga dilakukan studi dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, literatur, laporan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan. Dokumen ini dapat diperoleh dari lembaga pemerintah dan arsip serta dokumen pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat H.B Sutopo (Metode Penelitian Kualitatif.2002:54), yaitu bahwa dokumen dan arsip adalah sumber informasi tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kegiatan.

C. Metode Analisis

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2001).

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhan, nilai atau kesempatan-kesempatan yang merupakan "masalah" (Dunn, 2000).

Dalam hal ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui nilai yang telah dicapai oleh suatu kebijakan atau program dan memberikan sumbangan terhadap apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, maka metode evaluasi yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menganalisis hasil wawancara pejabat instansi pemerintah, Fasilitator Kelurahan, BKM, TAPP, TIPP, Relawan, dan ass. Urban planner di Desa Jendi yang bertujuan untuk mengetahui proses partisipatif dan penilaian evaluasi partisipasi masyarakat di desa Jendi. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk data-data yang dihasilkan melalui penyebaran kuesioner, yang meliputi tataran ide, pengambilan keputusan, implementasi dan tataran evaluasi, yang terdapat di dalam tahap perencanaan partisipatif program PLP-BK (*Neighbourhood Development*).



Sumber : Penulis

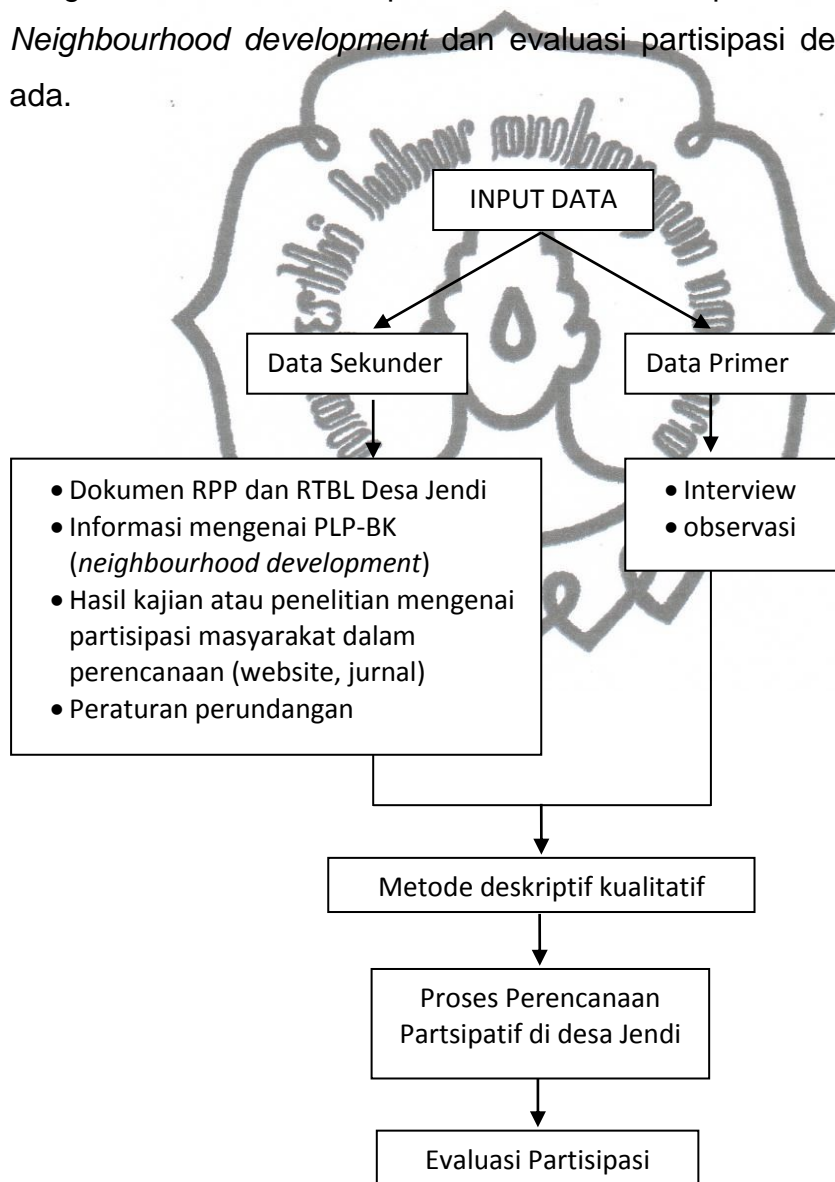
commit to user

Gambar 3.2 Kerangka Analisis

Analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kualitatif Deskriptif

Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif dari hasil observasi, wawancara dan data pendukung dari pihak yang terkait, seperti Pemdes, TIPP, BKM, fasilitator untuk mengetahui proses perencanaan partisipatif di desa Jendi beserta kegiatan yang dilakukan serta dianalisis dengan kesesuaian pedoman teknis pelaksanaan program *Neighbourhood development* dan evaluasi partisipasi dengan teori yang ada.



Sumber : Penulis

Gambar 3.3 Kerangka Analisis Kualitatif Deskriptif

commit to user

2. Analisis Kuantitatif Deskriptif

Dalam analisis ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

a. Klasifikasi Skala Partisipasi Masyarakat

Klasifikasi skala partisipasi masyarakat dari 0 sampai dengan 100 diusulkan oleh responden dalam wawancara, dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu partisipasi tinggi, partisipasi sedang dan partisipasi rendah, dan masing-masing tingkatan dibagi menjadi tiga kategori seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Klasifikasi Skala Partisipasi Masyarakat

No.	Tingkatan	Range
1	Partisipasi Tinggi	66 - 100
2	Partisipasi Sedang	33 - 66
3	Partisipasi Rendah	≤ 33

Sumber : Arnstein

Berdasarkan teori Arnstein kategori tingkat partisipasi masyarakat dapat dibagi sebagai berikut :

- Partisipasi Rendah (*Nonparticipation*)

Klasifikasi ini dikatakan sebagai bukan peran serta, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan.

- Partisipasi Sedang (*Tokenism*)

Klasifikasi pada level ini menurut Arnstein adalah masuk ke dalam derajat 'penghargaan' dan 'mengalah', yaitu saat masyarakat sudah diajak bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

- Partisipasi Tinggi (*Citizen Power*)

Klasifikasi yang dimaksud adalah apa yang sebenarnya ada dalam gagasan Arnstein tentang peran serta masyarakat itu sendiri, yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi peran serta masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai mengambil bagian

dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat itu sendiri.

b. Pembobotan dan Skoring

Pemberian bobot yang digunakan dalam penelitian ini, didasarkan pada seberapa besar kaitan indikator tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PLP-BK (*Neighbourhood Development*). Semakin besar bobot yang diberikan, maka semakin besar indikator tersebut dalam menentukan tingkat partisipasi. Penentuan bobot masing-masing tataran dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber, yang meliputi pemerintah desa Jendi, Fasilitator Kelurahan, BKM, TAPP, TIPP, Relawan, dan ass. Urban planner, yang pada hasilnya akan diperoleh masukan berupa nilai bobot untuk masing-masing tataran dalam tahap perencanaan.

Pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam berpartisipasi:

- Nilai 1 = tidak penting
- Nilai 2 = kurang penting
- Nilai 3 = cukup penting
- Nilai 4 = penting
- Nilai 5 = sangat penting

Sedangkan untuk skoring dalam instrumen penelitian tingkat partisipasi masyarakat pada program PLP-BK (*neighbourhood development*) ini menggunakan skala binominal dengan skala; 1) ya/ berpartisipasi = 1, dan 2) tidak/ tidak berpartisipasi = 0.

Nilai partisipasi masyarakat tiap tataran didapat melalui jumlah skor tiap tataran dikalikan dengan bobot masing-masing tataran yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk kemudian dijumlah dan diperoleh nilai total partisipasi. Dari hasil nilai total partisipasi ini akan diketahui tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan klasifikasi skala partisipatif yang telah ditentukan sebelumnya.

commit to user

c. Uji Validitas dan Realibilitas

1) Validitas

Validitas adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar suatu alat ukur betul - betul mengukur apa yang perlu diukur. Validitas suatu pengukuran senantiasa berhubungan dengan kesesuaian dan kecermatan dari alat ukur yang digunakan. Untuk pengujian validitas kuesioner digunakan teknik korelasi *product momen* dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi *product moment*.

N = Banyak sampel

$\sum X$ = Jumlah skor nilai setiap butir

$\sum Y$ = Jumlah skor total

$\sum XY$ = Jumlah XY

Butir soal kuesioner dikatakan valid bila $r_{xy} > r_{0,05;96}$ yaitu $r_{xy} > 0,202$ dan bila tidak demikian dikatakan tidak valid. Perhitungan analisis validitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 12.

2) Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang berbeda. (Sarwono, 2006).

Adapun rumusnya adalah :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

α = Koefisien *Alpha*

k = Banyak butir soal yang valid

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah *variance* butir soal

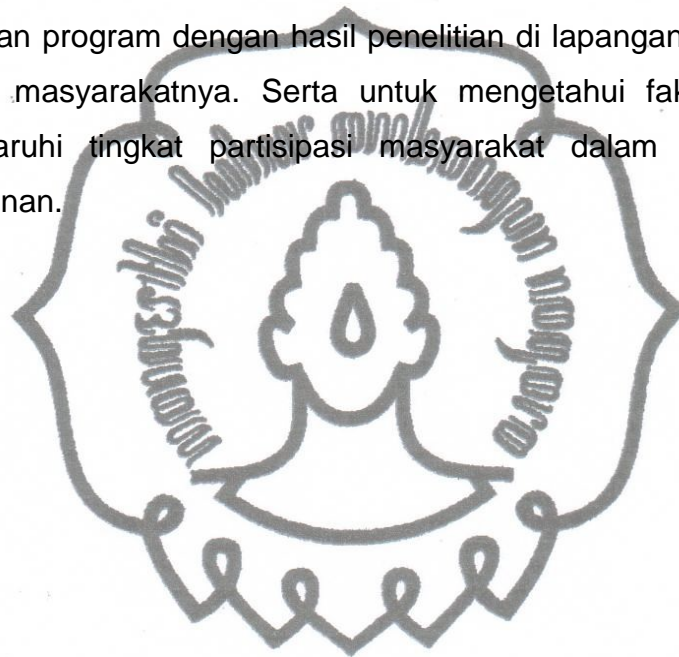
σ_t^2 = *Variance total*

commit to user

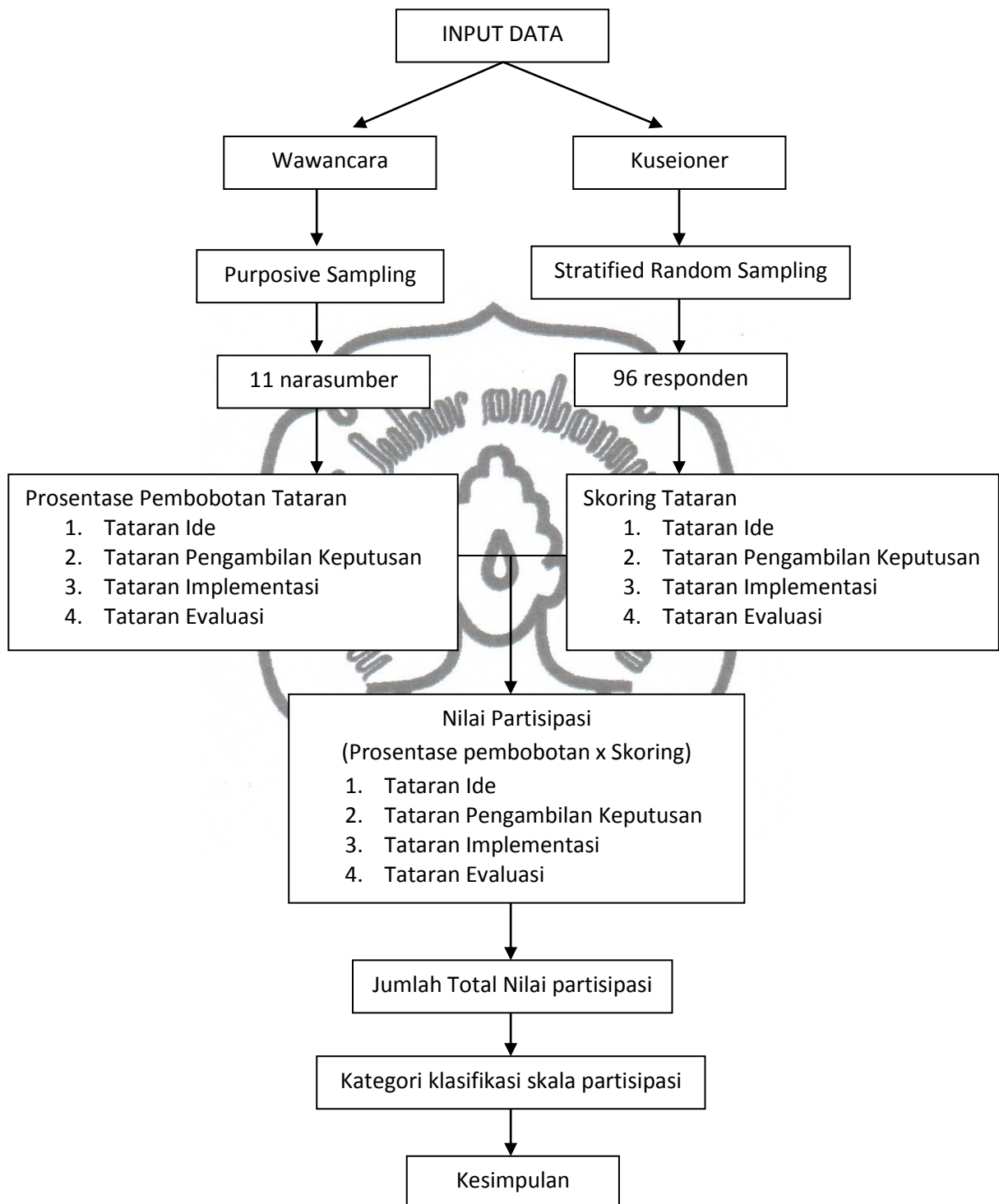
Suatu instrumen dikatakan reliabel bila nilai *Alpha* > 0,60. Dari keempat variabel tataran (ide, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi) akan dihitung uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan program *Microsoft Excel*.

d. Analisis deskriptif

Data hasil kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS dan EXCEL. Hasil dari skoring tersebut akan dianalisis, tujuannya adalah untuk membandingkan proses partisipatif pada saat pelaksanaan program dengan hasil penelitian di lapangan tentang tingkat partisipasi masyarakatnya. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan.



commit to user



Sumber : Penulis,2010

Gambar 3.4 Kerangka Analisis Kuantitatif Deskriptif

commit to user

BAB IV TINJAUAN OBYEK PENELITIAN

A. Kondisi Wilayah Desa Jendi

1. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi

Dalam penelitian ini, wilayah yang termasuk adalah wilayah administrasi Desa Jendi, Kecamatan Selogiri yang merupakan bagian dari Kabupaten Wonogiri. Luas keseluruhan desa Jendi adalah 508,1270 Ha.

Dengan batas wilayah :

- Sebelah Timur : Desa Singodutan
- Sebelah Barat : Desa Kepatihan
- Sebelah Selatan : Desa Keloran
- Sebelah Utara : Desa Pule

Secara administratif desa Jendi terdiri dari 9 dusun, yaitu dusun Jetak, dusun Kadipaten, dusun Bendungan, dusun Nglenggong, dusun Geran, dusun Ceperan, dusun Bulu, dusun Ngelo, dan dusun Tenongan. Kesembilan dusun tersebut terdiri dari 32 RT.

2. Demografi Desa Jendi

a. Jumlah Penduduk Desa Jendi

Berdasarkan data Pemetaan Swadaya (PS), jumlah penduduk Desa Jendi pada tahun 2009 sebanyak 7.072 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1670 KK yang menempati 9 dusun. Berdasar data tersebut dapat diketahui bahwa tiap KK rata-rata beranggotakan 4 – 5 orang (4,14). Desa yang paling banyak penduduknya adalah Dusun Geran kemudian Kadipaten dan Bendungan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Jendi

No.	Nama Dusun	Jml KK	Jml Penduduk	%
1	Jetak	123	689	9.74
2	Kadipaten	217	1.045	14.78
3	Bendungan	258	1.010	14.29
4	Nglenggong	212	867	12.27
5	Geran	266	1.171	16.56
6	Bulu	142	497	7.02
7	Ceperan	160	519	7.34
8	Ngelo	191	750	10.60
9	Tenongan	101	524	7.41
Jumlah		1.670	7.072	100.00

Sumber : data desa dan data PS-2009

Sedang, pertumbuhan jumlah penduduk desa Jendi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mulai tahun 2005-2009 tidak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Nilai pertumbuhan penduduk hanya sekitar 1 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Jendi Tahun 2005-2009

Tahun 2005		Tahun 2007		Tahun 2009	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
3532	3403	3577	3433	3611	3461
Total 6932		Total	7010	Total	7072

Sumber : data desa dan data PS-2009

b. Jumlah Penduduk Desa Jendi dalam Kelompok Umur dan Kelamin Tahun 2009

Sex ratio untuk penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2009 sebesar 51 : 49 atau rasio penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Penduduk yang paling banyak terdapat di Desa Jendi adalah usia kerja, sebanyak 65,84. Penduduk usia non produktif hingga manula sebanyak 14,61%. Sisanya adalah penduduk dengan usia kecil hingga remaja.

commit to user

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasar Usia dan Jenis Kelamin Desa Jendi Tahun 2009

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Klp usia kerja	%
1	0 – 4 Tahun	265	227	492	1383	19.56
2	5 – 9 Tahun	192	198	390		
3	10 - 14 Tahun	266	235	501		
4	15 – 19 Tahun	192	166	358	4656	65.84
5	20 – 24 Tahun	292	218	510		
6	25 – 29 Tahun	361	357	718		
7	30 – 39 Tahun	633	632	1265		
8	40 - 49 Tahun	602	553	1155		
9	50 – 59 Tahun	315	335	650		
10	60 Tahun keatas	493	540	1033	1033	14.61
Jumlah Total		3611	3461	7072	7072	100.00

Sumber : data desa dan data PS-2009

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kaum perempuan berjumlah 3461 (49% dari jumlah populasi), yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan sample kuesioner. Sedangkan untuk kaum rentan, Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No.39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu secara eksplisit hanya penduduk di desa Jendi yang berumur 60 tahun ke atas serta penduduk usia kecil hingga remaja yang termasuk Kelompok Rentan.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Jendi memiliki mata pencaharian sebagai petani karena karakteristik lahan yang dimiliki Desa Jendi. Meski tidak sedikit yang juga bermata pencaharian sebagai PNS, buruh, swasta, pegawai, pedagang, ABRI, dan guru.

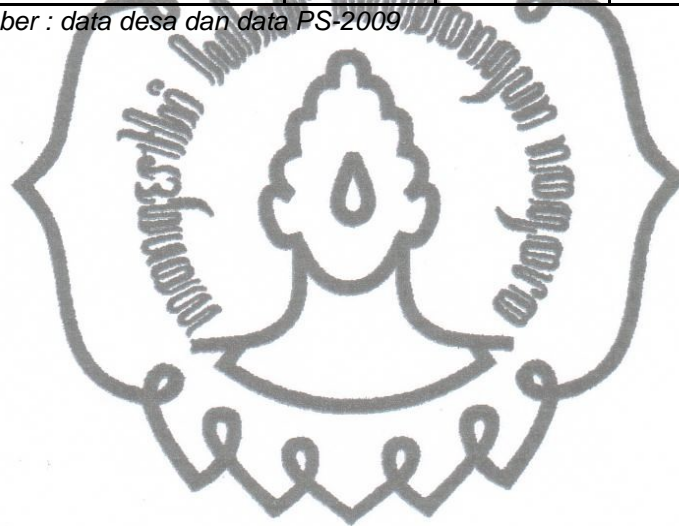
Dari pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa tokoh masyarakat dapat dilihat dari profesi atau mata pencahariannya. Di desa Jendi sendiri penduduk yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, Pensiunan pegawai maupun pengacara adalah orang-orang yang terkemuka sehingga dianggap sebagai tokoh masyarakat di desa Jendi.

commit to user

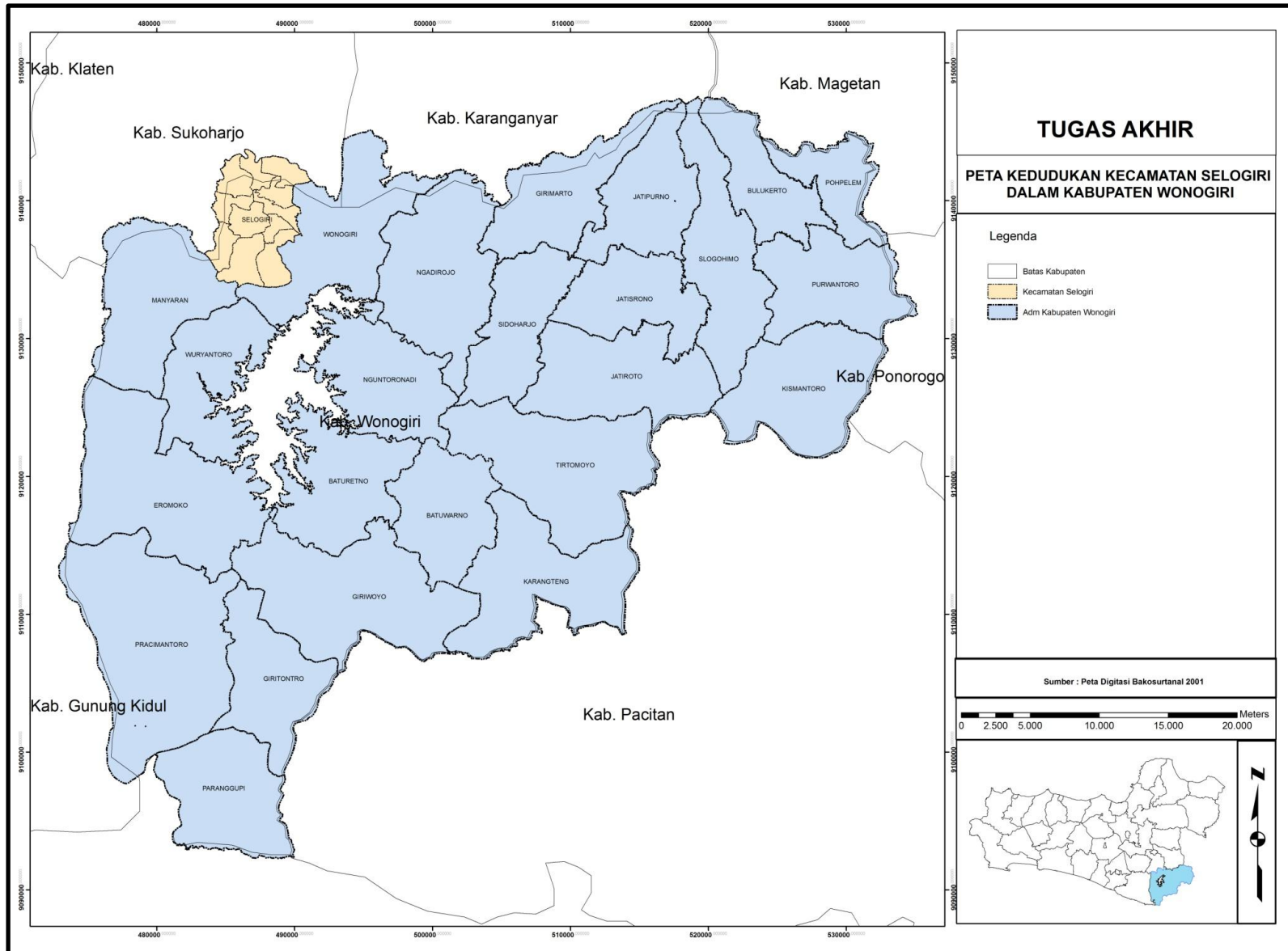
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Jendi Menurut Mata Pencaharian Tahun 2009

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Petani Pemilik	256	75	331	35.06
2	Buruh Tani	294	42	336	35.59
3	PNS	140	42	182	19.28
4	TNI	3	2	5	0.53
5	Polri	2	-	2	0.21
6	Pensiunan	41	17	58	6.14
7	Pengacara	1	-	1	0.11
8	Pedagang keliling	4	-	4	0.42
9	Peternak	4	-	4	0.42
10	Dukun kampung terlatih	-	1	1	0.11
11	Tukang (kayu, batu)	20	-	20	2.12
Jumlah Total		745	179	944	100.00

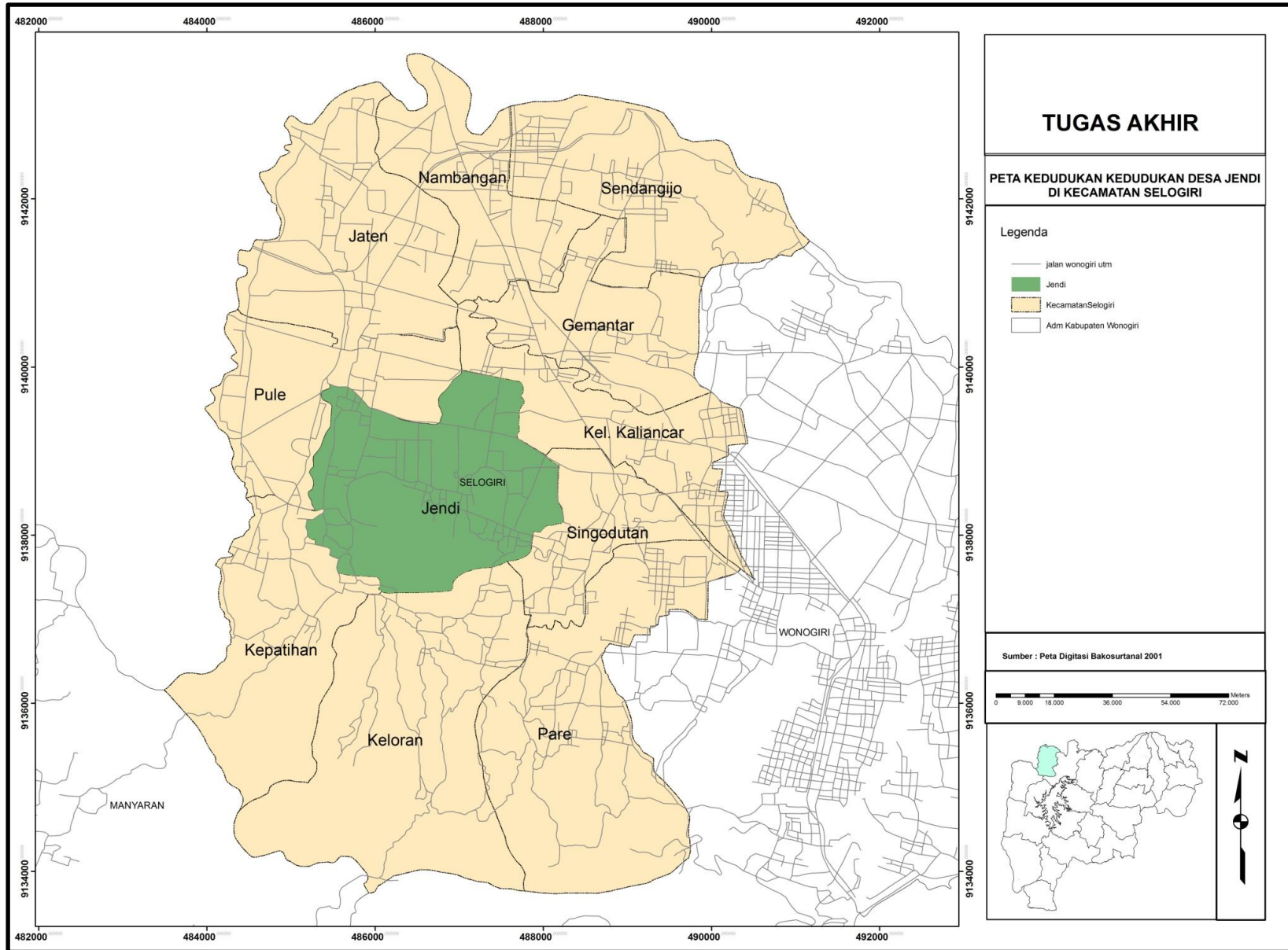
Sumber : data desa dan data PS-2009



commit to user



commit to user



commit to user

3. Tata Guna Lahan Desa Jendi

Desa Jendi seluas 508,1270 ha, sebagian besar merupakan areal persawahan. Sebagian besar lainnya merupakan lahan permukiman dan sebagian lagi berupa tegalan yang berada di area-area perbukitan Desa Jendi. Karena jenis tanah yang keras dan sulit ditanami, tegalan ini kurang berfungsi optimal dan sebagian besar menjadi hutan rakyat dengan komoditi pohon jati. Selain itu, perbukitan di beberapa wilayah (Dusun Nglenggong dan Geran) juga digunakan sebagai areal pertambangan emas tradisional. Sekitar 24% penggunaan lahan di Desa Jendi, terutama tegalan yang juga berfungsi sebagai areal pertambangan kurang berfungsi optimal dalam penggunaannya.

Sebagian besar lahan dan bangunan di Desa Jendi merupakan milik pribadi bersertifikat hak milik dan dimiliki secara turun temurun. Sebagian kecil (8%) merupakan tanah kas desa yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dengan izin atau peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan yang berlaku untuk tanah kas desa adalah tanah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan sifat kegiatan atau penggunaan lahan yang produktif. Lahan-lahan di perbukitan yang ditanami pohon jati dan mahoni juga merupakan milik pribadi kecuali area yang berada di pucuk gunung Tenong yang merupakan milik pemerintah desa atau disebut tanah O-O. Seperti dilihat dalam tabel dan peta berikut ini :

commit to user

Tabel 4.5 Penggunaan Lahan Desa Jendi Tahun 2008

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%	Kondisi tanah	Status kepemilikan	Pengelolaan
1.	Permukiman	140,9407	27,74	Tidak produktif	Hak milik individu	individu
2.	Persawahan	225,7495	44,43	produktif	Hak milik individu	individu
3.	Perkebunan/tegalan Termasuk hutan rakyat seluas ± 50 Ha areal pertambangan	124,014	24,41	Kurang produktif	Hak milik individu	individu
4.	Pemakaman	1,0275	0,2	Tidak produktif	Hak guna	Pemerintah desa
5.	Perkantoran	0,298	0,06	Tidak produktif	Hak guna	Pemerintah desa
6.	Prasarana umum lain	16,0973	3,17	Tidak produktif	Hak guna	Pemerintah desa
Luas Keseluruhan		508,127	100			

Sumber : data desa Jendi 2009

commit to user

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Program *Neighbourhood Development* (ND) di Desa Jendi

a. Sosialisasi ND

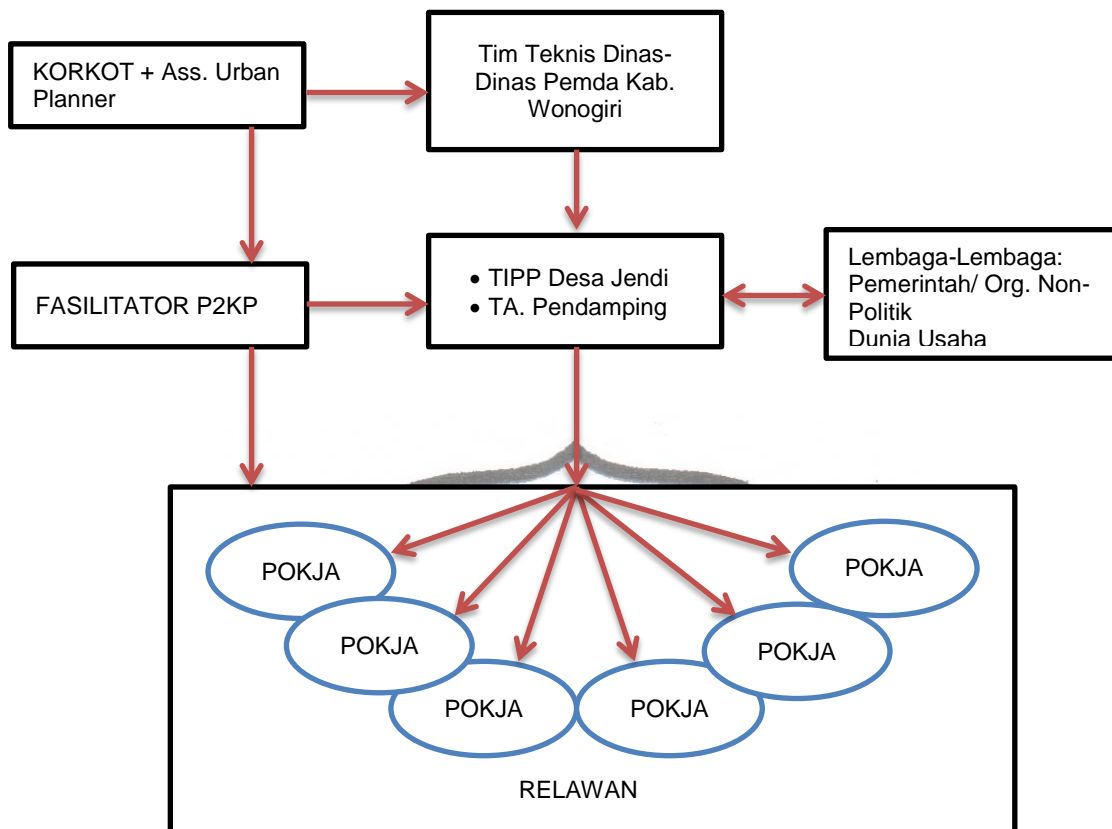
Sosialisasi ND pertama kali dilakukan di tingkat desa dan dihadiri masyarakat Desa Jendi. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman awal mengenai ND di tingkat masyarakat. Selanjutnya sosialisasi dilakukan di tingkat dusun (9 dusun) dimana pada tingkat ini dibentuk pula pokja-pokja yang nantinya akan menjadi pelaku utama dalam pengumpulan data-data yang diperlukan guna penyusunan dokumen perencanaan.

Pelaku utama dari perencanaan partisipatif desa Jendi secara khusus adalah TIPP. Tim ini terdiri dari masyarakat desa yang menjadi wakil dari masyarakat desa secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya proses partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat yang didampingi oleh fasilitator (tenaga ahli, senior fasilitator, asisten kota, dan koordinator kota). Di sisi lain, terdapat pemerintah desa dan pemerintah daerah yang akan berkolaborasi dengan masyarakat dalam hal kebijakan dan rencana pengembangannya.



Sumber : dok. ND

Gambar 4.1 Sosialisasi ND di Beberapa Dusun di Desa Jendi



Sumber: RPP Desa Jendi

Gambar 4.2 Pelaku Kelembagaan ND desa Jendi

Dari sosialisasi yang dilakukan di masing-masing dusun tergali permasalahan dan keinginan awal masyarakat terhadap dusunnya masing-masing yang ingin diselesaikan dan dikembangkan. Permasalahan dan keinginan warga di masing-masing dusun menjadi arahan awal dalam memahami kondisi kawasan.

Dapat disimpulkan bahwa keinginan utama masyarakat desa Jendi terkait dengan sumber penghidupan utama masyarakatnya, yaitu adanya saluran irigasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dengan penataan kandang serta, pengolahan limbah ternak untuk pertanian, dan buangan emas juga menjadi keinginan masyarakat desa Jendi. juga menjadi keinginan atau cita-cita masyarakat desa Jendi ke depannya.

Permasalahan dan keinginan awal yang terbentuk di masyarakat di masing-masing adalah sebagai berikut :

commit to user

Tabel 4.6 Permasalahan Dan Keinginan Tiap Dusun

No	Tanggal Kegiatan	Dusun	Permasalahan dan Keinginan	Fokus Masalah
1	16-Des-08	Bulu	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pemasaran industri kecil : tahu, tempe, bata merah, mebel b. Ada supermarket c. Ada saluran irigasi untuk pertanian tadah hujan d. Permukiman yang sehat e. Pelatihan warga berupa bekal ketrampilan f. Pembuatan bendungan/dam g. Ternak sapi komunal h. Pembuatan pupuk organic dan biogas i. Pengolahan limbah emas j. Adanya taman baca masyarakat k. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat 	Fokus permasalahan pada dusun Bulu lebih pada sektor peningkatan ekonomi masyarakat
2	17-Des-08	Jetak	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan jalan dusun sbg jalan masuk utama desa b. Pengelolaan ternak dan limbahnya c. Pemanfaatan pekarangan rumah d. Penataan lingkungan yang sehat 	Fokus permasalahan di dusun Jetak lebih pada fisik penataan lingkungan dusun.
3	18-Des-08	Tenongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pemasaran hasil kebun (sayuran) b. Pengembangan dan pemasaran hasil home industri (keripik tempe) c. Pengembangan dan pemasaran hasil peternakan (ikan) d. Pengembangan dan pemasaran hasil pertanian e. Pengembangan dan pemasaran hasil konveksi f. Mengatasi masalah semakin sempitnya areal pertanian g. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan h. Memiliki penghasilan dg income min. Rp. 5.000,00 per hari i. Lingkungan yang tenteram j. Gunung Tenong dijadikan sbg kawasan wisata k. Slogan : Tenongan berhasil 	Fokus permasalahan di dusun Tenongan lebih pada sektor ekonomi khususnya pemasaran dan pengembangan hasil sumber daya masyarakat.

No	Tanggal Kegiatan	Dusun	Permasalahan dan Keinginan	Fokus Masalah
4	19-Des-08	Ceperan	a. Penataan jalur/jalan putar desa b. Pengembangan pasar Tiban	Fokus permasalahan di dusun Ceperan adalah penataan lingkungan dan ekonomi.
5	20-Des-08	Kadipaten	a. Mengatasi kesulitan pupuk bagi petani b. Penataan dan menghidupkan kembali pasar c. Mengatasi permasalahan endemic DBD d. Adanya jalur alternative dusun e. Adanya penanda wilayah/kawasan f. Menjadikan Jendi desa tani mandiri dalam hal air dan pupuk	Fokus Permasalahan di dusun Kadipaten adalah pada sektor pertanian desa.
6	21-Des-08	Bendungan	a. Moto : desa Gemah Ripah Loh Jinawi b. Penataan kandang sapi c. Pengembangan dan pengolahan ternak (sapi) d. Pengolahan limbah sapi e. Solusi permasalahan daerah endemis DB; menjadi daerah bebas DBD	Fokus permasalahan di dusun Bendungan adalah pada sektor peternakan dan kesehatan.
7	22-Des-08	Nglenggong	a. Adanya kerja sama antar warga masyarakat b. Pengembangan dan pengelolaan tambang emas c. Penataan dan pemanfaatan bukit yg krg berfungsi sbg area perkebunan (nanas) d. Pengolahan limbah emas e. Pengolahan pupuk organik dari kotoran ayam f. Betonisasi dan taludisasi semua jalan g. Jalan tukul diperlebar h. Adanya bendungan untuk irigasi sawah (masa tanam sepanjang tahun)	Fokus permasalahan di dusun Nglenggong adalah pada bidang pertambangan dan pertanian.

No	Tanggal Kegiatan	Dusun	Permasalahan dan Keinginan	Fokus Masalah
8	23-Des-08	Ngelo	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan infrastruktur desa : jalan, saluran, dsb b. Penggunaan tanaman produktif untuk perkebunan, sawah, dan pekarangan c. Penanaman sengon laut d. Adanya jalan lingkar selatan e. Pembuatan saluran irigasi f. Pemanfaatan tegalan di Ngelo g. Pembangunan gedung olah raga h. Sbg penghasil produk organik i. Adanya pintu masuk/gerbang dusun j. Adanya pabrik pupuk organik, biogas, dan bio diesel k. Adanya perpustakaan 	Fokus permasalahan di dusun Ngelo adalah pada infrastruktur desa dan sektor pertanian.
9	27-Des-08	Geran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan peternakan lele b. Sebagai daerah pariwisata emas c. Adanya sumber air bersih d. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan (lada) e. Adanya lapangan olah raga dan stadion f. Fasilitas penerangan jalan g. Adanya sarana transportasi dalam desa h. Penataan jalur putar desa i. Moto : " GERAN EMAS : ekonomi, makmur, aman, sejahtera 	Fokus permasalahan di dusun Geran adalah pada sektor infrastruktur desa.

Sumber : RPP desa Jendi

b. Perencanaan Lingkungan Makro

1) Penggalian visi dan misi melalui lomba tingkat desa

Lomba yang dilakukan adalah lomba menggambar, pembuatan poster, serta gerak jalan. Lomba ini diikuti hampir semua warga desa Jendi dan diadakan di Balai desa Jendi. Dari perlombaan yang diadakan, yaitu lomba menggambar dan poster (diikuti oleh anak-anak dan remaja) diketahui bahwa keinginan atau cita-cita mereka adalah terbangunnya sarana prasarana yang mengekomodasi kebutuhan mereka, seperti TK, taman bermain, perpustakaan, pusat informasi desa, dan juga terciptanya kebersihan lingkungan dan masyarakat yang peduli akan permukimannya.

2) Pemetaan Swadaya

Kegiatan pemetaan swadaya (PS) merupakan kegiatan pengumpulan data atau kondisi yang ada di wilayah, lingkungan, maupun masyarakat desa Jendi yang dilakukan di masing-masing dusun melalui pokja-pokja yang telah terbentuk ketika sosialisasi dusun.



Sumber : dok. ND-2009

Gambar 4.3 Proses Pemetaan Swadaya

Pokja tersebut antara lain adalah pokja tata ruang, pokja ekonomi, pokja pertanian (termasuk di dalamnya peternakan, perkebunan, dan pertambangan), pokja jaringan jalan dan jembatan, pokja saluran air bersih, air kotor, dan persampahan, pokja pelayanan publik, dan pokja kelembagaan. Data-data inilah yang akan digunakan sebagai dasar rencana pengembangan kawasan dengan diperkuat dengan survei dan analisis yang dilakukan.

3) Penggalian visi dan misi melalui penataan lingkungan

Keinginan atau cita-cita masyarakat yang telah terbentuk melalui sosialisasi dan perlombaan yang diadakan pemerintah desa dengan BKM dan dilengkapi dengan data kondisi wilayah yang terkumpul melalui kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) selanjutnya dilakukan implementasi fisik yang diharapkan merupakan implementasi dari visi, misi, serta kondisi dusun yang telah ada.



Sumber : dok. ND

Gambar 4.4 Implementasi Fisik Masyarakat Jendi dalam Menata Lingkungan

commit to user

Implementasi fisik dilakukan melalui penataan permukiman termasuk sarana prasarana dan infrastrukturnya oleh masyarakat di dusun masing-masing. Selain itu, dilakukan pula pembuatan baliho yang mencerminkan keinginan atau potensi masing-masing dusun untuk dikembangkan. Hasilnya adalah masyarakat menginginkan permukiman yang tertata secara rapi, teratur, bahkan memiliki pengaturan tertentu dalam beberapa hal, adanya tanaman di kanan kiri jalan, taman, tempat sampah yang terpisah (organik-anorganik), penanda kawasan (*signage*), gapura masuk kawasan, hingga saluran air. Penataan fisik lingkungan dilakukan masyarakat masing-masing dusun dengan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan permukiman, pengecatan pagar yang sama, pembersihan saluran, penanaman tanaman di sisi jalan, pembuatan tempat sampah organik dan anorganik, pembuatan taman, hingga pemasangan papan nama jalan di masing-masing jalan lingkungan dusun.

4) Memahami Kondisi Wilayah Dan Kemungkinan Pengembangannya

Pendalaman masyarakat untuk memahami wilayahnya masing-masing (dusun) hingga akhirnya desa dilakukan dengan pembuatan miniature dusun (maket) dusun masing-masing. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki gambaran riil mengenai bentuk dan kondisi wilayahnya masing-masing. Dari maket yang telah terbentuk masyarakat diharapkan memiliki gambaran dalam mengembangkan kawasan atau desanya kelak. Gambaran pengembangan kawasan desa Jeni yang telah terbentuk dihasilkan melalui diskusi-diskusi dengan menggunakan maket sebagai mediana. Hasil dari diskusi yang dilakukan adalah masyarakat memiliki keinginan untuk menata jalan utama desa menjadi jalan yang nyaman, teduh, dan akomodatif bagi pejalan kaki. Selain itu, pengembangan ekonomi rakyat juga ingin mereka kembangkan. Saluran irigasi dan jalan sawah mereka inginkan untuk peningkatan hasil pertanian. Pengelolaan limbah ternak dan emas sehingga

tidak mencemari lingkungan juga menjadi hal penting yang mereka inginkan untuk desa ke depannya. Kelengkapan sarana prasarana baik di tingkat dusun maupun desa, seperti area olahraga, pusat informasi desa, taman juga menjadi hal yang mereka harapkan ada di desa bahkan di dusun mereka kelak.



Sumber : dok. ND

Gambar 4.5 Proses Penggalan Cita-Cita Melalui Maket

5) Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan

Data-data yang telah dikumpulkan dan dari kesimpulan keinginan masyarakat untuk desanya disusun dalam sebuah dokumen perencanaan pengembangan permukiman. Dokumen ini disusun oleh TIPP dengan dibantu fasilitator, pemerintah desa dan kabupaten serta yang menjadi dasar dan pelaku utama kegiatan adalah masyarakat. Dokumen RPP yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu dokumen yang berisi tentang arahan dan konsep pengembangan kawasan yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat. Dokumen ini diajukan ke BAPPEDA Wonogiri yang telah membentuk tim untuk verifikasi program *Neighbourhood Development*. Selanjutnya tim ini berfungsi untuk menilai seberapa

jauh kesanggupan dan kesiapan Desa Jendi dalam merencanakan arahan pengembangan kawasannya.

6) Penetapan Aturan bersama

Serangkaian Musyawarah dilakukan untuk menyepakati aturan bersama. Hal ini dilakukan supaya aturan-aturan yang dibutuhkan dalam pengembangan teridentifikasi dan disepakati. Kemudian masyarakat menemu kenali berbagai peraturan yang perlu dikompromikan dengan pihak pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan kondisi setempat

c. Perencanaan Lingkungan Mikro

1) Perumusan Kebutuhan Perencanaan Kawasan Prioritas

Serangkaian musyawarah warga masyarakat dalam penentuan kawasan prioritas untuk kemudian dijadikan pilot RTBLnya. Hal ini dilakukan supaya tersusun dan tersepakatinnya rencana pembangunan lingkungan prioritas.



Sumber : dok. ND

Gambar 4.6 Musyawarah Warga Masyarakat dalam Penentuan Kawasan Prioritas

commit to user

2) Survey Kawasan Prioritas

Kegiatan survey ini dilakukan oleh Tenaga ahli Perencana desa dengan didampingi tim fasilitator, sebagai upaya untuk mengetahui dan mengenali kawasan secara detail. Survey yang dilakukan berupa survei data primer dan survei data sekunder. Survei data primer yang dilakukan berupa wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat membantu dalam proses kajian masalah. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa melalui pemahaman-pemahaman masyarakat. Wawancara ini dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, tenaga ahli perencana desa juga melakukan kegiatan observasi lapangan untuk membandingkan permasalahan dan potensi yang di dapat melalui wawancara masyarakat dengan keadaan sebenarnya/ fakta yang terdapat di lapangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan survei juga dilakukan melalui survei sekunder yakni pencarian-pencarian data pendukung bagi perencanaan program *Neighbourhood Development*. Data-data tersebut antara lain :

- Rencana makro yang berkaitan dengan lokasi dilaksanakannya Program *Neighbourhood Development* (RTRW Kabupaten Wonogiri, RDTR Kecamatan Selogiri).
- Peraturan daerah Kabupaten Wonogiri yang terkait dengan tata ruang.
- Data-data kompilasi Desa Jendi (karakteristik wilayah, kependudukan, kegiatan ekonomi, kelembagaan, dan sarana prasarana).

3) Proses Konsultasi Publik dan Review RTBL Kawasan Prioritas (Termasuk Kel. Perempuan dan Kaum Rentan)

Serangkaian musyawarah dengan warga termasuk kaum rentan dan kaum perempuan mengenai kawasan prioritas. Hal ini

dilakukan untuk dapat terjadinya proses transparansi hasil perencanaan agar terjadi dialog antara masyarakat dengan rencana yang sedang disusun. Dan diperoleh masukan konstruktif yang akan menyempurnakan hasil perencanaan.



Sumber : dok. ND

Gambar 4.7 Proses Konsultasi Publik RTBL Kawasan Prioritas

4) Penyepakatan Dokumen RTBL Kawasan Prioritas

Penilaian oleh tim verifikasi BAPPEDA dilakukan pada 3 Agustus 2009. Dalam penilaian ini BKM dan aparat pemerintah desa yang ada di desa Jendi menunjukkan hasil musyawarahnya kepada tim verifikasi BAPPEDA. Hasil musyawarah ini disajikan dalam bentuk presentasi power point yang berupa rencana pengembangan kawasan yang telah disusun oleh TIPP desa Jendi.

commit to user



Sumber : dok.ND

Gambar 4.8 Penyeepakatan Dokumen RTBL Kawasan Prioritas

commit to user

2. Data Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi

a. Hasil Wawancara Pembobotan Bobot Tataran

Pada tabel di bawah ini, merupakan hasil dari metode evaluasi yang dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber, yang meliputi pemerintah desa Jendi, Fasilitator Kelurahan, BKM, TAPP, TIPP, Relawan, dan ass. Urban planner, diperoleh masukan nilai bobot untuk masing-masing tataran dalam tahap pembangunan.

Pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat dalam berpartisipasi:

- Nilai 1 = tidak penting
- Nilai 2 = kurang penting
- Nilai 3 = cukup penting
- Nilai 4 = penting
- Nilai 5 = sangat penting

Tabel 4.7 Hasil Analisis Wawancara Nilai Bobot Tiap Tataran

No	Tataran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Σ	Bobot
1	Ide	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	13%
2	Pengambilan Keputusan	5	4	5	5	5	3	3	3	1	2	3	39	41%
3	Implementasi	3	2	2	4	1	1	2	4	2	3	1	25	26%
4	Evaluasi	2	2	1	2	3	1	2	1	1	3	1	19	20%

Sumber : analisis data

Berdasarkan Tabel maka dapat ditentukan nilai pembobotan pada masing-masing variable tataran, untuk tataran ide nilai pembobotannya sebesar 13%, tataran pengambilan keputusan sebesar 41%, tataran implementasi sebesar 26%, dan tataran evaluasi sebesar 20%. Sehingga dapat diurutkan bahwa nilai pembobotan dari yang paling tinggi berturut-turut adalah : pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi, dan yang paling kecil adalah tataran ide.

commit to user

b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

1) Hasil Uji Validitas Kuesioner

Berikut ini adalah hasil uji validitas dari setiap tataran pada penelitian:

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Tataran Ide

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Partisipan mengikuti kegiatan program PLP-BK (neighbourhood development) sejak awal (penyuluhan/ sosialisasi)	0.515	0.202	Valid
2	Partisipan memahami tujuan program PLP-BK (neighbourhood development)	0.464	0.202	Valid
3	Pengelola proyek memberikan penjelasan cukup kepada partisipan tentang perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan	0.652	0.202	Valid
4	Partisipan memberi usulan tentang jenis prasarana atau sarana yang perlu dibangun	0.643	0.202	Valid
5	Partisipan memberi usulan tentang prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan	0.581	0.202	Valid
6	Partisipan memberi usulan bagaimana kegiatan pembangunan akan dilakukan	0.604	0.202	Valid
7	Partisipan mendapat tanggapan dari pihak program/penyelenggara kegiatan mengenai usulannya	0.587	0.202	Valid
8	Pihak pengelola proyek memberikan kesempatan/waktu yang cukup memadai kepada partisipan untuk memberikan usulan perencanaan dan perancangan komponen yang akan dibangun	0.602	0.202	Valid

Sumber : data analisis

Dari hasil uji validitas dari masing-masing variabel tataran ide tahap perencanaan seperti tercantum dalam tabel di atas. Hasil uji Validitas menunjukkan bahwa semua atribut dalam variabel tataran ide tahap perencanaan mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel, sehingga tolak hipotesa nol dan semua variabel valid sebagai alat ukur.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Tataran Pengambilan Keputusan

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Partisipan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan dan perancangan ini	0.470	0.202	Valid
2	Partisipan hadir dalam pertemuan untuk penyampaian usulan perencanaan dan perancangan prasarana yang akan dibangun	0.560	0.202	Valid
3	Pengaruh ketua RT/RW untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	0.644	0.202	Valid
4	Pengaruh tokoh masyarakat untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	0.585	0.202	Valid
5	Pengaruh pihak kelurahan/kecamatan untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	0.573	0.202	Valid
6	Pengaruh staf proyek/ tenaga ahli pendamping untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	0.620	0.202	Valid
7	Partisipan merasa bermanfaat ikut dalam rapat pengambilan keputusan	0.635	0.202	Valid
8	Partisipan memahami keputusan yang diambil	0.575	0.202	Valid

Sumber : data analisis

Dari hasil uji validitas dari masing-masing variabel tataran pengambilan keputusan tahap perencanaan seperti tercantum dalam tabel di atas. Hasil uji Validitas menunjukkan bahwa semua atribut dalam variabel tataran pengambilan keputusan tahap perencanaan mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel, sehingga tolak hipotesa nol dan semua variabel valid sebagai alat ukur.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Tataran Implementasi

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Partisipan memberi sumbangan dalam perencanaan	0.653	0.202	Valid
2	Partisipan ikut membantu dengan tenaga (ikut bekerja) menyiapkan kegiatan perencanaan	0.650	0.202	Valid
3	Partisipan menyediakan tempat untuk mengadakan kegiatan perencanaan	0.588	0.202	Valid
4	Partisipan mendaftarkan diri sendiri dalam kegiatan program	0.682	0.202	Valid
5	Darimana partisipan mengetahui lokasi yang akan menjadi prioritas program PLP-BK (neighbourhood development)	0.660	0.202	Valid
6	Darimana partisipan mengetahui prasarana/sarana yang akan menjadi prioritas program PLP-BK (neighbourhood development)	0.578	0.202	Valid
7	Kesesuaian sumbangan partisipan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya	0.486	0.202	Valid

Sumber : data analisis to user

Dari hasil uji validitas dari masing-masing variabel tataran implementasi tahap perencanaan seperti tercantum dalam tabel di atas. Hasil uji Validitas menunjukkan bahwa semua atribut dalam variabel tataran implementasi tahap perencanaan mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel, sehingga tolak hipotesa nol dan semua variabel valid sebagai alat ukur.

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Tataran Evaluasi

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Partisipan mengikuti pengambilan keputusan perencanaan program PLP-BK (neighbourhood development)	0.631	0.202	Valid
2	Partisipan mengetahui kepada siapa usulan perbaikan disampaikan	0.464	0.202	Valid
3	Partisipan merasa bermanfaat ikut dalam kegiatan penilaian (evaluasi) perencanaan ini	0.521	0.202	Valid
4	Pengaruh ketua RT/RW untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	0.571	0.202	Valid
5	Pengaruh tokoh masyarakat untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	0.542	0.202	Valid
6	Pengaruh pihak kelurahan/kecamatan untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	0.627	0.202	Valid
7	Pengaruh staf pemerintah/proyek untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	0.630	0.202	Valid
8	Partisipan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan berupa koreksi atau saran-saran perbaikan	0.607	0.202	Valid
9	Pihak pengelola proyek memberi kesempatan yang cukup kepada partisipan untuk melakukan penilaian (evaluasi) atas perencanaan dan perancangan komponen yang akan dibangun	0.589	0.202	Valid
10	Partisipan puas dengan kegiatan penilaian (evaluasi) perencanaan ini	0.502	0.202	Valid

Sumber : data analisis

Dari hasil uji validitas dari masing-masing variabel tataran evaluasi tahap perencanaan seperti tercantum dalam tabel di atas. Hasil uji Validitas menunjukkan bahwa semua atribut dalam variabel tataran evaluasi tahap perencanaan mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel, sehingga tolak hipotesa nol dan semua variabel valid sebagai alat ukur.

commit to user

2) Hasil Uji Realibilitas

Dalam penelitian ini hasil uji reliabilitasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas

No	Tataran	Nilai Reliabilitas	R tabel	Keterangan
1	Ide	0.718	0,600	Reliabel
2	Pengambilan Keputusan	0.722	0,600	Reliabel
3	Implementasi	0.725	0,600	Reliabel
4	Evaluasi	0.762	0,600	Reliabel

Sumber : data analisis

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa seluruh tataran merupakan alat ukur yang reliabel, karena nilai reliabilitas > R tabel.

c. Data Hasil Kuesioner Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berikut ini adalah data hasil kuesioner (skoring) pada 32 RT yang tersebar di desa Jendi yang terbagi dalam 4 tataran evaluasi.

1) Tataran Ide

Dalam tataran ide tahap perencanaan yang terdiri dari delapan item pernyataan dengan responden sebanyak 96 orang dengan dua opsi pilihan yang pada tiap opsi mempunyai skor ; a) skor pada opsi ini adalah satu, dan b) skor pada opsi ini adalah nol. Hasil rekapitulasi data penyebaran kuesioner dapat dilihat sebagai berikut:

commit to user

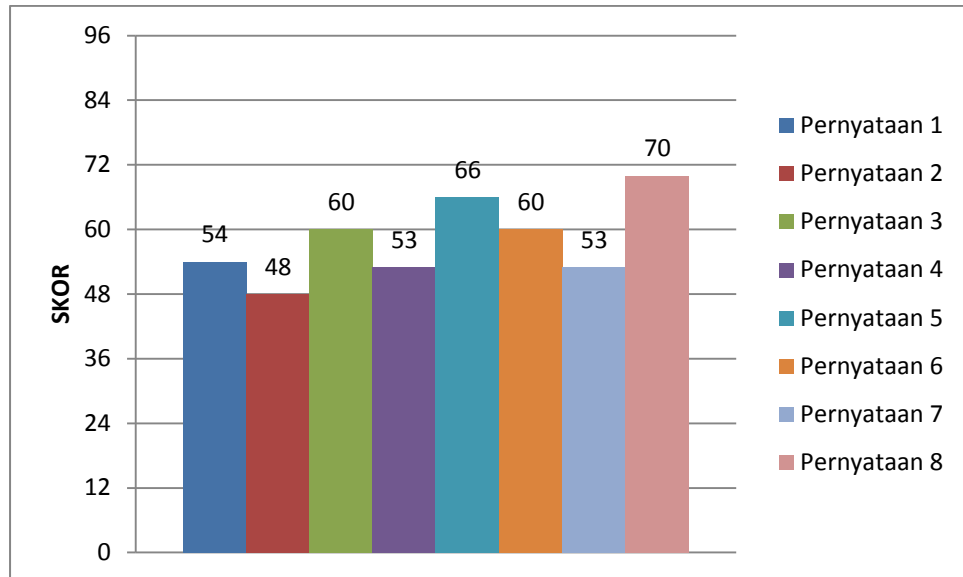
Tabel 4.13 Hasil Kuesioner Tataran Ide

No	Pernyataan	Skor	Persentase	Bobot
1	Partisipan mengikuti kegiatan program PLP-BK (neighbourhood development) sejak awal (penyuluhan/ sosialisasi)	54	56.3%	60.42
2	Partisipan memahami tujuan program PLP-BK (neighbourhood development)	48	50.0%	
3	Pengelola proyek memberikan penjelasan cukup kepada partisipan tentang perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan	60	62.5%	
4	Partisipan memberi usulan tentang jenis prasarana atau sarana yang perlu dibangun	53	55.2%	
5	Partisipan memberi usulan tentang prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan	66	68.8%	
6	Partisipan memberi usulan bagaimana kegiatan pembangunan akan dilakukan	60	62.5%	
7	Partisipan mendapat tanggapan dari pihak program/penyelenggara kegiatan mengenai usulannya	53	55.2%	
8	Pihak pengelola proyek memberikan kesempatan/waktu yang cukup memadai kepada partisipan untuk memberikan usulan perencanaan dan perancangan komponen yang akan dibangun	70	72.9%	
Jumlah		464		13%
Rata-rata Score		58		

Sumber : analisis data

Dari Tabel dapat diketahui bahwa masyarakat desa Jendi menyetujui bahwa pihak pengelola proyek telah memberikan waktu yang cukup memadai kepada masyarakat untuk memberikan usulan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat skor 70 (70 responden menjawab opsi A) skor tertinggi dari delapan butir pertanyaan, namun pemahaman masyarakat pada tujuan dari program PLP-BK (Neighbourhood Development) kurang begitu memahaminya, hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat skor 48 (paling rendah diantara delapan butir pernyataan) atau 50% dari jumlah sample menyetujuinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari diagram berikut ini :

commit to user



Sumber : analisis data

Gambar 4.9 Diagram Distribusi Skoring Tataran Ide

2) Tataran Pengambilan Keputusan

Dalam tataran pengambilan keputusan tahap perencanaan yang terdiri dari delapan item pernyataan dengan responden sebanyak 96 orang dengan dua opsi pilihan yang pada tiap opsi mempunyai skor ; a) skor pada opsi ini adalah satu, dan b) skor pada opsi ini adalah nol. Dari hasil rekapitulasi data penyebaran kuesioner dapat dilihat sebagai berikut:

commit to user

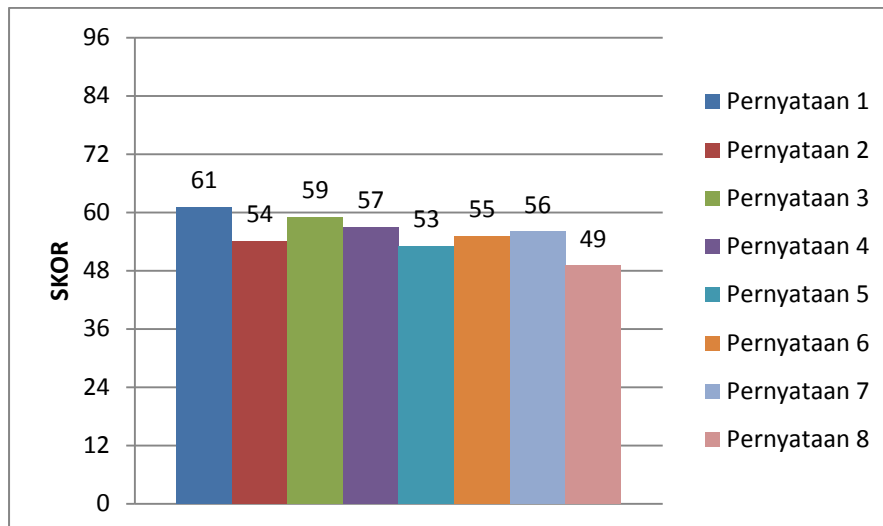
Tabel 4.14 Hasil Kuesioner Tataran Pengambilan Keputusan

No	Pernyataan	Skor	Persentase	Bobot
1	Partisipan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan dan perancangan ini	61	63,50%	57,81
2	Partisipan hadir dalam pertemuan untuk penyampaian usulan perencanaan dan perancangan prasarana yang akan dibangun	54	56,30%	
3	Pengaruh ketua RT/RW untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	59	61,50%	
4	Pengaruh tokoh masyarakat untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	57	59,40%	
5	Pengaruh pihak kelurahan/kecamatan untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	53	55,20%	
6	Pengaruh staf proyek/ tenaga ahli pendamping untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun	55	57,30%	
7	Partisipan merasa bermanfaat ikut dalam rapat pengambilan keputusan	56	58,30%	
8	Partisipan memahami keputusan yang diambil	49	51,00%	
Jumlah		444		41%
Rata-rata Score		55,5		

Sumber : analisis data

Dari hasil pengolahan data kuesioner di lapangan dapat diketahui bahwa : Masyarakat mempunyai pengaruh dalam Pengambilan Keputusan tahap perencanaan partisipatif di Desa Jendi, hal ini dapat dilihat dari skor pernyataan yang mencapai 61 (64% dari total responden setuju) dan yang dianggap mempunyai pengaruh paling besar adalah ketua RT/RW dengan skor 57. Namun dalam tataran pengambilan keputusan masyarakat cenderung kurang dalam pemahaman hasil keputusan yang diambil, skor pernyataan tersebut adalah 49, paling rendah dalam tataran pengambilan keputusan. Lebih jelas dapat ditampilkan dalam diagram berikut ini :

commit to user



Sumber : analisis data

Gambar 4.10 Diagram distribusi skoring Tataran Pengambilan Keputusan

3) Tataran Implementasi

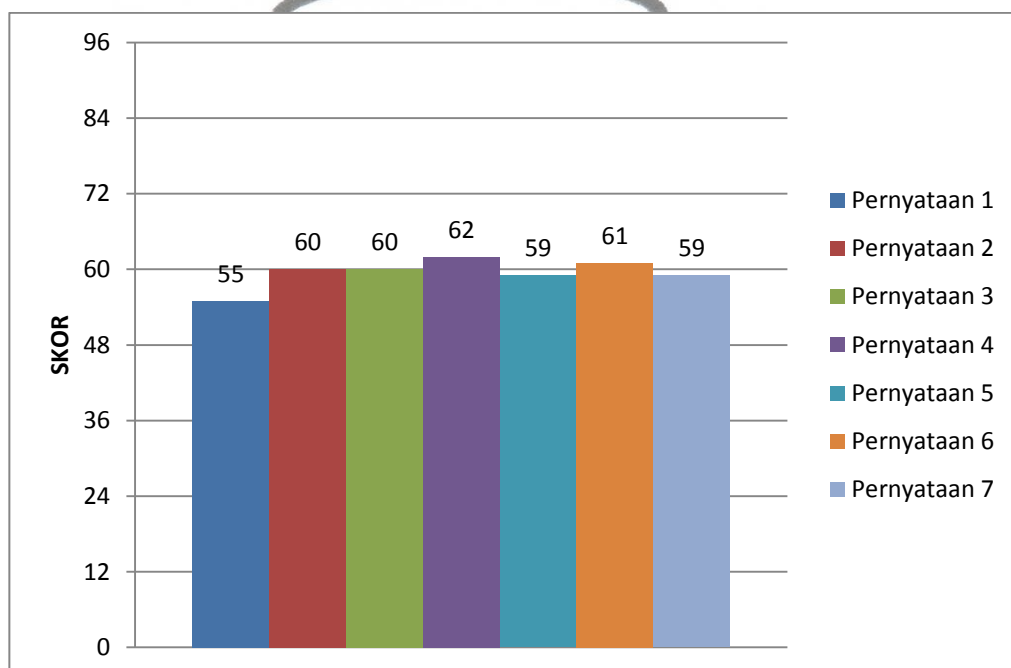
Dalam tataran implementasi tahap perencanaan yang terdiri dari tujuh item pernyataan dengan responden sebanyak 96 orang dengan dua opsi pilihan yang pada tiap opsi mempunyai skor ; a) skor pada opsi ini adalah satu, dan b) skor pada opsi ini adalah nol. Dari hasil rekapitulasi data penyebaran kuesioner dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Kuesioner Tataran Implementasi

No	Pernyataan	Skor	Persentase	Bobot
1	Partisipan memberi sumbangan dalam perencanaan	55	57,30%	61,9
2	Partisipan ikut membantu dengan tenaga (ikut bekerja) menyiapkan kegiatan perencanaan	60	62,50%	
3	Partisipan menyediakan tempat untuk mengadakan kegiatan perencanaan	60	62,50%	
4	Partisipan mendaftarkan diri sendiri dalam kegiatan program	62	64,60%	
5	Darimana partisipan mengetahui lokasi yang akan menjadi prioritas program PLP-BK (neighbourhood development)	59	61,50%	
6	Darimana partisipan mengetahui prasarana/sarana yang akan menjadi prioritas program PLP-BK (neighbourhood development)	61	63,50%	
7	Kesesuaian sumbangan partisipan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya	59	61,50%	
Jumlah		416		26%
Rata-rata Score		59,43		

Sumber : analisis data

Dari hasil pengolahan data kuesioner di lapangan dapat diketahui bahwa : Masyarakat telah mengetahui adanya kegiatan perencanaan program dari masyarakat itu sendiri bukan dari pihak yang lain. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang memperoleh skor tertinggi dengan 62. Namun dalam hal sumbangan sumber daya masyarakat desa Jendi masih kurang, karena berdasar kuesioner pernyataan ini memperoleh skor terendah 55. Lebih jelas dapat ditampilkan dalam diagram berikut ini :



Sumber : analisis data

Gambar 4.11 Diagram Distribusi Skoring Tataran Implementasi

4) Tataran Evaluasi

Dalam tataran evaluasi tahap perencanaan yang terdiri dari sepuluh item pernyataan dengan responden sebanyak 96 orang dengan dua opsi pilihan yang pada tiap opsi mempunyai bobot ; a) bobot pada opsi ini adalah satu, dan b) bobot pada opsi ini adalah nol. Dari hasil rekapitulasi data penyebaran kuesioner dapat dilihat sebagai berikut:

commit to user

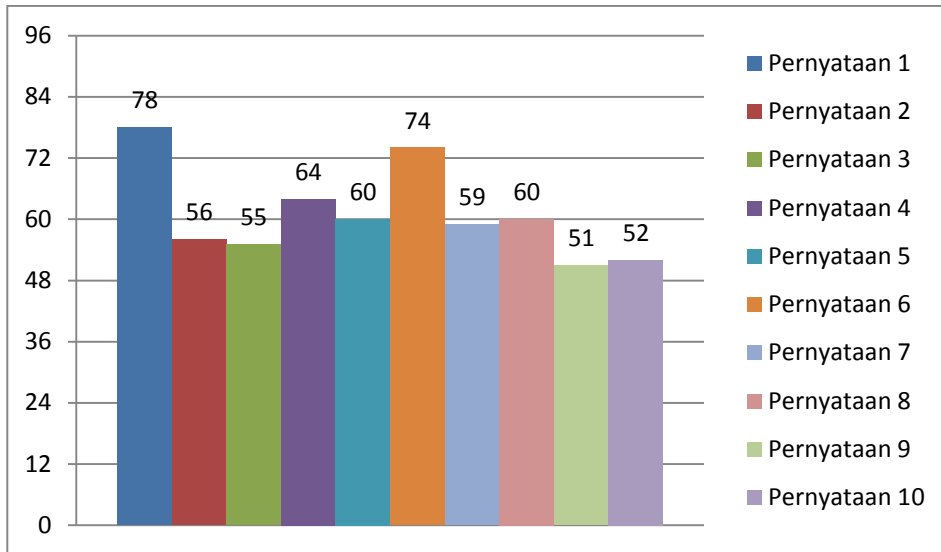
Tabel 4.16 Hasil Kuesioner Tataran Evaluasi

No	Pernyataan	Skor	Persentase	Bobot
1	Partisipan mengikuti pengambilan keputusan perencanaan program PLP-BK (neighbourhood development)	78	81,30%	63,44
2	Partisipan mengetahui kepada siapa usulan perbaikan disampaikan	56	58,30%	
3	Partisipan merasa bermanfaat ikut dalam kegiatan penilaian (evaluasi) perencanaan ini	55	57,30%	
4	Pengaruh ketua RT/RW untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	64	66,70%	
5	Pengaruh tokoh masyarakat untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	60	62,50%	
6	Pengaruh pihak kelurahan/kecamatan untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	74	77,10%	
7	Pengaruh staf pemerintah/proyek untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi	60	62,50%	
8	Partisipan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan berupa koreksi atau saran-saran perbaikan	59	61,50%	
9	Pihak pengelola proyek memberi kesempatan yang cukup kepada partisipan untuk melakukan penilaian (evaluasi) atas perencanaan dan perancangan komponen yang akan dibangun	51	53,10%	
10	Partisipan puas dengan kegiatan penilaian (evaluasi) perencanaan ini	52	54,20%	
Jumlah		609		20%
Rata-rata Score		60,9		

Sumber : analisis data

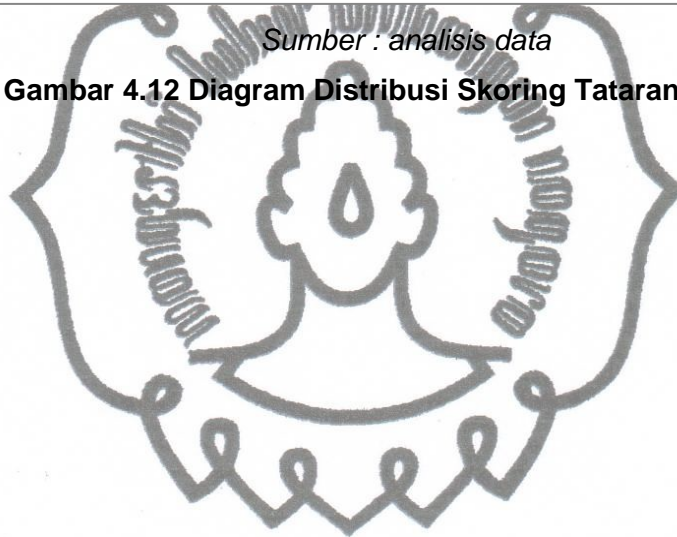
Dari data kuesioner di lapangan dapat diketahui : Masyarakat desa Jendi sangat aktif dalam kegiatan pengambilan keputusan, hal ini dapat dilihat dari 78 responden yang menyatakan mengikuti pengambilan keputusan perencanaan program. Namun berlawanan dengan pihak pengelola proyek yang menurut masyarakat kurang memberi kesempatan yang cukup untuk melakukan penilaian dengan skor terendah 51. Seperti dalam diagram berikut ini :

commit to user



Sumber : analisis data

Gambar 4.12 Diagram Distribusi Skoring Tataran Evaluasi



commit to user

BAB V PEMBAHASAN

A. Pembahasan Proses Partisipasi di Desa Jendi

1. Evaluasi Partisipasi Desa Jendi

Untuk mengukur/ mengevaluasi kinerja partisipasi dalam pembangunan, maka perlu diketahui siapa saja yang terlibat dalam partisipasi, dalam tataran apa dan dengan cara bagaimana. *Cohen* menyebutkannya sebagai pengungkapan dari siapa yang berpartisipasi, dalam kegiatan apa saja, dan bagaimana partisipasi itu dilakukan (*Cohen & Uphoff, 1977* dalam Kusumastuti, 2004).

Proses perencanaan partisipatif di Desa Jendi sendiri sudah menerapkan teori *Neighbourhood Development* dalam pelaksanaan di lapangan, walaupun dalam prakteknya pelaksanaan partisipatif di Desa Jendi tidak sepenuhnya sama pada pedoman pelaksanaan. Berikut ini adalah pengukuran kinerja partisipatif di Desa Jendi :

a. Tataran Partisipasi

Partisipasi di Desa Jendi dalam program *Neighbourhood Development* mencakup 4 (empat) tataran, yaitu: 1) ide/gagasan, 2) pengambilan keputusan, 3) implementasi/pelaksanaan dan 4) evaluasi yang dilakukan pada tiap tahapannya. Siklus dari program *Neighbourhood Development* sendiri terdiri dari tahapan persiapan, tahapan perencanaan partisipatif, tahapan pemasaran kawasan prioritas, dan tahap pelaksanaan pembangunan. Saat ini pelaksanaan program *Neighbourhood Development* di Desa Jendi masih berlangsung dalam tahap pemasaran kawasan prioritas. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program (partisipasi) telah dimulai dari tahap persiapan. Keterlibatan masyarakat ini akan berlangsung dari tahap awal hingga akhir program. Produk fisik dari program *Neighbourhood Development* ini juga akan menjadi tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan maupun perawatannya, karena hal ini sesuai dengan tujuan dari program yaitu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, produktif, berjatidiri dan berkelanjutan (lestari).

Khusus kegiatan perencanaan partisipatif di Desa Jendi sendiri dibagi dalam tiga tahapan kegiatan, yaitu : (1) persiapan perencanaan partisipatif (sosialisasi), dalam tahapan kegiatan ini diadakan kegiatan-kegiatan berupa lomba-lomba maupun musyawarah warga yang di dalamnya telah disisipkan pemahaman akan program, sehingga cukup untuk dapat menggali potensi dan masalah Desa Jendi sendiri; (2) perencanaan lingkungan makro, dalam tahapan ini dihasilkan suatu dokumen perencanaan (RPP) berdasarkan pemikiran dan keputusan bersama tim TIPP dan masyarakat Desa Jendi; (3) perencanaan lingkungan mikro, dalam tahapan kegiatan ini dihasilkan suatu dokumen RTBL Desa dan juga penetapan kawasan prioritas serta detailnya.

b. Partisipan

Semua pihak yang terlibat dan atau terkena pengaruh pembangunan, baik penerima manfaat atau penerima resiko atau terkena pengaruh oleh adanya perubahan karena adanya program pembangunan dilakukan. Di Desa Jendi terdapat tiga kelompok *stakeholders* menurut indikator keberhasilan program *Neighbourhood Development*, yaitu: (1) pelibatan kaum perempuan dalam perencanaan.; (2) pelibatan tokoh setempat di Desa Jendi yang dianggap mempunyai pengaruh di masyarakat (baik karena jabatannya,maupun tokoh agama); (3) pelibatan kaum rentan dalam program *Neighbourhood Development*.

Di Desa Jendi sebagai penerima pilot-project program *Neighbourhood Development* peran fasilitator sangat penting dalam pengadaan rapat-rapat yang mempertemukan semua stakeholder program, selain perannya yang juga sebagai pen jembatan antara pemerintah dengan tenaga ahli pendamping maupun masyarakatnya. Pemimpin lokal seperti ketua RT sendiri juga sangat berperan dalam mempengaruhi masyarakat untuk menerima atau memahami tentang pihak penerima kawasan prioritas, sehingga tidak terjadi kecemburuan antar wilayah penerima kawasan prioritas dengan yang tidak menerimanya. Karena prioritas kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi percontohan pada seluruh wilayah di Desa Jendi untuk pengembangannya.

Keterlibatan pelaku (unsur masyarakat) dalam tiap kegiatan program *Neighbourhood Development* dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Kegiatan Perencanaan Partisipatif dan Pelaku yang Terlibat di Desa Jendi

No.	Tahapan	Kegiatan	Pelaku yang terlibat		Unsur	
			L	P		
1	Sosialisasi	Lomba Pembuatan Maket Tingkat Dusun	63	29	Masyarakat	
		Lomba Kebersihan tingkat Dusun	320	172	Masyarakat	
		Lomba Pembuatan Baliho	15	9	Masyarakat	
		Pembimbingan Pembuatan Maket Tiap Dusun	46	28	Karang taruna	
		Penilaian Lomba	23	10	TIPP	
					BKM	
					Pemdes	
					Relawan	
		Koordinasi dengan TIPP, Pemdes dan BKM	14	3	TIPP	
					BKM	
Pemdes						
Relawan						
FGD Maket dusun Jetak	6	3	Karang taruna			
FGD Maket dusun Kadipaten	7	1	Karang taruna			
FGD Maket dusun Geran	4	3	Karang taruna			
2	Penyusunan RPP (Perencanaan Lingkungan Makro)	Konsultasi teknis dengan Bappeda	3	1	Pemerintah daerah	
		Pemaparan RPP yang telah di buat TAPP	24	4	TIPP	
					BKM	
					Pemdes	
					Relawan	
		Koordinasi dengan TIPP, Pemdes dan BKM	7	2	TIPP	
					BKM	
					Pemdes	
					Relawan	
		Rakor dengan Bappeda	9	6	TIPP	
BKM						
Pemdes						
Bappeda						
Koordinasi dengan TIPP dan BKM	14	3	Karang taruna			
			Presentasi RPP DI Bappeda	43	12	TIPP
						BKM
						Pemdes
Relawan						
Sosialisasi RPP tingkat basis	140	65	TIPP			
			BKM			
			Pemdes			
			Relawan			
			Masyarakat			

No.	Tahapan	Kegiatan	Pelaku yang terlibat		Unsur
			L	P	
3	Penyusunan RTBL (Perencanaan Lingkungan Mikro)	Penyepakatan kegiatan dan kawasan Prioritas	140	65	TIPP BKM Pemdes Relawan Masyarakat
		Lokakarya Aturan Bersama tingkat Desa dan Penentuan kawasan prioritas	38	14	TIPP BKM Pemdes Relawan Masyarakat
		Survei sekilas lokasi prioritas	2	1	TAPP Fasilitator
		Koordinasi dengan Bappeda	3	1	Tim Teknis Ass Urban TAPP Fasilitator
		Koordinasi dengan TIPP, BKM dan Pemdes	4	2	TIPP BKM TAPP Pemdes Pendamping
		Pemaparan RTBL didepan TIM Teknis	31	16	Tim Teknis TIPP BKM TAPP Pemdes Pendamping
		Jumlah total kehadiran	956	450	

Sumber : Hasil Wawancara

Dari tabel kegiatan partisipasi serta unsur yang terlibat di dalamnya dari jumlah total semua kegiatan pada perencanaan partisipatif masih sangat didominasi oleh kaum lelaki yang berjumlah total 956, sedangkan kaum perempuan hanya berjumlah 450 pada total semua kegiatan. Namun jumlah keterlibatan kaum perempuan sudah melampaui indikator hasil yang menargetkan keterlibatan 40% kaum perempuan (47% dari total seluruh kegiatan dalam prakteknya). Keterlibatan kaum rentan juga melebihi 40% pada tiap pertemuan khusus untuk kaum rentan sendiri, sedangkan keterlibatan tokoh masyarakat hampir melebihi 30% setiap kegiatan perencanaan di Desa Jendi. Keterlibatan masyarakat paling banyak pada saat kegiatan pemetaan swadaya, yaitu pada saat kegiatan lomba-lomba Desa. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam tahap

penyusunan RPP maupun RTBL relatif kecil. Jumlah keterlibatan masyarakat yang terbesar pada tahap penyusunan dokumen RPP adalah pada kegiatan sosialisasi RPP yang telah selesai dibuat oleh TAPP Desa Jendi. Sedangkan pada tahap penyusunan RTBL keterlibatan masyarakat terbesar pada saat penyepakatan kegiatan prioritas dan penyepakatan aturan bersama. Dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan dokumen RPP dan RTBL Desa Jendi masih sangat bergantung pada pemikiran dari TAPP sendiri. Sedikitnya masyarakat yang terlibat setelah kegiatan pemetaan swadaya yang berupa lomba-lomba dimungkinkan karena kurangnya koordinasi dalam menggerakkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan setelah pemetaan swadaya.

c. Cara Partisipasi

Untuk menganalisis bagaimana partisipasi berlangsung, berdasarkan variabel yang harus diperhatikan (*Cohen & Uphoff*, 1977 dalam Kusumastuti, 2004) adalah: (1) dorongan untuk berpartisipasi di Desa Jendi sendiri sudah diterapkan sejak awal Desa Jendi ditetapkan sebagai penerima program. Predikat sebagai Desa pilot project atau percontohan bagi Desa lainnya menjadikan dorongan pada masyarakat Desa untuk memberikan yang terbaik pada pelaksanaan program; (2) partisipasi di Desa Jendi sendiri merupakan kegiatan sukarela masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan perencanaannya, tidak ada unsur paksaan dari pihak penyelenggara program; (3) struktur/pola organisasi pada pelaksanaan program di Desa Jendi telah ditentukan dengan adanya pembentukan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) serta bantuan dari BKM dan relawan-relawan yang dibagi ke dalam pokja-pokja sesuai kebutuhan perencanaan, sehingga pola organisasi di Desa Jendi cukup jelas pembagiannya; (4) waktu berpartisipasi dilakukan secara terus menerus/ berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan perencanaan; (5) pemberdayaan di Desa Jendi sendiri cukup efektif dalam mengakomodir masyarakat dalam tiap tahapan ataupun kegiatan partisipatif di Desa Jendi.

commit to user

d. Lingkup dan Intensitas Partisipasi

Lingkup dan intensitas partisipasi ini dapat terlihat dalam proses perencanaan partisipatif yang dalam penjangkauan aspirasi, ide masyarakat melalui berbagai kegiatan perlombaan. Seperti lomba kegiatan bersih Desa dan lomba pembuatan baliho dimana dalam lomba tersebut oleh pihak pengelola proyek disisipi sosialisasi atau pengenalan program *Neighbourhood Development*. Serta lomba maket Desa yang masyarakat secara tidak langsung memetakan potensi serta masalah fisik yang ada di wilayahnya masing-masing untuk kemudian dapat menjadi acuan tenaga ahli perencana Desa dalam mengumpulkan data-data pemetaan swadaya. Intensitas kegiatan di Desa Jendi sendiri cukup tinggi dalam menggali potensi masyarakat Desa.

e. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi di Desa Jendi adalah bentuk partisipasi langsung dan melalui pola organisasi formal dengan dibentuknya panitia-panitia kegiatan perencanaan partisipatif.

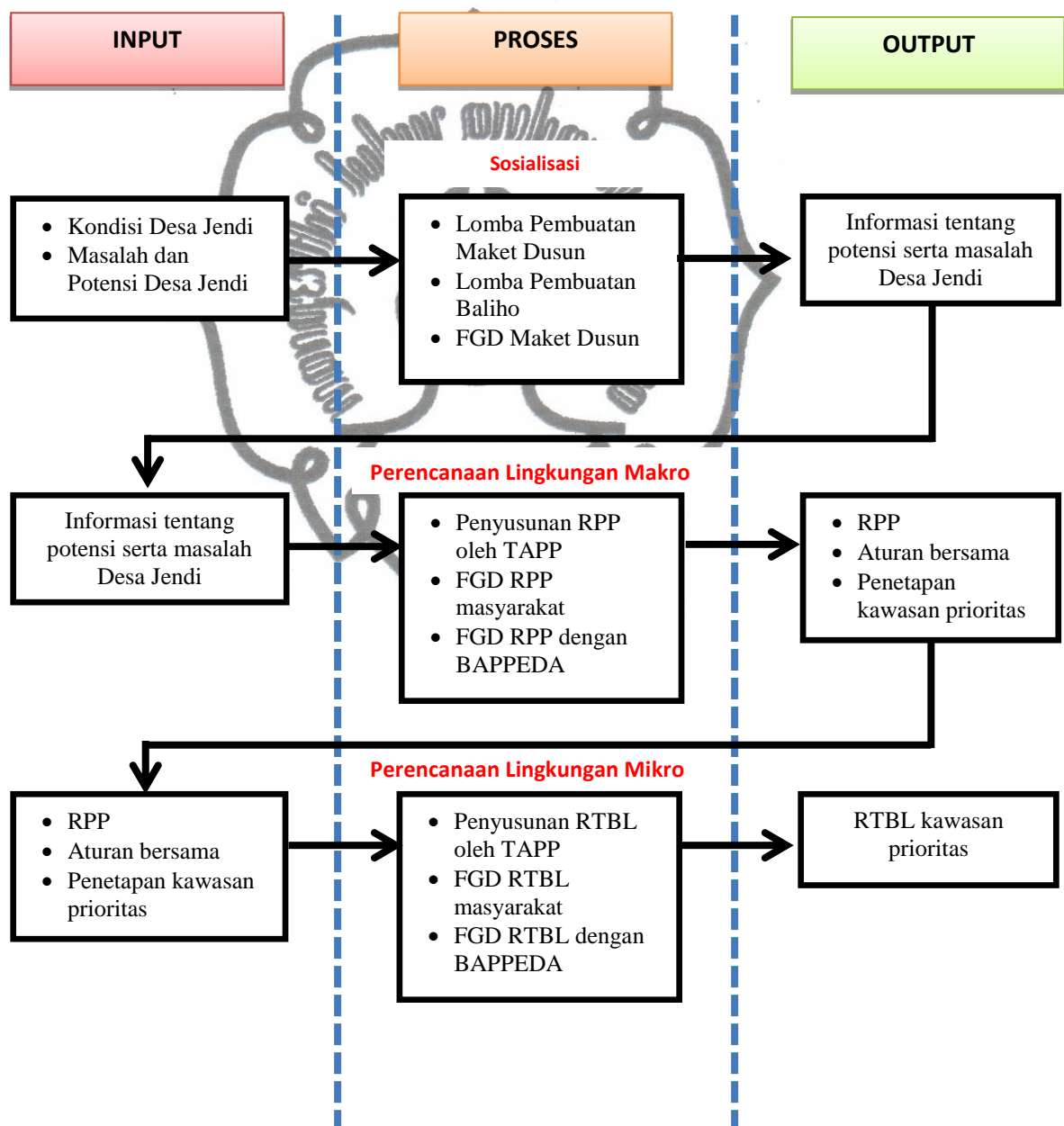
f. Efektivitas Partisipasi

Dalam Kusumastuti (2004) dijelaskan, bahwa partisipan mungkin saja tidak meningkatkan kemampuannya secara individu, tetapi 'iklim' pengambilan keputusan yang diciptakan sedemikian rupa sehingga partisipan mempunyai kesempatan cukup untuk didengar dan diikuti kehendaknya. Dengan kata lain ada semacam pemberian atau penyerahan 'kekuasaan' dari pihak pemerintah, ke partisipan atau masyarakat. Dengan adanya 'penyerahan kekuasaan', maka masyarakat yang menjadi subjek pembangunan dapat secara efektif berpartisipasi.

Di Desa Jendi sendiri masyarakat diberi keleluasaan dalam segala aspek perencanaan Desa Jendi. Keberadaan pemerintah sebagai penyedia program juga lebih cenderung pada teknis pelaksanaan program, sehingga proses partisipasi dalam masyarakat kurang begitu mendapat perhatian. Pemerintah cenderung melihat hasil akhirnya yang berupa dokumen perencanaan dan cenderung melihat sistematika dokumen untuk dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang ada

(dibuat konsultan). Masyarakat sendiri menyerahkan semua sistematika penulisan kepada TAPP sehingga kurang begitu ada masukan dalam hal revisi. Sehingga kurangnya sinkronisasi hasil antara pemerintah langsung ke masyarakat. Hanya pada pemerintah dengan TAPP Desa Jendi. Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat kurang efektif dalam penyusunan rencana Desa.

Gambar 5.1 Kerangka Proses Kegiatan Partisipatif Desa Jendi



Sumber : data analisis

commit to user

2. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Perencanaan dalam Program *Neighbourhood Development* dengan Pedoman ND

Berikut ini adalah tabel kesesuaian antara kegiatan program nyata di lapangan dengan pedoman teknis pelaksanaan program :

Tabel 5.2 Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan ND pada Tahap Perencanaan dengan Pedoman ND

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil	Kesesuaian		Keterangan
				Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif (sosialisasi)	pelatihan tentang perekrutan tenaga pendamping	BKM, Kades, dan Pemda memiliki kesamaan konsep perekrutan TA	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		proses perekrutan Tenaga Pendamping (TA PLP)	Penandatanganan kontrak TA	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		serangkaian kegiatan sosialisasi masyarakat terhadap berbagai aspek teknik, administrasi dan hukum dalam pengembangan permukiman	Masyarakat memahami berbagai hal yang terkait dengan ; perencanaan ruang, mitigasi bencana, RTBL, pengamanan sosial & lingkungan, perijinan pembangunan	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		bimbingan dan penguatan UP-UP dan BKM / LKM	Penjelasan pentingnya peningkatan UP-UP di Desa Jendi	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
2	Perencanaan Lingkungan Makro	review perencanaan (tk. Kelurahan & Kabupaten. Merupakan serangkaian kegiatan peninjauan ulang berbagai dokumen perencanaan yang menyangkut dengan <i>Neighbourhood Development</i>	terjadi persamaan persepsi pemahaman substansi perencanaan	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil	Kesesuaian		Keterangan
				Sesuai	Tidak Sesuai	
2	Perencanaan Lingkungan Makro	Pemetaan swadaya	berbagai permasalahan dan potensi wilayah dapat dikenali dan dirumuskan		√	Pemetaan swadaya di Desa Jendi dilakukan melalui kegiatan lomba-lomba, seperti lomba pembuatan maket dusun, pembuatan baliho, serta lomba bersih Desa dalam penggalan potensi dan masalah selain melalui forum FGD
		Serangkaian musyawarah perumusan kebutuhan bersama termasuk dengan pertemuan khusus dengan perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk perencanaan ruang dan lingkungan kelurahan	Kebutuhan bersama pembangunan sebagai hasil analisis survei swadaya teridentifikasi dan terumuskan	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		serangkaian musyawarah penyusunan aturan bersama termasuk pertemuan khusus dengan perempuan dan klp rentan	aturan-aturan yang dibutuhkan dalam pengembangan lingkungan permukiman teridentifikasi dan disepakati		√	pelaksanaan pada saat RPP telah selesai(dalam tahap RTBL)
		serangkaian musyawarah penyusunan rencana pengembangan permukiman kelurahan	rencana pengembangan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersusun		√	Pelaksanaan kegiatan digabungkan dalam satu kegiatan FGD Desa yang mencakup dua kegiatan ini
		proses konsultasi publik dan review rencana pengembangan permukiman kelurahan termasuk pertemuan khusus dengan perempuan & klp rentan	diperoleh masukan konstruktif yang akan menyempurnakan hasil perencanaan		√	
		penyepakatan dokumen rencana pengembangan permukiman kelurahan	RPP disepakati semua pihak terkait	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		sosialisasi rencana pengembangan permukiman kelurahan di masyarakat	mampu mensosialisasikan rencana pembangunan lingkungan di tingkat masyarakat	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil	Kesesuaian		Keterangan
				Sesuai	Tidak Sesuai	
3	Perencanaan Lingkungan Mikro	perumusan kebutuhan perencanaan kawasan prioritas	masyarakat mampu menetapkan lingkungan prioritas yang akan dibangun	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan prioritas	tersusun dan tersepakatinnya rencana pembangunan prioritas		√	Penyusunan hanya melibatkan TAPP, masyarakat serta pihak lain hanya menyepakati dokumen yang telah tersusun
		penyusunan rencana detail sub proyek yang terpilih untuk segera dibangun	DTPL sub proyek terpilih selesai disusun	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		proses konsultasi publik dan review RTBL kawasan prioritas dan rencana detail sub proyek terpilih termasuk pertemuan khusus dengan perempuan & klp rentan	adanya transparansi hasil perencanaan, diperoleh masukan yang konstruktif	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		penyepakatan dokumen RTBL kawasan prioritas	dihasilkan RTBL yang disepakati pihak terkait	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
		sosialisasi RTBL kawasan prioritas di masyarakat	tersosialisasi rencana pembangunan lingkungan prioritas di tingkat masyarakat	√		Sudah sesuai pedoman pelaksanaan
jumlah		18		13	5	
Persentase				72%	28%	

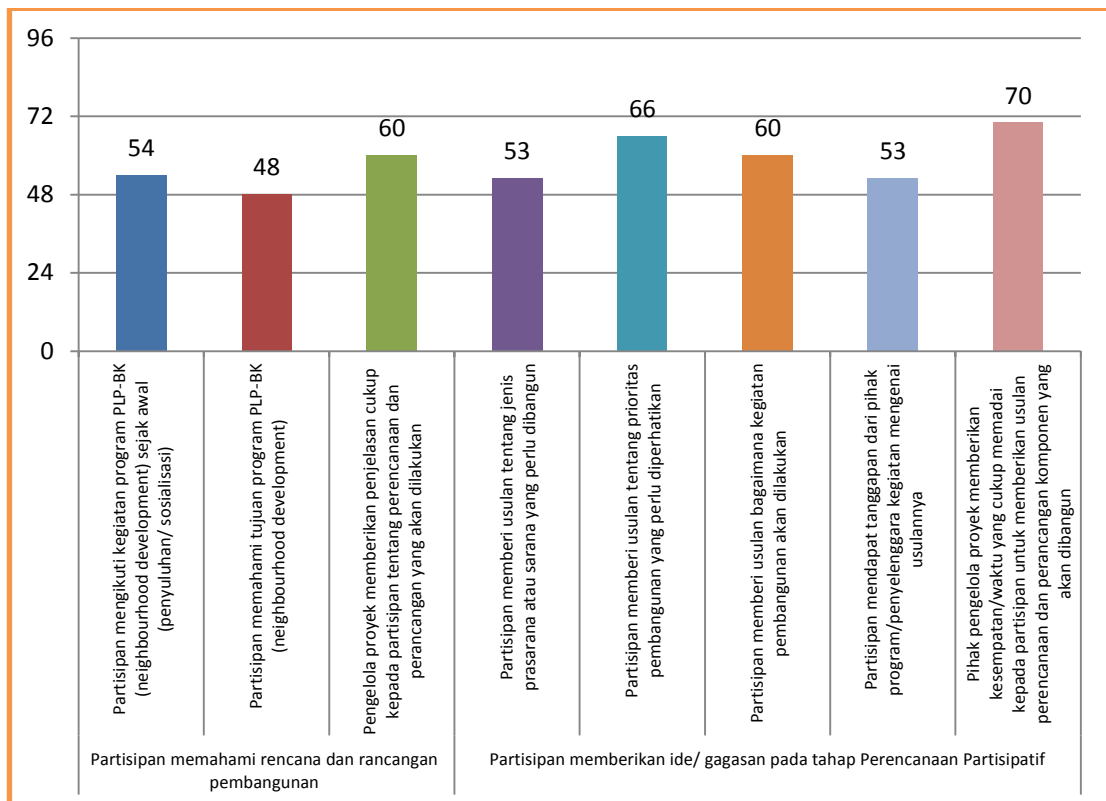
Sumber : data analisis

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tahapan persiapan proses perencanaan partisipatif telah 100% sesuai dengan pedoman, karena seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam pedoman telah diterapkan/ dilaksanakan pada program *Neighbourhood Development* di Desa Jendi. Sedangkan pada tahapan perencanaan lingkungan makro, dari 8 kegiatan yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan 50% telah sesuai dengan pedoman. Hal ini dikarenakan penyesuaian jenis kegiatan yang dilakukan dengan kondisi masyarakat di Desa Jendi serta penyesuaian waktu kegiatan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, namun secara garis besar pelaksanaan telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Sedangkan dalam tahapan perencanaan lingkungan mikro, dari 6 kegiatan di lapangan, 83,33 % telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, pelibatan partisipasi masyarakat kurang begitu efektif dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan prioritas, sehingga terlihat masyarakat begitu tergantung dengan Tenaga ahli perencana Desa.

commit to user

B. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi

1. Tataran Ide



Sumber : data analisis

Gambar 5.2 Diagram Pembobotan Tataran Ide

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran ide masyarakat telah memahami rencana dan rancangan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari tiga sub-indikator dengan nilai paling rendah 48. Dari pernyataan sub-indikator yang paling tinggi nilainya, dapat diketahui bahwa pihak pengelola proyek telah memberikan penjelasan cukup tentang perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan dengan nilai 60. Sedangkan 54 responden menyatakan mengikuti kegiatan program tetapi hanya 48 responden yang memahami tujuan program. Maka dapat disimpulkan dalam kegiatan proses perencanaan partisipatif di Desa Jendi yang menggunakan media-media berupa kegiatan yang melibatkan masyarakat cukup menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi, namun dalam pemahaman akan tujuan dari program yang disisipkan dalam

commit to user

kegiatan kurang begitu maksimal dengan hanya memperoleh nilai partisipasi sedang dari masyarakat (48).

Sedangkan untuk indikator pemberian ide/ gagasan dari masyarakat dalam perencanaan partisipatif cukup tinggi, hal ini dilihat dari nilai tingkat partisipasi masyarakat dengan nilai antara (53) sampai dengan (70). Kecondongan tertinggi adalah pada pernyataan kemauan dari pengelola proyek untuk menerima usulan perencanaan dengan nilai (70) dan kemauan masyarakat dalam memberikan usulan tentang prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan dengan nilai (66). Persentase masyarakat yang cukup tinggi pada pernyataan tersebut cukup bisa dipahami, karena pada proses partisipatif yang telah dilakukan sebelumnya pemerintah melalui pihak pelaksana proyek telah melakukan penjangkaran aspirasi melalui proses FGD pada tiap-tiap dusun di Desa Jendi, sehingga memberi pengaruh pada penjangkaran aspirasi atau usulan dari masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dengan nilai (60) tentang pemberian usulan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah atau pihak pengelola proyek telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan atau ide mereka. Sedangkan bagi masyarakat tingkat partisipasi terendah pada saat memberikan usulan tentang jenis prasarana atau sarana yang perlu dibangun dengan nilai (53). Hal ini mungkin disebabkan kurang efektifnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen, serta ketergantungan masyarakat pada tenaga ahli perencanaannya seperti disebutkan dalam proses perencanaan di atas. Masyarakat juga menganggap usulan masyarakat kurang begitu mendapat tanggapan dari pihak pengelola proyek, walaupun dalam batas wajar, namun dalam indikator ini memperoleh nilai terendah diantara yang lain dengan nilai (53).

Secara lebih rinci kategori dari tataran ide dapat dilihat sebagai berikut:

commit to user

**Tabel 5.3 Tabel Distribusi Skor Rata-Rata dan Kategori Tataran Ide
Tiap Dusun**

Dusun	Kelompok Masyarakat	Skor Rata-Rata	Kategori
Bendungan	Kaum Perempuan	65,6	Sedang
	Kaum Rentan	62,5	Sedang
	Tokoh Masyarakat	62,5	Sedang
Bulu	Kaum Perempuan	95,8	Tinggi
	Kaum Rentan	29,2	Rendah
	Tokoh Masyarakat	70,8	Tinggi
Ceperan	Kaum Perempuan	31,3	Rendah
	Kaum Rentan	37,5	Sedang
	Tokoh Masyarakat	62,5	Sedang
Geran	Kaum Perempuan	62,5	Sedang
	Kaum Rentan	68,8	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	90,6	Tinggi
Jetak	Kaum Perempuan	50,0	Sedang
	Kaum Rentan	43,8	Sedang
	Tokoh Masyarakat	50,0	Sedang
Kadipaten	Kaum Perempuan	84,4	Tinggi
	Kaum Rentan	59,4	Sedang
	Tokoh Masyarakat	78,1	Tinggi
Ngelo	Kaum Perempuan	53,1	Sedang
	Kaum Rentan	59,4	Sedang
	Tokoh Masyarakat	53,1	Sedang
Nglenggong	Kaum Perempuan	45,8	Sedang
	Kaum Rentan	70,8	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	83,3	Tinggi
Tenongan	Kaum Perempuan	65,6	Sedang
	Kaum Rentan	43,8	Sedang
	Tokoh Masyarakat	34,4	Sedang

Sumber : data analisis

Skor rata-rata partisipasi masyarakat pada tataran ide di seluruh Desa Jendi bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi. Dengan rata-rata skor tingkat partisipasi masyarakatnya secara keseluruhan adalah sedang (59,8). Skor partisipasi tertinggi diperoleh dari masyarakat kaum Perempuan di dusun bulu dengan skor (95,8), namun kaum rentan di dusun Bulu juga memperoleh nilai partisipasi paling rendah di seluruh Desa yaitu dengan skor (29,2). Keragaman skor tingkat partisipasi dari

tiap dusun ini tidak hanya tergantung pada kesediaan masyarakat dalam berpartisipasi namun juga kecakapan dari pihak tim perencana maupun tim fasilitator kelurahan dalam mensosialisasikan program *Neighbourhood development* di kalangan Masyarakat (supaya masyarakat memahami rencana dan rancangan yang akan dibangun) serta upaya mereka untuk membujuk masyarakat supaya memberikan ide atau gagasan dalam perencanaan. Sedangkan distribusi kategori tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari masing-masing kelompok dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.4 Tabel Distribusi Kategori Tataran Ide Tiap Kelompok Masyarakat

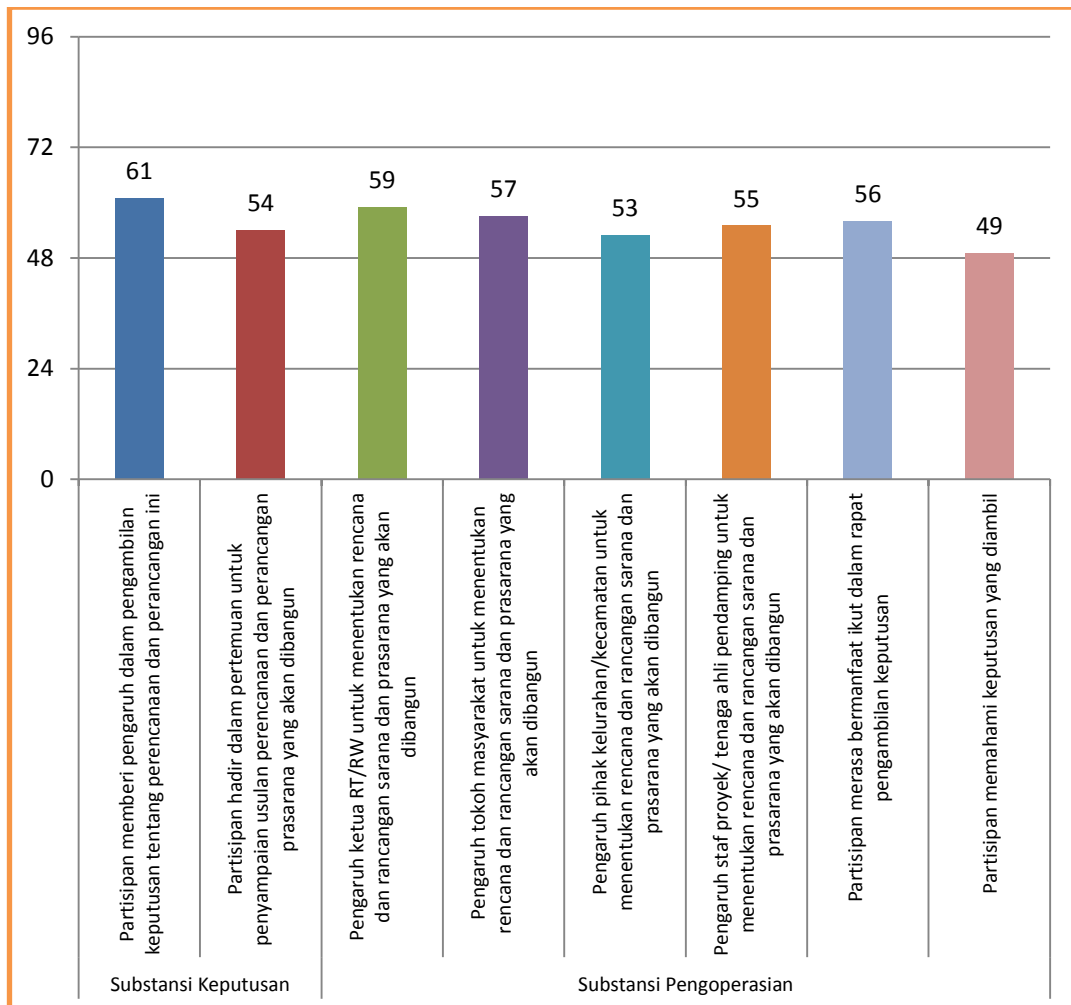
Kelompok Masyarakat	Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Tokoh Masyarakat	3	5	24
Kaum Perempuan	4	14	14
Kaum Rentan	9	18	5
Jumlah	16	37	43

Sumber : data analisis

Dari analisis data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok tokoh masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang tertinggi diantara kelompok masyarakat yang lain. Dari hasil kuesioner dapat diperoleh informasi bahwa tokoh masyarakat cukup antusias dalam tahapan tataran ide/ sosialisasi dan mau untuk disejajarkan dengan kaum rentan dan kaum perempuan dalam sosialisasi program. Keterlibatan kaum perempuan dalam tahap ini juga cukup tinggi, hal ini sesuai dengan pada saat proses perencanaan yang diadakan sebelumnya yang selalu melibatkan kaum perempuan dalam setiap kegiatan. Sedangkan kaum rentan menempati posisi terbawah dalam tingkat partisipasi.

Untuk lebih jelas dalam pendistribusian tingkat partisipasi masyarakat dalam tataran ide dapat dilihat dalam peta berikut ini:

2. Tataran Pengambilan Keputusan



Sumber : data analisis

Gambar 5.3 Diagram Pembobotan Tataran Pengambilan Keputusan

Dalam substansi keputusan pada tataran pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa di Desa Jendi partisipan pengambil keputusan adalah masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari tingginya nilai pada pernyataan partisipan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan dan perancangan dengan nilai (61). Masyarakat sebenarnya mengetahui besarnya pengaruh mereka dalam program ini, namun dalam kehadiran dalam pertemuan untuk menentukan keputusan masyarakat hanya mendapat nilai (54) atau bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat hanya dalam batas sedang. Hal ini mungkin disebabkan berbagai kendala baik dari masyarakat sendiri maupun dari tim perencana dalam penetapan jadwal pertemuan.

Sedangkan dalam substansi pengoperasian tataran pengambilan keputusan, ketua RT/ RW memiliki pengaruh yang besar untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ketua RT/ RW yang dalam pelaksanaannya lebih mengetahui secara detail permasalahan yang ada di lingkungannya, karena dalam proses perencanaan partisipatif keterlibatan masyarakat tidak lepas dari ketua RT/ RW masing-masing sebagai motor penggerak, sehingga tanpa keterlibatan ketua RT/ RW maka program dan aspirasi masyarakat tidak berjalan secara maksimal. Keragaman aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membuat tidak semua masyarakat bisa mengikuti kegiatan *Neighbourhood Development* secara lebih baik, dengan alasan seperti inilah keputusan yang telah ditetapkan oleh program *Neighbourhood Development* ada sebagian masyarakat yang tidak memahami.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Jendi partisipan pengambil keputusan adalah masyarakat sendiri, dengan ketua RT/ RW sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Serta mempunyai akses untuk melakukan kontak dengan pejabat yang mempunyai kewenangan atas aktivitas dan alokasi setempat, dan mempunyai legitimasi sebagai wakil masyarakat lokal.

Kehadiran masyarakat masih dalam tingkat sedang pada saat pertemuan untuk menyampaikan usulan prasarana yang akan dibangun. Masyarakat yang merasa bermanfaat mengikuti rapat pengambilan keputusan juga dalam tingkat yang sedang. Sedangkan pemahaman masyarakat pada keputusan yang diambil paling rendah dalam evaluasi tataran pengambilan keputusan, namun masih dalam taraf sedang (51%) dengan nilai (49).

Secara lebih rinci kategori dari tataran Pengambilan Keputusan dapat dilihat sebagai berikut:

commit to user

Tabel 5.5 Tabel Distribusi Skor Rata- Rata dan Kategori Tataran Pengambilan Keputusan Tiap Dusun

Dusun	Kelompok Masyarakat	Skor Rata-Rata	Kategori
Bendungan	Kaum Perempuan	53,1	Sedang
	Kaum Rentan	71,9	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	50,0	Sedang
Bulu	Kaum Perempuan	83,3	Tinggi
	Kaum Rentan	25,0	Rendah
	Tokoh Masyarakat	62,5	Sedang
Ceperan	Kaum Perempuan	18,8	Rendah
	Kaum Rentan	37,5	Sedang
	Tokoh Masyarakat	50,0	Sedang
Geran	Kaum Perempuan	59,4	Sedang
	Kaum Rentan	71,9	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	81,3	Tinggi
Jetak	Kaum Perempuan	59,4	Sedang
	Kaum Rentan	46,9	Sedang
	Tokoh Masyarakat	46,9	Sedang
Kadipaten	Kaum Perempuan	78,1	Tinggi
	Kaum Rentan	56,3	Sedang
	Tokoh Masyarakat	81,3	Tinggi
Ngelo	Kaum Perempuan	62,5	Sedang
	Kaum Rentan	56,3	Sedang
	Tokoh Masyarakat	46,9	Sedang
Nglenggong	Kaum Perempuan	37,5	Sedang
	Kaum Rentan	79,2	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	79,2	Tinggi
Tenongan	Kaum Perempuan	71,9	Tinggi
	Kaum Rentan	37,5	Sedang
	Tokoh Masyarakat	28,1	Rendah

Sumber : data analisis

Dari tabel di atas, dapat dilihat skor rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jendi pada tataran pengambilan keputusan paling banyak pada tingkat partisipasi sedang (14 dari 27). Sedangkan skor rata-rata tertinggi pada kaum perempuan di dusun Bulu dengan skor (83,3). Namun kaum perempuan di dusun ceperan mempunyai tingkat partisipasi yang paling rendah yaitu dengan skor (18,8). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan pada dusun Bulu telah memahami substansi

keputusan serta substansi pengoperasian pada tataran pengambilan keputusan, dan paling baik diantara kelompok masyarakat yang lain. Sedangkan distribusi kategori tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari masing-masing kelompok dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.6 Tabel Distribusi Kategori Pengambilan Keputusan Tiap Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat	Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Tokoh Masyarakat	3	11	18
Kaum Perempuan	4	17	11
Kaum Rentan	16	8	8
Jumlah	23	36	37

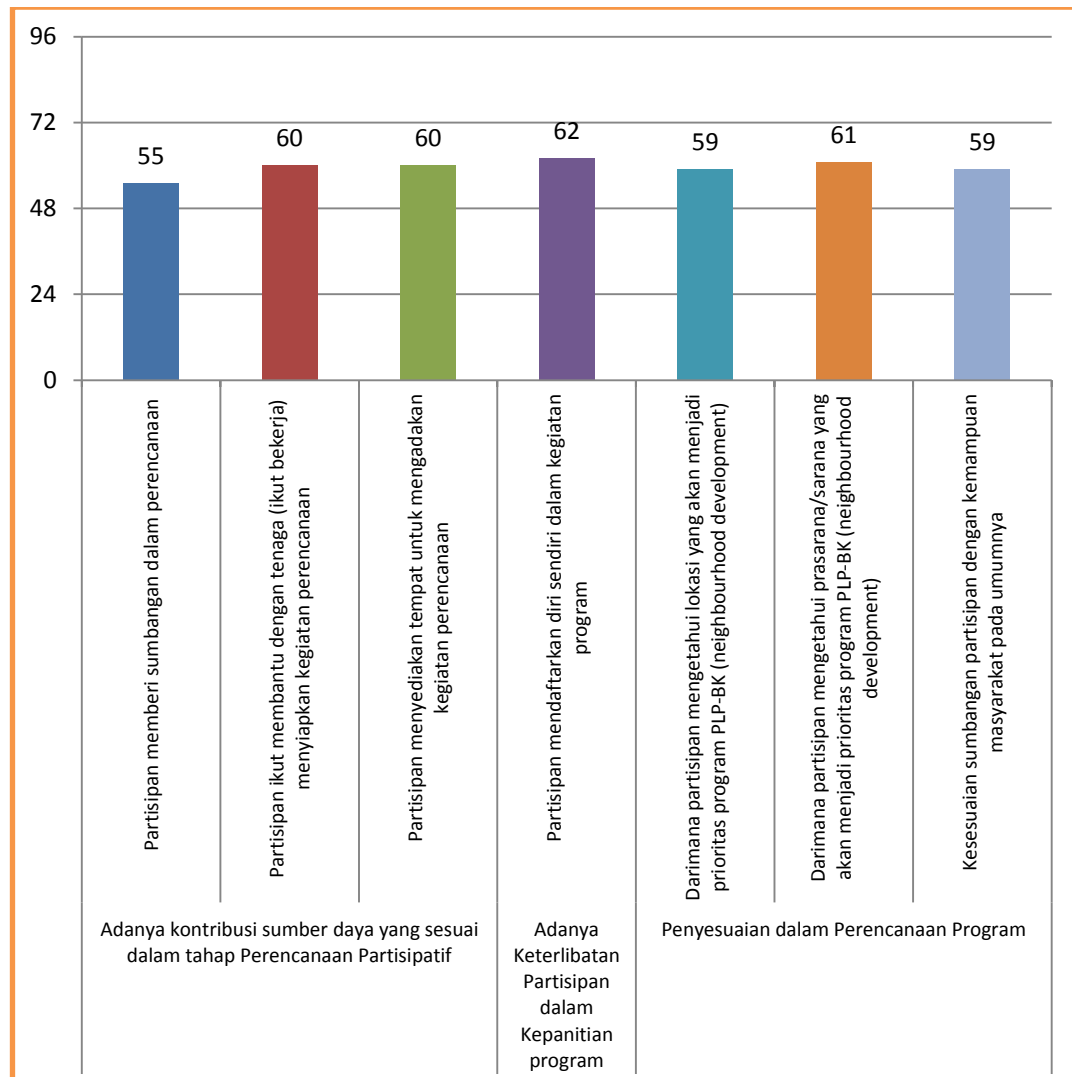
Sumber : data analisis

Dari analisis data dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat mendominasi kategori tingkat partisipasi tinggi dengan jumlah 18 dari 37 yang berkategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sebagai panutan masyarakat telah memahami pentingnya peran mereka dalam tataran pengambilan keputusan, sehingga suara mereka dapat mewakili kelompok lain yang minoritas seperti kaum rentan yang pada hasil analisis di atas mendominasi kategori rendah dengan jumlah 16 orang dari total 23 pada kategori rendah. Sedangkan kaum perempuan di Desa Jendi secara keseluruhan lebih dari 50% dari total sampel kaum perempuan dikategorikan pada tingkat partisipasi sedang dan tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan tidak hanya sekedar berpartisipasi dalam tataran pengambilan keputusan perencanaan di Desa Jendi.

Untuk lebih jelas dalam pendistribusian tingkat partisipasi masyarakat dalam tataran pengambilan keputusan dapat dilihat dalam peta berikut ini:

commit to user

3. Tataran Implementasi



Sumber : data analisis

Gambar 5.4 Diagram Pembobotan Tataran Implementasi

Dalam tataran implementasi masyarakat kontribusi sumber daya masyarakat Desa Jendi cukup baik dengan hasil dari penelitian 62,5% responden menyatakan pernah memberi bantuan/ kontribusi dengan cara menyediakan tempat untuk mengadakan kegiatan perencanaan dengan nilai (60). Namun untuk sumbangan berupa uang, makanan, atau lainnya yang bersifat material mendapat peringkat terakhir dalam tingkatan partisipasi tataran implementasi ini (57,3%) dengan nilai (55), walaupun masih dalam tahap wajar/ partisipasi sedang. Seperti yang terlihat pada gambar 5.4.

commit to user

Administrasi maupun koordinasi di Desa Jendi sendiri cukup baik dalam kegiatan perencanaan ini. Terbukti dari hasil analisis yang menyatakan bahwa masyarakat mengetahui informasi baik lokasi maupun prasarana yang akan menjadi prioritas dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat tersebut terlibat juga dalam kepanitiaan (menjadi anggota) dengan nilai partisipasi (62).

Sedangkan untuk indikator penyesuaian dalam perencanaan program, menurut hasil analisis dapat diketahui bahwa masyarakat telah mengetahui kegiatan perencanaan pertama kali dari kalangan masyarakat itu sendiri bukan dari pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan respon yang baik pada kegiatan perencanaan program *Neighbourhood Development* dengan cara mendaftarkan sendiri bukan oleh pihak lain, karena masyarakat telah mengetahui manfaat dari kegiatan yang menguntungkan masyarakat itu sendiri.

Secara lebih rinci kategori dari tataran Implementasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.7 Tabel Distribusi Skor Rata-Rata dan Kategori Tataran Implementasi Tiap Dusun

Dusun	Kelompok Masyarakat	Skor Rata-Rata	Kategori
Bendungan	Kaum Perempuan	50,0	Sedang
	Kaum Rentan	78,6	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	57,1	Sedang
Bulu	Kaum Perempuan	90,5	Tinggi
	Kaum Rentan	33,3	Sedang
	Tokoh Masyarakat	81,0	Tinggi
Ceperan	Kaum Perempuan	35,7	Sedang
	Kaum Rentan	28,6	Rendah
	Tokoh Masyarakat	57,1	Sedang
Geran	Kaum Perempuan	67,9	Tinggi
	Kaum Rentan	75,0	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	89,3	Tinggi
Jetak	Kaum Perempuan	64,3	Sedang
	Kaum Rentan	46,4	Sedang
	Tokoh Masyarakat	57,1	Sedang

Dusun	Kelompok Masyarakat	Skor Rata-Rata	Kategori
Kadipaten	Kaum Perempuan	82,1	Tinggi
	Kaum Rentan	42,9	Sedang
	Tokoh Masyarakat	89,3	Tinggi
Ngelo	Kaum Perempuan	60,7	Sedang
	Kaum Rentan	60,7	Sedang
	Tokoh Masyarakat	53,6	Sedang
Nglenggong	Kaum Perempuan	42,9	Sedang
	Kaum Rentan	66,7	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	71,4	Tinggi
Tenongan	Kaum Perempuan	78,6	Tinggi
	Kaum Rentan	42,9	Sedang
	Tokoh Masyarakat	39,3	Sedang

Sumber : data analisis

Dari tabel di atas, dapat dilihat skor rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jendi pada tataran implementasi paling banyak pada tingkat partisipasi sedang (15 dari 27). Skor rata-rata tertinggi pada kaum perempuan di dusun Bulu dengan skor (90,5). Sedangkan skor rata-rata terendah pada kaum rentan di dusun Ceperan dengan skor rata-rata (28,6). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan pada dusun Bulu telah memberi kontribusi sumber daya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta paling banyak diantara kelompok yang lain. Kaum perempuan di dusun Bulu juga terlibat dalam kepanitiaan program secara aktif, lebih aktif daripada kelompok masyarakat yang lain. Kaum perempuan di dusun Bulu juga telah mengetahui penyesuaian dalam perencanaan pada tataran pengambilan keputusan. Sedangkan distribusi kategori tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari masing-masing kelompok dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

commit to user

Tabel 5.8 Tabel Distribusi Kategori Implementasi Tiap Kelompok Masyarakat

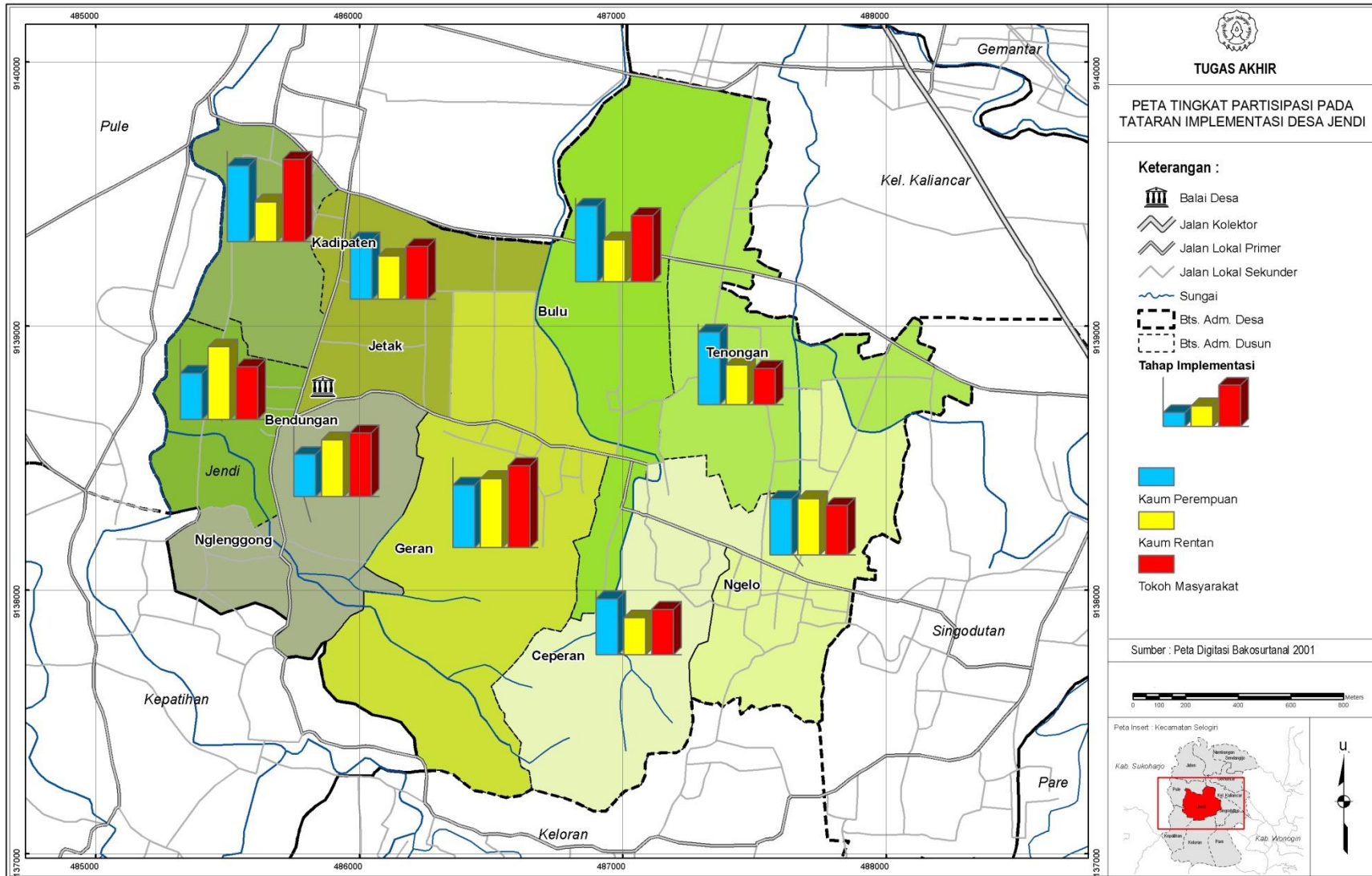
Kelompok Masyarakat	Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Tokoh Masyarakat	1	8	23
Kaum Perempuan	6	16	10
Kaum Rentan	14	10	8
Jumlah	21	34	41

Sumber : data analisis

Dari analisis data dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat mendominasi kategori tingkat partisipasi tinggi dengan jumlah 23 dari 41 yang berkategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sebagai panutan masyarakat telah memahami pentingnya peran mereka dalam tataran implementasi pada tahap perencanaan dengan adanya kontribusi sumber daya dari tokoh masyarakat, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam kepanitiaan program yang cukup tinggi tingkat partisipasinya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kaum rentan yang pada hasil analisis di atas mendominasi kategori rendah dengan jumlah 16 orang dari total 23 pada kategori rendah. Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor keterbatasan yang dimiliki kaum rentan sehingga kurang dalam hal kontribusi sumberdaya dan keaktifan dalam kepanitiaan program. Sedangkan kaum perempuan di Desa Jendi secara keseluruhan lebih dari 50% dari total sampel kaum perempuan dikategorikan pada tingkat partisipasi sedang dan tinggi, serta dalam distribusi skor rata-rata tingkat partisipasi kaum perempuan juga memperoleh skor tertinggi pada dusun Bulu. Maka dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan tidak hanya sekedar berpartisipasi dalam tataran pengambilan keputusan perencanaan di Desa Jendi.

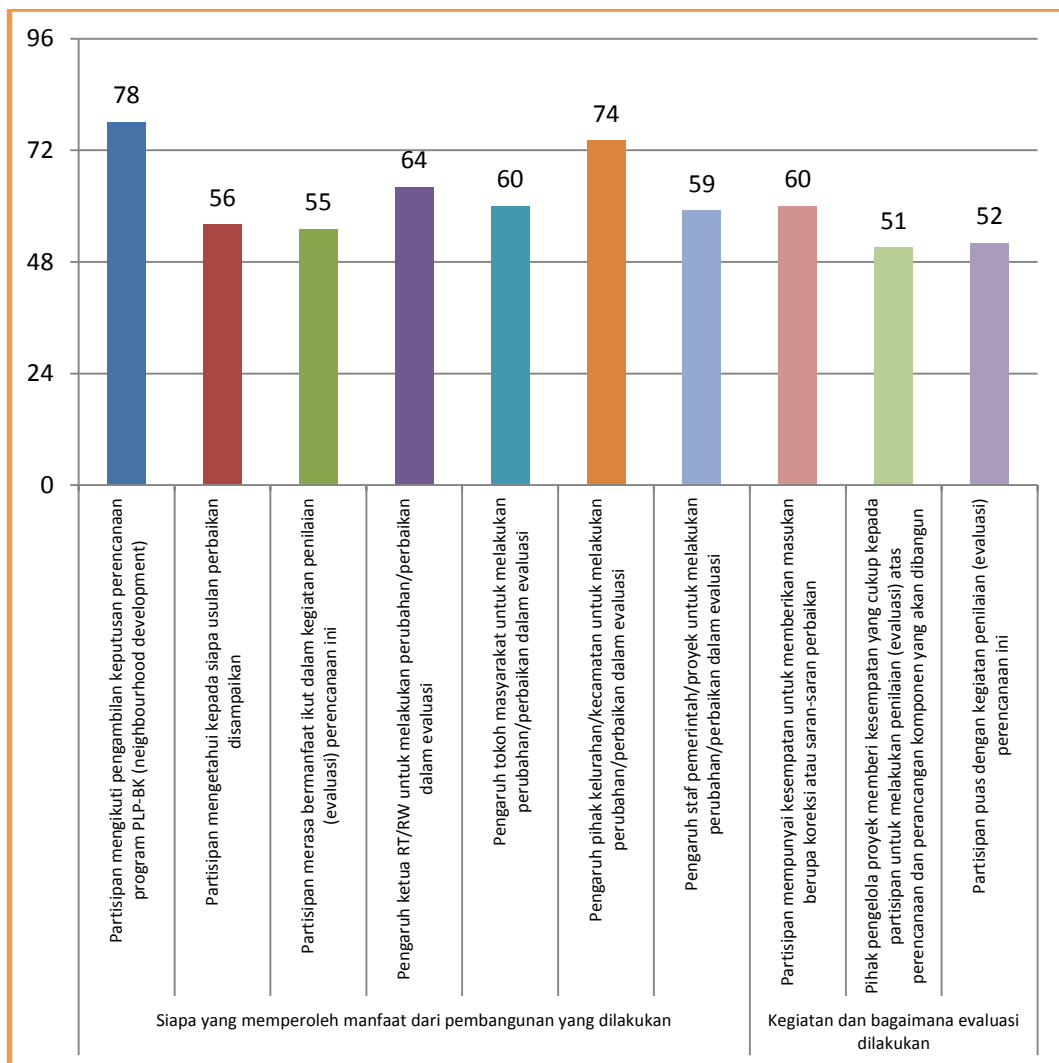
Untuk lebih jelas dalam pendistribusian tingkat partisipasi masyarakat dalam tataran implementasi dapat dilihat dalam peta berikut ini:

commit to user



commit to user

4. Tataran Evaluasi



Sumber : data analisis

Gambar 5.5 Diagram Pembobotan Tataran Evaluasi

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran evaluasi masyarakat sangat aktif dalam pengambilan keputusan perencanaan program *Neighbourhood Development* dengan nilai (78).

Keaktifan masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan proses pelaksanaan program yang selalu melibatkan masyarakat dalam FGD di setiap rapat pengambilan keputusan. Sehingga program menerapkan masyarakat sebagai subjek perencanaan, bukan hanya objek perencanaan, terbukti dengan 78 dari responden menyatakan mengikuti pengambilan keputusan (paling tinggi dari yang lain) dengan nilai (78). Keaktifan masyarakat dalam mengikuti pengambilan keputusan ini

mungkin disebabkan dari sosialisasi yang baik dari pihak penyelenggara program pada saat pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa memperoleh manfaat dalam mengikuti kegiatan, sehingga keterlibatan masyarakat bukan karena keterpaksaan. Sedangkan menurut masyarakat, pihak yang paling berpengaruh dalam melakukan perbaikan atas rencana yang akan dibangun adalah dari pihak kelurahan/kecamatan dengan nilai (74). Hal ini disebabkan oleh karena pihak kelurahan/kecamatan selain dianggap oleh masyarakat sebagai perwakilan dari pemerintah, pihak tersebut juga mengikuti program dari awal bersama masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih terwakili oleh pihak tersebut daripada pihak lain (mempunyai kekuasaan lebih).

Evaluasi sendiri dilakukan melalui masukan/saran, koreksi masyarakat baik secara langsung maupun dalam bilik pengaduan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan masyarakat yang 60 responden menyatakan mempunyai kesempatan untuk memberikan koreksi atau saran-saran perbaikan. Masyarakat juga merasa cukup puas dengan kegiatan penilaian ini,serta merasa cukup memberikan manfaat dengan nilai (52). Namun menurut masyarakat pihak program kurang memberi kesempatan untuk penilaian (evaluasi) atas perencanaan program dengan nilai (51). Hal ini juga dapat dilihat dari proses partisipasi yang dilakukan sebelumnya, dimana evaluasi dengan tim teknis dari pemerintah melibatkan sedikit masyarakat.

Secara lebih rinci kategori dari tataran Evaluasi dapat dilihat sebagai berikut:

commit to user

Tabel 5.9 Tabel Distribusi Skor Rata-Rata dan Kategori Tataran Evaluasi Tiap Dusun

Dusun	Kelompok Masyarakat	Nilai Rata-Rata	Kategori
Bendungan	Kaum Perempuan	60,0	Sedang
	Kaum Rentan	67,5	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	57,5	Sedang
Bulu	Kaum Perempuan	73,3	Tinggi
	Kaum Rentan	40,0	Sedang
	Tokoh Masyarakat	63,3	Sedang
Ceperan	Kaum Perempuan	40,0	Sedang
	Kaum Rentan	60,0	Sedang
	Tokoh Masyarakat	65,0	Sedang
Geran	Kaum Perempuan	70,0	Tinggi
	Kaum Rentan	67,5	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	80,0	Tinggi
Jetak	Kaum Perempuan	60,0	Sedang
	Kaum Rentan	57,5	Sedang
	Tokoh Masyarakat	60,0	Sedang
Kadipaten	Kaum Perempuan	75,0	Tinggi
	Kaum Rentan	45,0	Sedang
	Tokoh Masyarakat	82,5	Tinggi
Ngelo	Kaum Perempuan	55,0	Sedang
	Kaum Rentan	70,0	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	62,5	Sedang
Nglenggong	Kaum Perempuan	53,3	Sedang
	Kaum Rentan	76,7	Tinggi
	Tokoh Masyarakat	76,7	Tinggi
Tenongan	Kaum Perempuan	80,0	Tinggi
	Kaum Rentan	60,0	Sedang
	Tokoh Masyarakat	42,5	Sedang

Sumber : data analisis

Dari tabel di atas, dapat dilihat skor rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jendi pada tataran evaluasi paling banyak pada tingkat partisipasi sedang (16 dari 27). Rata-rata skor tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jendi secara keseluruhan di atas kategori rendah. Skor rata-rata tertinggi pada kelompok tokoh masyarakat di dusun Kadipaten dengan skor (82,5). Sedangkan skor rata-rata terendah pada kaum rentan di dusun Bulu dan kaum perempuan di dusun Ceperan

dengan skor rata-rata (40,0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat pada dusun Kadipaten telah mengetahui bahwa masyarakatlah sendiri yang memperoleh manfaat dari pembangunan yang akan dilakukan. Serta merasa puas dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan dan dapat menjadi contoh bagi kelompok masyarakat yang lain. Sedangkan distribusi kategori tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari masing-masing kelompok dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.10 Tabel Distribusi Kategori Evaluasi Tiap Kelompok Masyarakat

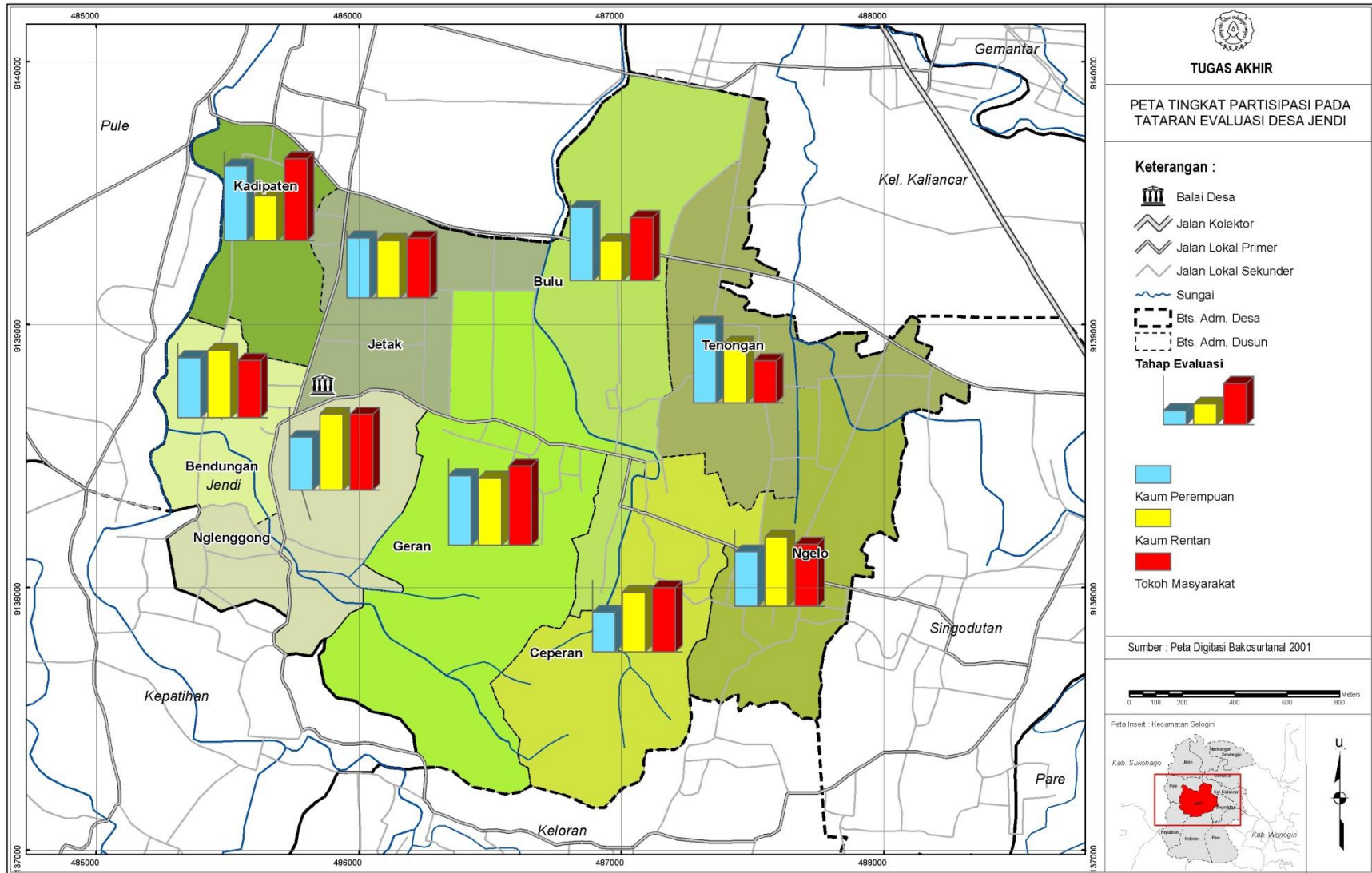
Kelompok Masyarakat	Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Tokoh Masyarakat	6	6	20
Kaum Rentan	5	15	12
Kaum Perempuan	6	14	12
Jumlah	17	35	44

Sumber : data analisis

Dari analisis data dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat mendominasi kategori tingkat partisipasi tinggi dengan jumlah 20 dari 44 yang berkategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sebagai panutan masyarakat telah mengetahui pentingnya evaluasi pada tahap perencanaan, serta mengetahui manfaat pembangunan bagi masyarakat Desa JEDI secara keseluruhan sehingga memperoleh tingkat partisipasi yang tinggi dalam tataran evaluasi. Kaum rentan dan kaum perempuan kurang begitu dominan dalam tataran evaluasi, hal ini mungkin disebabkan kurangnya pemahaman kelompok tersebut akan pentingnya evaluasi serta kemungkinan kurang didengarnya pendapat golongan kelompok ini dalam forum atau rapat evaluasi perencanaan sehingga kebanyakan tingkat partisipasi kelompok masyarakat ini pada kategori sedang.

Untuk lebih jelas dalam pendistribusian tingkat partisipasi masyarakat dalam tataran evaluasi dapat dilihat dalam peta berikut ini:

commit to user



Penghitungan analisis didapat dari rekapitulasi data jawaban pertanyaan total pada tiap tataran dengan penghitungan prosentase pada nilai jawaban dibagi nilai maksimal kemudian dibagi pada tiga kategori, yaitu : (1)rendah dengan interval nilai 0 sampai dengan 33; (2) sedang dengan interval nilai 33 sampai dengan 66; dan (3)tinggi dengan interval nilai 66 sampai dengan 100.

Berdasarkan pada pembobotan yang telah dilakukan dan nilai atau score dari masing-masing tataran maka dapat diketahui total partisipasi masyarakat dalam perencanaan program *Neighbourhood Development* yang dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.11 Nilai Total Partisipasi Masyarakat

No	Tataran	Bobot	Skor	Nilai
1	Ide	13%	58.00	7.33
2	Pengambilan Keputusan	41%	55.50	22.78
3	Implementasi	26%	59.43	15.64
4	Evaluasi	20%	60.90	12.18
Total Nilai				57.93

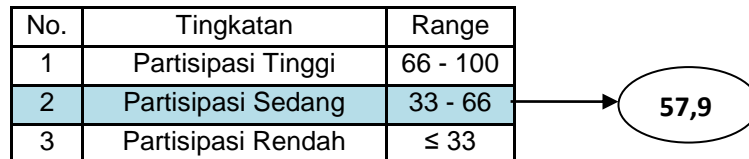
Sumber : Data analisis

Bobot pada tataran ide adalah 13% dan nilai skor adalah 58. Nilai adalah jumlah score dikalian presentase pembobotan, maka diperoleh nilai 7,33. Sedangkan pada tataran Pengambilan Keputusan bobotnya adalah 41% dan score 55,5. Maka menurut perhitungan diperoleh nilai 22,78. Pada tataran implementasi bobotnya adalah 26% dan score 59,43. Maka menurut perhitungan diperoleh nilai 15,64. Pada tataran evaluasi bobotnya adalah 20% dan score 60,9. Maka menurut perhitungan diperoleh nilai 12,18.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa total nilai partisipasi masyarakat dalam program *Neighbourhood Development* adalah sebesar 57,93 dengan score tertinggi adalah pada tataran pengambilan keputusan sebesar 22,78. Sehingga dengan total nilai score sebesar 57,93 maka

dapat diklasifikasikan kedalam kategori tingkat partisipasi sedang karena berada diantara 33 sampai dengan 66.

No.	Tingkatan	Range
1	Partisipasi Tinggi	66 - 100
2	Partisipasi Sedang	33 - 66
3	Partisipasi Rendah	≤ 33



Sumber : data analisis

Gambar 5.6 Analisis Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Jendi termasuk dalam kategori *tokenism* menurut Arnstein. Penghargaan masyarakat Desa Jendi cukup dihargai melalui pemberian informasi, diajak konsultasi, dan ditempatkan wakilnya dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, namun peran pemerintah masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perencanaan.

Kategori atau skala partisipasi total masyarakat tersebut sama dengan kenyataan di lapangan dimana masyarakat masih sangat bergantung pada tenaga ahli perencana desa baik dalam pengambilan keputusan sampai dengan penyusunan rencana desanya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Proses Partisipasi di Desa Jendi

a. Evaluasi Partisipasi Desa Jendi

Proses perencanaan partisipasi masyarakat di Desa Jendi terbagi dalam 3 tahap : (1) persiapan perencanaan partisipatif (sosialisasi); (2) perencanaan lingkungan makro; (3) perencanaan lingkungan mikro. Adanya kegiatan lomba-lomba dalam penjangkaran aspirasi masyarakat pada kegiatan sosialisasi memberikan pengaruh pada banyaknya jumlah masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya. Peran tim perencanaan Desa Jendi cukup baik dalam mengakomodir ke empat tataran (ide, pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi) dalam kegiatan-kegiatan pada tahap perencanaan partisipatif di Desa Jendi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan.

Lingkup dan intensitas partisipasi ini dapat terlihat dalam proses perencanaan partisipatif yang dalam penjangkaran aspirasi. Intensitas kegiatan di Desa Jendi sendiri cukup tinggi dalam menggali potensi masyarakat Desa.

Masyarakat di Desa Jendi diberi keleluasaan dalam segala aspek perencanaan Desa Jendi. Keberadaan pemerintah sebagai penyedia program juga lebih cenderung pada teknis pelaksanaan program, sehingga proses partisipasi dalam masyarakat kurang begitu mendapat perhatian. Pemerintah cenderung melihat hasil akhirnya yang berupa dokumen perencanaan dan cenderung melihat sistematika dokumen untuk dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang ada (dibuat konsultan). Masyarakat sendiri menyerahkan semua sistematika penulisan kepada TAPP sehingga kurang begitu ada masukan dalam hal revisi. Sehingga kurangnya sinkronisasi hasil antara pemerintah langsung ke masyarakat. Hanya pada pemerintah dengan TAPP Desa

Jendi. Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat kurang efektif dalam penyusunan rencana Desa.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan pada Tahap Perencanaan dalam Program ND dengan Pedoman ND

Dalam tahapan persiapan proses perencanaan partisipatif telah 100% sesuai dengan pedoman, karena seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam pedoman telah diterapkan/ dilaksanakan pada program *Neighbourhood Development* di Desa Jendi. Sedangkan pada tahapan perencanaan lingkungan makro, dari 8 kegiatan yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan 50% telah sesuai dengan pedoman. Faktor yang mempengaruhi kesesuaian dalam tahapan perencanaan lingkungan makro:

- Penyesuaian jenis kegiatan yang dilakukan dengan kondisi masyarakat di Desa Jendi
- Penyesuaian waktu kegiatan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya

Namun secara garis besar pelaksanaan telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam tahapan perencanaan lingkungan mikro, dari 6 kegiatan di lapangan, 83,33 % telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Faktor yang mempengaruhi kesesuaian dalam tahapan perencanaan lingkungan mikro:

- Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan prioritas
- Ketergantungan masyarakat dengan Tenaga ahli perencana Desa.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Jendi

Dari analisis tingkat partisipasi dapat ditarik kesimpulan pada tiap-tiap tataran sebagai berikut :

a. Tataran Ide

- 1) Partisipan memahami rencana dan rancangan pembangunan
 - Pihak pengelola proyek telah memberikan penjelasan cukup tentang perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan.

- Proses perencanaan partisipatif di Desa Jendi yang menggunakan media-media berupa kegiatan yang melibatkan masyarakat cukup menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi, namun dalam pemahaman akan tujuan dari program yang disisipkan dalam kegiatan kurang begitu maksimal dengan hanya memperoleh nilai partisipasi sedang dari masyarakat.
- Pemerintah atau pihak pengelola proyek di Desa Jendi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan atau ide mereka.

2) Partisipan memberikan ide/ gagasan pada tahap Perencanaan Partisipatif

- Pemberian usulan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan serta kemauan masyarakat dalam memberikan usulan tentang prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan cukup tinggi. Tingginya nilai partisipasi karena dipengaruhi oleh proses partisipatif yang telah dilakukan sebelumnya melalui penjangkaran aspirasi melalui proses FGD pada tiap-tiap dusun.
- Kurang efektifnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen, serta ketergantungan masyarakat pada tenaga ahli perencanaannya menyebabkan pemberian usulan tentang jenis prasarana atau sarana yang perlu dibangun mendapat nilai terendah dalam indikator. Dan Masyarakat juga menganggap usulan masyarakat kurang begitu mendapat tanggapan dari pihak pengelola proyek karena keputusan lebih condong pada keputusan TA perencana Desa dengan.

Rata-rata skor tingkat partisipasi pada tataran ide secara keseluruhan adalah sedang. Rata-rata skor partisipasi tertinggi diperoleh dari masyarakat kaum Perempuan di dusun bulu, paling rendah adalah kaum rentan di dusun bulu.

Dari analisis data diketahui bahwa kelompok tokoh masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang tertinggi diantara kelompok masyarakat yang lain. *commit to user*

b. Tataran Pengambilan Keputusan

1) Substansi Keputusan

- Dalam substansi keputusan dapat diketahui bahwa di Desa Jendi partisipan pengambil keputusan adalah masyarakat sendiri dengan, namun dalam kehadiran dalam pertemuan untuk menentukan keputusan masyarakat tingkat partisipasinya sedang..

2) Substansi Pengoperasian

- Dalam substansi pengoperasian, ketua RT/ RW memiliki pengaruh yang besar untuk menentukan rencana dan rancangan sarana dan prasarana yang akan dibangun.

Skor rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jendi pada tataran pengambilan keputusan paling banyak pada tingkat partisipasi sedang. Skor rata-rata tertinggi pada kaum perempuan di dusun Bulu. Sedangkan tingkat partisipasi yang paling rendah pada kaum perempuan di dusun ceperan dengan.

Tokoh masyarakat mendominasi kategori tingkat partisipasi tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sebagai panutan masyarakat telah memahami pentingnya peran mereka dalam tataran pengambilan keputusan, sehingga suara mereka dapat mewakili kelompok lain yang minoritas seperti kaum rentan yang pada hasil analisis mendominasi kategori rendah.

c. Tataran Implementasi

1) Adanya kontribusi sumber daya yang sesuai dalam tahap Perencanaan Partisipatif

- Kontribusi sumber daya masyarakat Desa Jendi cukup baik dengan hasil penelitian tingkat partisipasi yang tinggi dengan responden menyatakan bahwa masyarakat pernah memberi bantuan/ kontribusi dengan cara menyediakan tempat untuk mengadakan kegiatan perencanaan. Namun untuk sumbangan berupa uang, makanan, atau lainnya yang bersifat material pada tingkat partisipasi sedang.

commit to user

2) Adanya Keterlibatan Partisipan dalam Kepanitiaan program

- Administrasi maupun koordinasi cukup baik dalam kegiatan perencanaan ini. Masyarakat mengetahui informasi baik lokasi maupun prasarana yang akan menjadi prioritas dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat tersebut terlibat juga dalam kepanitiaan (menjadi anggota) dengan nilai partisipasi.

3) Penyesuaian dalam Perencanaan Program

- penyesuaian dalam perencanaan program, dapat diketahui bahwa masyarakat telah mengetahui kegiatan perencanaan pertama kali dari kalangan masyarakat itu sendiri bukan dari pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan respon yang baik pada kegiatan perencanaan program *Neighbourhood Development* dengan cara mendaftarkan sendiri bukan oleh pihak lain.

Skor rata-rata tertinggi pada tataran implementasi adalah pada kaum perempuan di dusun Bulu. Sedangkan skor rata-rata terendah pada kaum rentan di dusun Ceperan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan pada dusun Bulu telah memberi kontribusi sumber daya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta paling banyak diantara kelompok yang lain.

Tokoh masyarakat mendominasi kategori tingkat partisipasi tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sebagai panutan masyarakat telah memahami pentingnya peran mereka dalam tataran implementasi pada tahap perencanaan dengan adanya kontribusi sumber daya dari tokoh masyarakat, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam kepanitiaan program yang cukup tinggi tingkat partisipasinya. Kaum rentan mendominasi kategori rendah. Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor keterbatasan yang dimiliki kaum rentan sehingga kurang dalam hal kontribusi sumberdaya dan keaktifan dalam kepanitiaan program.

d. Tataran Evaluasi

- 1) Siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan
 - Tingkat partisipasi masyarakat tinggi dengan pernyataan mengikuti pengambilan keputusan, hal ini mungkin disebabkan dari sosialisasi yang baik pada saat pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa memperoleh manfaat dalam mengikuti kegiatan, dan keterlibatan masyarakat sendiri bukan karena keterpaksaan.
 - Pihak yang paling berpengaruh dalam melakukan perbaikan atas rencana yang akan dibangun adalah dari pihak kelurahan/kecamatan.
- 2) Kegiatan dan bagaimana evaluasi dilakukan
 - Evaluasi dilakukan melalui masukan/ saran, koreksi masyarakat baik secara langsung maupun dalam bilik pengaduan masyarakat, masyarakat desa Jendi cukup tinggi pada pernyataan mempunyai kesempatan untuk memberikan koreksi atau saran-saran perbaikan.
 - Masyarakat juga merasa cukup puas dengan kegiatan penilaian, serta merasa cukup memberikan manfaat. Namun menurut masyarakat pihak program kurang memberi kesempatan untuk penilaian (evaluasi) atas perencanaan program.

Rata-rata skor tingkat partisipasi masyarakat di Desa Jendi secara keseluruhan di atas kategori rendah. Skor rata-rata tertinggi pada kelompok tokoh masyarakat di dusun Kadipaten. Sedangkan skor rata-rata terendah pada kaum rentan di dusun Bulu dan kaum perempuan di dusun Ceperan.

Tokoh masyarakat sebagai panutan masyarakat telah mengetahui pentingnya evaluasi pada tahap perencanaan, serta mengetahui manfaat pembangunan bagi masyarakat Desa Jendi secara keseluruhan sehingga memperoleh tingkat partisipasi yang tinggi dalam tataran evaluasi. Kaum rentan dan kaum perempuan kurang begitu dominan dalam tataran evaluasi, hal ini mungkin disebabkan kurangnya pemahaman kelompok tersebut akan pentingnya evaluasi serta kemungkinan kurang didengarnya

pendapat golongan kelompok ini dalam forum atau rapat evaluasi perencanaan.

Berdasarkan hasil analisis, pembobotan yang telah dilakukan dan nilai atau score dari masing-masing tataran maka dapat diketahui total partisipasi masyarakat dalam perencanaan program *Neighbourhood Development* adalah dengan nilai total (57,93) dengan score tertinggi adalah pada tataran pengambilan keputusan sebesar (22,78). Sehingga berdasarkan skala partisipasi masyarakat dalam gambar 5.6, dengan total nilai score sebesar **57,93** maka dapat diklasifikasikan kedalam kategori tingkat **partisipasi sedang**.

Partisipasi masyarakat di Desa Jendi termasuk dalam kategori *tokenism* menurut Arnstein. Penghargaan masyarakat Desa Jendi cukup dihargai melalui pemberian informasi, diajak konsultasi, dan ditempatkan wakilnya dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, namun peran pemerintah masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perencanaan.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan dalam program *Neighbourhood Development* diperlukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Umum

- a. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen dalam memberi kesempatan dan dukungan kepada masyarakat. Perlunya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan, mengikuti, dan berperan aktif dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu juga perlu menunjukkan dukungan, dengan aktif melibatkan diri dan mendengar secara langsung keluhan permasalahan masyarakat, memotivasi dan memberi respon positif terhadap aspirasi masyarakat.

commit to user

- b. Seluruh proses kegiatan dalam perencanaan lebih baik dilakukan mulai dari pengumuman kepada masyarakat, waktu kegiatan disesuaikan dengan waktu masyarakat agar kehadiran masyarakat lebih optimal. Masyarakat juga harus lebih memahami kegiatan apa yang akan mereka lakukan agar kegiatan dalam program pembangunan dapat lebih baik lagi hasilnya.

2. Khusus

a. Tataran Ide

- Perlunya proses sosialisasi yang intens kepada masyarakat supaya pemahaman akan program dapat berhasil baik
- Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen (penambahan kegiatan dalam tahap ini), sehingga masyarakat tidak hanya bergantung kepada keputusan tenaga ahli perencanaan Desa

b. Tataran Pengambilan Keputusan

- Perlunya sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengambilan keputusan dengan kepentingan masyarakat, sehingga diperoleh tingkat kehadiran yang tinggi dalam pengambilan keputusan.
- Perlunya kerjasama dengan ketua RT/ RW setempat, karena besarnya pengaruh terhadap masyarakat. Sehingga program dapat berjalan lebih baik.

c. Tataran Implementasi

- Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumbangan masyarakat untuk keberlanjutan program. (melalui sosialisasi, musyawarah Desa, dsb)
- Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kepanitiaan program. sehingga dapat lebih menyuarakan aspirasi masyarakat dalam program.

d. Tataran Evaluasi

- Pemerintah harus lebih memanfaatkan peran dari pihak kelurahan/ Desa dan kecamatan dalam program sebagai wakil dari masyarakat dalam evaluasi program.

- Perlunya peningkatan kegiatan evaluasi (penilaian) dari pihak pengelola program dalam tiap tahapannya.

3. Penelitian Selanjutnya

- Tingkat partisipasi masyarakat dapat digunakan pada penelitian selanjutnya setelah tahap perencanaan terkait dengan hasil akhir pada tahap perencanaan yang berupa dokumen rencana untuk tahapan selanjutnya.
- Diharapkan untuk lebih spesifik membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi serta detail unsur yang terkait.



commit to user